

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU



DOKUMEN LKJIP

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

TAHUN 2019



Alamat Kantor : Jl. APT. Pranoto No. 1 Gedung Terpadu Kec. Tanjung Redeb
E-Mail : kppkb.berau@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Tahun 2019 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau telah dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan laporan tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja satuan kerja perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran strateginya. Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau dapat menjadi Instansi Pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya secara efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Tahun 2019 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau ini kami sampaikan.

Tanjung Redeb, 6 Januari 2020
**KEPALA DPRKBP3A,
KABUPATEN BERAU**



Dr. Hj. ROHAINI
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/e)
NIP. 19600815 198602 2007

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	37
1.4 Sumber Manusia	39
1.5 Permasalahan Utama (Isu Strategis)	50
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	56
2.1 Rencana Strategis	56
2.1.1 Visi dan Misi	56
2.1.2 Tujuan dan Sasaran	57
2.1.3 Kebijakan, Strategi, Arah Kebijakan dan Program	58
2.2 Indikator Kinerja Utama	64
2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	64
2.4 Perjanjian Kinerja (PK)	65
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	73
3.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	74
3.2 Capaian Kinerja Perangkat Daerah	76
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	84
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019	79
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2018	122
3. Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi	126
4. Analisa Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	130
3.4 Realisasi Anggaran	131
BAB IV PENUTUP	133

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel I.1	Komposisi jumlah PNS dan Non PNS Berdasar Jenis Kelamin 45
Tabel I.2	Komposisi jumlah PNS Berdasarkan Golongan dan Pendidikan 45
Tabel I.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas PPKBP3A 47
Tabel 5	Rencana Kinerja Tahun 2019 65
Tabel 6	Perjanjiaan Kinerja Tahun 2019 66
Tabel 7	Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2019 72
Tabel 8	Realisasi Belanja Langsung Tahun 2019 72
Tabel III.1	Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2018 74
Tabel III.2	Realisasi Belanja Langsung Tahun 2018 75
Tabel III.3	Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2018 75
Tabel III.4	Realisasi Kinerja Berdasar Sasaran Strategis Tahun 2019 76
Tabel III.5	Program Kegiatan (Target) Tahun 2019 79
Tabel III.6	Realisasi Program Pelayanan Adm. Perkantoran Tahun 2019 85
Tabel III.7	Program Peningkatan Saprass Tahun 2019 100
Tabel III.8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 101
Tabel III.9	Program Keluarga Berencana Kegiatan Penyediaan Pelayanan KB dan Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin 102
Tabel III.10	Program KB Kegiatan Penyediaan Saprass Penyuluhan KB (DAK-Fisik) Tahun 2019 104
Tabel III.11	Program KB Kegiatan BOKB (DAK Non Fisik 2019) 105
Tabel III.12	Program KB Kegiatan Pendampingan DAK BOKB dan DAK Fisik 108
Tabel III.13	Program KB Kegiatan Sosialisasi/Pelatihan Jaminan Pelayanan KB bagi Klinik KB, dr. Praktek dan Bidan Praktek 109
Tabel III.14	Program Kesehatan Reproduksi 2019 111
Tabel III.15	Program Penguatan Kelembagaan PUG Kegiatan Fasilitasi Pengembangan P2TP2A 117
Tabel III.16	Program Penguatan Kelembagaan PUG Kegiatan Pelatihan dan Road Show melalui PPRG 116
Tabel III.17	Program Penguatan Kelembagaan PUG Kegiatan Kabupaten Layak Anak (KLA) 120
Tabel III.18	Program Penguatan Kelembagaan PUG Kegiatan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PUSPAGA Berbasis Hak Anak 121
Tabel III.19	Program Penguatan Kelembagaan PUG Kegiatan Pemenuhan Hak Anak 123
Tabel III.20	Program Peningkatan Peran Serta & Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan 125
Tabel III.21	Program Peningkatan Peran Serta & Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Kegiatan Expose Peningkatan Kualitas Perempuan dalam Pembangunan 127
Tabel III.22	Program Peningkatan Peran Serta & Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Kegiatan Pembinaan & Evaluasi Model Desa Prima 128
Tabel III.23	Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Kegiatan Pembinaan & Evaluasi Kelompok UPPKS 129
Tabel III.24	Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Kegiatan Pengkajian, Pengembangan Model Operasional BKB Tahun 2018 133

RINGKASAN EKSEKUTIF

Mencermati Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota. Yang menjadi kewenangan Daerah terdiri dari urusan Pemerintah Wajib dan Urusan Pemerintah Pilihan. Dalam hal tersebut Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana di maksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi dua kewenangan yaitu :

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Adapun DPPKBP3A Tugas dan Fungsi dari **Kewenangan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** Berdasarkan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi :

SUB URUSAN	KEWENANGAN	
	PUSAT	DAERAH
Kualitas Hidup Perempuan	Pelebagaan PUG	Pelebagaan PUG
	Pemberdayaan perempuan	Pemberdayaan Perempuan
	Standarisasi lembaga	Penguatan dan pengembangan lembaga
Perlindungan Perempuan	Pencegahan	Pencegahan
	Penyediaan Layanan (Rujukan akhir)	Penyediaan layanan
	Standarisasi lembaga	Penguatan dan pengembangan lembaga
Kualitas Keluarga	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas
	Penguatan dan pengembangan lembaga	Penguatan dan pengembangan lembaga
	Standarisasi Lembaga	Standarisasi Lembaga
Sistem Data Gender & Anak	Penetapan sistem data gender dan anak	Penyediaan data gender dan anak
	Penyediaan data	Penyediaan data

Pemenuhan Hak	Pelembagaan PHA	Pelembagaan PHA
Anak	Penguatan dan pengembangan lembaga	Penguatan dan pengembangan lembaga
Perlindungan	Pencegahan	Pencegahan
Khusus Anak	Penyediaan layanan	Penyediaan layanan
	Penguatan dan pengembangan lembaga	Penguatan dan pengembangan lembaga

Untuk Kewenangan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Undang – undang nomor 23 Tahun 2014 yang meliputi 3 Tantangan penggaran program KKBPK sebagai berikut :

1. Bidang Pengendalian Penduduk
 - Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk
 - Ledakan penduduk usia kerja muda
 - Kualitas penduduk
 - Persebaran penduduk tidak merata
 - Jumlah penduduk usia lanjut meningkat
 - Masih belum terakomodirnya isu kependudukan dalam RPJMD
2. Bidang Keluarga Berencana
 - Kesertaan ber-KB masih rendah
 - Unmêet Need tinggi
 - MKJP rendah
 - DO tinggi
3. Bidang Keluarga Sejahtera
 - Kesejahteraan keluarga belum merata
 - Pendewasaan usia perkawinan masih rendah
 - Permasalahan reproduksi di kalangan remaja masih tinggi

Berdasarkan Kewenangan tersebut DPPKBP3A berupaya untuk membuat perencanaan program kegiatan tahun 2019 dan melaksanakan kewenangan tersebut yang berpedoman pada akuntabilitas kinerja Dinas sebagai upaya menilai tingkat keberhasilan lembaga dalam pelaksanaan kegiatan sehingga ukuran keberhasilan lembaga akan terlihat jelas dalam bentuk pengukuran yang lebih bersifat kuantitatif. Adapun Program dan alokasi dana tahun 2019 sebesar Rp. 9.500.031.500,- dengan rincian Prorgam sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar	Rp.	1.644.543.500,-
2. Program Peningkatan Saprasi Aparatur sebesar	Rp.	157.000.000,-
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar	Rp.	67.300.000,-
4. Program Keluarga Berencana sebesar	Rp.	4.677.942.000,-
5. Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rp.	233.956.000,-
6. Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak sebesar	Rp.	1.835.555.000,-
7. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan sebesar	Rp.	566.502.000,-
8. Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebesar	Rp.	317.233.000,-

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Program dan Anggaran Tahun 2019 menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, integrative dan special dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan prinsip *maney follows program*. Adapun pendekatan yang dimaksud adalah :

Holistik artinya seluruh perencanaan program dan anggaran di harapkan mampu memobilisasi seluruh potensi dan daya untuk mencapai target sasaran pokok pembangunan sub bidang Pengendalian Penduduk dan KB serta Sub Bidang Pengendalian Penduduk dan perlindungan Anak.

Integratif artinya seluruh perencanaan program dan anggaran mengembangkan keterpaduan dan sinergi program KKBPK bersama lintas sectoral, pemangku kepentingan maupun mitra kerja di seluruh tingkatan dan sinergi program PPPA bersama lintas sectoral .

Tematik artinya seluruh perencanaan program dan anggaran harus dapat mendukung pencapaian tujuan program KKBPK dan PPPA.

Spasial artinya seluruh perencanaan program anggaran harus focus pada wilayah penganggaran program KKBPK dan PPA di Kabupaten Berau.

Adapun arah kebijakan strategi Program KKBPK DPPKBP3A sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2019, telah di tetapkan arah kebijakan pembangunann di Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melalui :

1. Penguatan Pelayanan KB dan Kespro yang merata dan berkualitas
2. Penguatan advokasi kepada pembuat kebijakan melalui media audiensi, serta menguatkan KIE khususnya kepada PUS.
3. Penguatan pembinaan KRR dalam rangka pendewasaan usia perkawinan dan penyiapan kehidupan berkeluarga.
4. Penguatan dan peran dan fungsi keluarga.
5. Penguatan kelembagaan KKB yang efektif.

Dan untuk arah kewenangan urusan PPPA dalam UU 23 Tahun 2014 memiliki sub urusan antara lain :

1. Kualitas hidup perempuan
2. Perlindungan perempuan
3. Kualitas keluarga
4. Sistem data gender dan anak
5. Pemenuhan Hak Anak
6. Perlindungan Khusus Anak.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Berau, maka perlu di atur kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Berau. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan melalui tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau sebagai berikut:

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak dengan memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan Dinas serta mengadakan hubungan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah lainnya.

KEPALA DINAS

Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, mempunyai rincian tugas:

1. Merencanakan pembangunan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang sejalan dengan rencana dan strategi pembangunan Daerah.
2. Menggerakkan organisasi Dinas sesuai dengan rencana dan strategi pembangunan yang telah disusun untuk tercapainya tujuan
3. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan program yang menjadi tanggung jawab Dinas

4. Merumuskan kebijakan Teknis pembangunan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat di gunakan sebagai dasar dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan.
5. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujudnya kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Dinas dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
6. Mempelajari Peraturan Perundang-Undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Dinas melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja.
7. Memeriksa, mengecek, mengoreksi dan mengontrol serta mengesahkan hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
8. Mengkaji, meneliti dan mengevaluasi program kerja Dinas berdasarkan realisasi pelaksanaan program untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan dalam rangka merancang program lanjutan serta penyusunan laporan kinerja.
9. Melaksanakan pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis Dinas yang berada pada lingkup Dinas.
10. Mengawasi pelaksanaan tugas dan kegiatan setiap satuan organisasi serta berjenjang agar pelaksanaan tugas Dinas dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.
11. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.
12. Menyampaikan laporan kepada Bupati berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan yang meliputi administrasi penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan aset

untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan Dinas dengan memberikan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi Dinas. Sekretaris dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, mempunyai rincian tugas :

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Sekretariat berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
2. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas sekretariat dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
3. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kepala Sub Bagian agar pekerjaan sekretariat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Mempelajari Peraturan Perundang-Undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sekretariat melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja.
5. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas lingkup sekretariat dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan.
6. Mengkoordinasikan pelayanan teknis administrasi baik intern Badan maupun unit kerja lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan dan bimbingan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan Badan guna tertib administrasi.
8. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengelolaan surat-menyurat, perlengkapan rumah tangga, inventaris, humas dan protokol serta urusan umum.
9. Mengkoordinir penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, SOP serta dokumen pelayanan publik agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
10. Mengevaluasi dan menilai kinerja/ prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian.

11. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sekretariat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah.
12. Melaporkan kegiatan sekretariat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.
14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi penyusunan program pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mengidentifikasi permasalahan, pengumpulan data, mengevaluasi dan memonitor kegiatan dan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Dinas . Sub Bagian Penyusunan Program dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, mempunyai rincian tugas:

1. Menyusun rencana kerja Sub Bagian penyusunan Program berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
2. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas sub bagian penyusunan program dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
3. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bagian Penyusunan Program dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Mempelajari Peraturan Perundang-Undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja.

5. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Penyusunan Program dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan.
6. Mengawasi dan memantau proses pengumpulan dan pengolahan data usulan program masing-masing unit kerja sebagai bahan penyusunan program.
7. Mempelajari dan mengalisa setiap usulan program sebagai bahan penyusunan dan pengembangan program dan kegiatan masing-masing unit kerja.
8. Mempelajari dan mengalisasi tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program sesuai dengan kebijakan strategis jangka pendek, menengah dan panjang.
9. Menyusun konsep telaahan tentang prioritas program dan anggaran sesuai isu-isu sentral dan lokal sebagai bahan pengambilan keputusan.
10. Memberikan dukungan perumusan konsep program dan kegiatan serta rencana strategis Badan agar penyusunan program kerja berjalan dengan baik dan tepat waktu.
11. Membimbing dan mengarahkan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, SOP serta dokumen pelayanan publik Badan agar Penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
12. Menyiapkan bahan sosialisasi dan koordinasi hasil rumusan penyusunan program kepada masing-masing unit kerja untuk dijadikan sebagai rencana kerja.
13. Mengevaluasi dan menilai kinerja/ prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian.
14. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah.
15. Melaporkan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
16. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/ tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan

maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.

17. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan ketatausahaan Dinas. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, mempunyai rincian tugas:

1. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
2. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas sub bagian umum dan kepegawaian dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
3. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Mempelajari Peraturan Perundang-Undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja.
5. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan.
6. Mengatur dan Mengawasi petugas kebersihan dan keamanan agar selalu tercipta suasana aman, bersih dan tertib.
7. Mengatur kegiatan ketatalaksanaan yang meliputi surat menyurat, penggandaan dan pengelolaan kearsipan sesuai dengan petunjuk teknis administrasi perkantoran.
8. Mengontrol proses administrasi perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

9. Mengoordinasikan persiapan pelaksanaan kegiatan rapat / pertemuan – pertemuan yang meliputi administrasi rapat, konsumsi, ruang rapat, bahan – bahan/materi rapat sehingga kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
10. Mengatur pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), kenaikan pangkat, gaji berkala, penjurangan/diklat, karpek, taspen, karis/karsu, cuti dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kepegawaian..
11. Memproses administrasi urusan kesejahteraan dan kesehatan pegawai menurut ketentuan yang berlaku.
12. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang di serahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian.
13. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sub Bagian umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana dan realisasi untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang di hadapi, serta pemecahan masalah.
14. Melaporkan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
15. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah – langkah / tindakan yang perlu di ambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan dan aset Dinas. Sub Bagian Keuangan dan aset mempunyai rincian tugas:

1. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

2. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas sub bagian keuangan dan Aset dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
3. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bagian Keuangan dan Aset dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Mempelajari Peraturan Perundang-Undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja.
5. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Keuangan dan Aset dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan.
6. Meneliti dan memverifikasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan mencocokkannya pada tanda bukti penerimaan dan pengeluaran untuk menghindari kekeliruan dan pengelolaan keuangan.
7. Mengevaluasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan membandingkan target/ plafon untuk mengetahui penyerapan anggaran lingkungan Dinas.
8. Membimbing dan mengawasi pelaksanaan pembukuan satuan pemegang kas agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan Dinas.
9. Menyusun instrumen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Membina dan mengawasi pelaksanaan pembukaan dan administrasi barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang dan perlengkapan lainnya berdasarkan masukan dari satuan organisasi di lingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
12. Mengatur pengelolaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan perlengkapan lainnya terhadap satuan organisasi di lingkungan Dinas agar penggunaannya efektif dan efisien..
13. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk meningkatkan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian.

14. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang di hadapi, serta pemecahan masalah
15. Melaporkan kegiatan Su bagian Keuangan dan Aset berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
16. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah - langkah/tindakan yang perlu di ambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.
17. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebgai tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan yang meliputi advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan petugas dan kader keluarga berencana serta pengendalian penduduk dan informasi keluarga.

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PERGERAKAN

mempunyai rincian tugas:

1. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
2. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik kepada bawahannya dan tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan dapat di laksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.
3. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan dapat di laksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.
4. Mempelajari peraturan perundang - undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan melalui informasi dan

sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja.

5. Mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan dan pergerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
6. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, system informs keluarga, penyuluhan advokasi dan pergerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
7. Membina pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kreteria di bidang pengendalian penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
8. Mengarahkan pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kualitas penduduk.
9. Mengoordinasikan pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di kabupaten.
10. Mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
11. Mengarahkan pelaksanaan pendayaangunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Petugas Keluarga Berencana (PKB) dan kader keluarga Berencana (KB)
12. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, system informasi keluaraga, penyuluhan, Advokasi dan pergerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
13. Mengarahkan pemberiaan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan dan pergerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
14. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan pergerakan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang di hadapi, serta pemecahan masalah.
15. Melaporkan kegiatan bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan kepada kepala Dinas berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

16. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah – langkah/ tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut.
17. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

SEKSI ADVOKASI DAN PERGERAKAN mempunyai rincian tugas:

1. Menyusun rencana kerja Seksi Advokasi dan Pergerakan berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
2. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas seksi advokasi dan pergerakan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
3. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan seksi advokasi dan pergerakan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Mempelajari peraturan dan perundang – undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan – bahan lain yang berhubungan dengan tugas seksi advokasi dan pergerakan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja.
5. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan seksi advokasi dan pergerakan dengan berpedoman kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku agar dapat di pergunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan.
6. Merumuskan kebijakan daerah dalam rangka advokasi dan pergerakan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan.
7. Membimbing penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan pergerakan.
8. Mengontrol persiapan pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/PLKB.

9. Menyelenggarakan advokasi dan pergerakan terhadap peran serta masyarakat di tingkat Kabupaten.
10. Membimbing pembuatan dan pengembangan system informasi advokasi dan pergerakan berbasis data sasaran.
11. Mengevaluasi dan menilai kinerja / prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang di serahkan untuk meningkatkan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian.
12. Menevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Advokasi dan Pergerakan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang di hadapi, serta pemecahan masalah.
13. Melaporkan kegiatan seksi Advokasi dan Pergerakan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
14. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah – langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK DAN INFORMASI KELUARGA mempunyai rincian tugas:

1. Menyusun rencana kerja Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
2. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
3. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Mempelajari peraturan dan perundang – undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi

Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja.

5. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku agar dapat di gunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan.
6. Merumuskan kebijakan daerah dalam rangka pengendalian penduduk dan Informasi Keluarga.
7. Mengontrol pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
8. Membimbing penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan Informasi Keluarga.
9. Mengontrol penyiapan pelaksanaan pengendalian penduduk dan informasi keluarag dengan koordinasi lintas sector dan lintas program.
10. Membimbing pengembangan sistem informasi pengendalian penduduk dan keluarag dalam suatu data base keluarga.
11. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian.
12. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk dan informasi Keluarga berdasarkan perencanaan program dan permasalahan yang di hadapi, serta pemecahan masalahnya.
13. Melaporkan kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
14. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah – langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA mempunyai rincian tugas:

1. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Keluarga Berencana berdasarkan Renstra , data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
2. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Keluarga Berencana dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
3. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar kerjaan Bidang keluarga Berencana dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.
4. Mempelajari peraturan perundang – undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Keluarga Berencana melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja.
5. Mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis daaerah di bidang keluarga berencana.
6. Mengarahkan penyelenggaran norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana.
7. Mengarahkan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi di daerah.
8. Mengoordinasikan pelayanan keluarga berencana di daerah.
9. Mengarahkan pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB (Keluarga Berencana) di daerah.
10. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana.
11. Mengarahkan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana.
12. Mengevaluasi dan menilai kinerja / prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian.
13. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Keluarga Berencana berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang di hadapi, serta pemecahan masalah.

14. Melaporkan kegiatan Bidang Keluarga Berencana kepada Dinas berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
15. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah - langkah / tindakan yang perlu di ambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

SEKSI DISTRIBUSI ALAT DAN KONTRASEPSI mempunyai rincian tugas:

1. Menyusun rencana kerja Seksi Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi berdasarkan Renstra , data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
2. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
3. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.
4. Mempelajari peraturan perundang - undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan - bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja.
5. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi dengan berpedoman kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku agar dapat dipergunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan.
6. Mengontrol penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kreteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian Alokon di daerah.
7. Membimbing pemberian layanan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi.
8. Membimbing perencanaan sarana prasarana penyimpanan dan kebutuhan Alokon.

9. Mengontrol pencatatan penerimaan dan pendistribusian Alokon.
10. Melakukan pemantauan dan evaluasi dibidang pengendalian dan pendistribusian Alokon.
11. Mengevaluasi dan menilai kinerja / prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian.
12. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkatpencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah.
13. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah - langkah / tindakan yang perlu di ambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.
14. Melaksnakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

SEKSI JAMINAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA mempunyai rincian tugas:

1. Menyusun rencana kerja Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana berdasarkan Renstra , data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
2. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
3. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dapat di laksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.
4. Mempelajari peraturan perundang - undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan - bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja.
5. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dengan berpedoman kepada peraturan perundang -

undangan yang berlaku agar dapat dipergunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan.

6. Mengontrol penyiapan pelaksanaan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi di bidang pelayanan keluarga berencana (KB)
7. Mengontrol penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber - KB.
8. Mengontrol pelaksanaan jaminan pelayanan KB bagi akseptor KB yang mengalami kegagalan maupun efek samping penggunaan Alokon .
9. Mengontrol pembuatan laporan adanya kegagalan KB maupun efek samping Alokon sesuai dengan prosedur yang sudah ada.
10. Melakukan koordinasi lintas program dan lintas sector dalam penanganan pemberian jaminan layanan keluarga berencana.
11. Mengevaluasi dan menilai kinerja / prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian.
12. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang di hadapi, serta pemecahan masalah.
13. Melaporkan kegiatan Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
14. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah - langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

SEKSI PEMBINAAN KESERTAAN KELUARGA BERENCANA mempunyai rincian tugas:

1. Menyusun rencana kerja Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana berdasarkan Renstra , data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

2. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
3. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana dapat di laksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.
4. Mempelajari peraturan perundang - undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan - bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja.
5. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana dengan berpedoman kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku agar dapat dipergunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan.
6. Mengontrol penyiapan pelaksanaan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan dan kesertaan ber - KB di daerah.
7. Mengontrol penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kreteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber - KB.
8. Membimbing pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber - KB .
9. Mengontrol pelaksanaan pengembangan kemitraan di bidang pelayanan dan pembinaan kesertaan KB.
10. Membimbing pemberian layanan system informasi pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan..
11. Mengevaluasi dan menilai kinerja / prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian.
12. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang di hadapi, serta pemecahan masalah.

13. Melaporkan kegiatan Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
14. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah - langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan atau tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

KEPALA BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA mempunyai rincian tugas:

1. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga berdasarkan Renstra , data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
2. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
3. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar kerjaan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.
4. Mempelajari peraturan perundang - undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan - bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja.
5. Merumuskan kebijakan teknis daerah di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga.
6. Mengarahkan penyelenggaran norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga.
7. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Balita (BKB)
8. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pembinaan ketahanan remaja (BKR)

9. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga lansia dan rentan (BKL)
10. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga.
11. Mengarahkan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
12. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang di hadapi, serta pemecahan masalah.
13. Melaporkan kegiatan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
14. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah – langkah / tindakan yang perlu di ambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut.
15. Melaksnakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

SEKSI PEMBERDAYAAN KELUARGA SEJAHTERA mempunyai rincian tugas:

1. Menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera berdasarkan Renstra , data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
2. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
3. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar kerjaan Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.
4. Mempelajari peraturan perundang – undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja.

5. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan.
6. Mengontrol penyiapan pelaksanaan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera.
7. Mengontrol penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan keluarga sejahtera.
8. Membimbing pelaksanaan kebijakan teknis Daerah dalam rangka pemberdayaan keluarga sejahtera di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
9. Mengontrol pemberian bimbingan dan pembinaan dalam rangka pemberdayaan keluarga sejahtera.
10. Membimbing pelaksanaan pembangunan sistem informasi dan data dalam rangka kegiatan pemberdayaan keluarga sejahtera.
11. Mengevaluasi dan menilai kinerja / prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian.
12. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah.
13. Melaporkan kegiatan Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
14. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah – langkah / tindakann yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

SEKSI BINA KETAHANAN KELUARGA mempunyai rincian tugas:

1. Menyusun rencana kerja Seksi Bina Ketahan Keluarga berdasarkan Renstra , data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
2. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Bina Ketahan Keluarga dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
3. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar kerjaan Seksi Bina Ketahan Keluarga dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.
4. Mempelajari peraturan perundang - undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan - bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Bina Ketahan Keluarga melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja.
5. Merumusan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Bina Ketahan Keluarga dengan berpedoman pada peraturan perundang - undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan.
6. Mengontrol penyiapan pelaksanaan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi di pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia.
7. Mengontrol penyiapan pelaksanaan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia.
8. Membimbing pelaksanaan kebijakan Daerah dalam pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia.
9. Membimbing pelaksanaan pembangunan sistem informasi dan data dalam rangka kegiatan pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia.
10. Mengevaluasi dan menilai kinerja / prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian.
11. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia berdasarkan rencanaa dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah.

12. Melaporkan kegiatan Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
13. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah – langkah / tindakann yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

SEKSI BINA KETAHANAN REMAJA mempunyai rincian tugas:

1. Menyusun rencana kerja Seksi Bina Ketahan Remaja berdasarkan Renstra , data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
2. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Bina Ketahan Remaja dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
3. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar kerjaan Seksi Bina Ketahan Remaja dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.
4. Mempelajari peraturan perundang – undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Bina Ketahanan Remaja melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja.
5. Merumusan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Bina Ketahan Remaja dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan.
6. Mengontrol penyiapan pelaksanaan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan ketahanan remaja.
7. Mengontrol penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, astandar, prosudur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan remaja.
8. Membimbing pelaksanaan kebijakan Daerah dalam rangka memperkuat ketahanan remaja.

9. Mengontrol pelaksanaan pembinaan, pembimbingan, pemantauan dan evaluasi ketahanan remaja.
10. Membimbing pembangunan sistem informasi berbasis data kegiatan peningkatan ketahanan remaja.
11. Mengevaluasi dan menilai kinerja / prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian.
12. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Bina Ketahanan remaja berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah.
13. Melaporkan kegiatan Seksi Bina Ketahanan remaja berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
14. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah – langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN mempunyai rincian tugas:

1. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan berdasarkan Renstra , data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
2. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
3. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar kerjaan Bidang Pemberdayaan Perempuan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.
4. Mempelajari peraturan perundang – undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja.

5. Mengarahkan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang pemberdayaan perempuan.
6. Mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi perempuan di daerah.
7. Mengarahkan pelaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan di daerah
8. Membina pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan perempuan.
9. Mengarahkan pelaksanaan pembinaan organisasi perempuan di daerah.
10. Mengoordinasikan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pemberdayaan perempuan.
11. Mengevaluasi dan menilai kinerja / prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang di serahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian.
12. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang di hadapi, serta pemecahan masalah.
13. Melaporkan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan Kepala Dinas berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
14. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah – langkah / tindakan yang perlu di ambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut.
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN mempunyai rincian tugas:

1. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Seksi Kualitas Hidup Perempuan berdasarkan Renstra , data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
2. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Kualitas Hidup Perempuan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.

3. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar kerjaan Seksi Kualitas Hidup Perempuan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.
4. Mempelajari peraturan perundang – undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Kualitas Hidup Perempuan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja.
5. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Kualitas Hidup Perempuan dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan.
6. Mengontrol penyiapan pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup perempuan di daerah.
7. Membimbing pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan hak azasi manusia, politik, lingkungan dan social budaya.
8. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan kuaalitas hidup perempuan dalam bidang : pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan hak azasi manusia, politik, lingkungan serta social budaya.
9. Membimbing penyelenggaraan sistem informasi berbasis data tentang kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan dilintas program maupun lintas sector terkait.
10. Mengevaluasi dan menilai kinerja / prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang di serahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian.
11. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Kualitas Hidup Perempuan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang di hadapi, serta pemecahan masalah.
12. Melaporkan kegiatan Seksi Kualitas Hidup Perempuan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
13. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah – langkah / tindakan yang perlu di ambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut.

14. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

SEKSI PERAN SERTA DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER mempunyai rincian tugas:

1. Menyusunan rencana kerja Seksi Peran Serta dan Pengarusutamaan Gender berdasarkan Renstra , data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
2. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Peran Serta dan Pengarusutamaan Gender dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
3. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar kerjaan Seksi Peran Serta dan Pengarusutamaan Gender dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.
4. Mempelajari peraturan perundang – undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Peran Serta dan Pengarusutamaan Gender melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja.
5. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Peran Serta dan Pengarusutamaan Gender dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan.
6. Merumuskan kebijakan teknis Daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta dan pengarusutamaan gender di bidang pemberdayaan perempuan.
7. Membimbing pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan peran serta pengarusutamaan Gender di daerah.
8. Melaksanakan koordinasi , fasilitasi dan mediasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah.
9. Mengontrol pelaksanaan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, Pusat Studi Wanita (PSW), lembaga penelitian dan pengembangan dan lembaga non pemerintah.
10. Mengontrol pembuatan data tentang kegiatan pengarusutamaan Gender di daerah.

11. Mengevaluasi dan menilai kinerja / prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian.
12. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Peran Serta dan Pengarusutamaan Gender berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang di hadapi, serta pemecahan masalah.
13. Melaporkan kegiatan Seksi Peran Serta dan Pengarusutamaan Gender berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
14. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah – langkah / tindakan yang perlu di ambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut.
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

SEKSI BINA ORGANISASI PEREMPUAN mempunyai rincian tugas:

1. Menyusunan rencana kerja Seksi Bina Organisasi Perempuan berdasarkan Renstra , data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
2. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Bina Organisasi Perempuan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
3. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar kerjaan Seksi Bina Organisasi Perempuan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.
4. Mempelajari peraturan perundang – undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Bina Organisasi Perempuan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja.
5. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Bina Organisasi Perempuan dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan.

6. Merumuskan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan pembinaan organisasi perempuan di Daerah.
7. Mengontrol pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan pembinaan organisasi perempuan.
8. Mengontrol pelaksanaan pendataan organisasi perempuan di Daerah.
9. Membimbing pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi perempuan.
10. Melakukan koordinasi lintas program maupun lintas sektor dalam kegiatan pembinaan organisasi perempuan.
11. Mengevaluasi dan menilai kinerja / prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian.
12. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Bina Organisasi Perempuan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang di hadapi, serta pemecahan masalah.
13. Melaporkan kegiatan Bina Organisasi Perempuan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
14. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah – langkah / tindakan yang perlu di ambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut.
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK mempunyai rincian tugas:

1. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan Renstra , data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
2. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
3. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar kerjaan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.

4. Mempelajari peraturan perundang – undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan dan keterampilan kerja.
5. Mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak.
6. Menyusun draf kebijakan daerah dalam upaya perlindungan perempuan dan anak berdasarkan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi dan karakteristik daerah.
7. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga / institusi pemerintah baik vertikal maupun otonomi, dunia usaha, organisasi wanita, Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli terhadap permasalahan perempuan dan anak dalam rangka pencegahan, penanganan dan pemberdayaan perempuan dan anak dari tindak kekerasan .
8. Memberikan konseling lanjutan baik secara langsung maupun melalui media kepada keluarga atau masyarakat berdasarkan laporan dari manager kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk penyelesaian final terhadap permasalahan perempuan dan anak.
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada relawan dan petugas administrasi di lembaga P2TP2A, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan Forum Anak Daerah dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
10. Menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan pelatihan dan pendidikan kepada petugas penanganan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di satuan kerja terkait bekerjasama dengan dunia usaha maupun Pemerintah Pusat guna peningkatan kapasitas pelayanan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
11. Melakukan Home visit kepada korban tindak kekerasan untuk memberikan motivasi awal dan penguatan agar korban kuat dalam menghadapi permasalahan yang dialami.
12. Menyusun rencana aksi daerah pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rangka pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

13. Membina organisasi forum anak daerah dalam upaya pengalihan bakat, potensi dan minat anak daerah agar penyalurannya tepat.
14. Melakukan inovasi - inovasi dalam rangka pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disesuaikan dengan budaya setempat dan terbaik bagi anak.
15. Melaksanakan rapat evaluasi gelas kasus berdasarkan data dari P2TP2A sebagai bahan penetapan kebijakan selanjutnya dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
16. Melaksanakan sosialisasi perundang - undangan perlindungan perempuan dan anak keseluruh lapisan masyarakat baik berdasarkan undangan maupun yang telah diprogramkan guna pencegahan dan memberikan penyadaran kemasyarakat bagaimana mekanisme penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
17. Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi baik dengan instansi Pemerintah maupun dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka upaya mewujudkan daerah sebagai kabupaten layak anak.
18. Menevaluasi dan menilai kinerja / prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang di serahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian.
19. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang di hadapi, serta pemecahan masalah.
20. Melaaporkan kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
21. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah - langkah / tindakan yang perlu di ambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut.
22. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN mempunyai rincian tugas:

1. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Seksi Perlindungan Perempuan berdasarkan Renstra , data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
2. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Perlindungan Perempuan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
3. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar kerjaan Seksi Perlindungan Perempuan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.
4. Mempelajari peraturan perundang – undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Perlindungan Perempuan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan dan keterampilan kerja.
5. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Perlindungan Perempuan dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku agar dapat dipergunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan.
6. Membuat pemetaan kelurahan dan kampung yang rawan terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan bekerjasama dengan polsek – polsek dan kecamatan – kecamatan.
7. Membimbing pembuatan data terpilah perempuan berdasarkan laporan dari kecamatan – kecamatan sebagai bahan penetapan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan.
8. Menyusun program pemberdayaan terhadap perempuan korban tindak kekerasan agar mandiri baik secara ekonomi maupun dalam melaksanakan pembinaan keluarga.
9. Mengontrol penyusunan data perempuan lansia dan yang menjadi kepala keluarga, sebagai bahan perumusan kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan satuan kerja terkait.
10. Membuat bahan – bahan dan materi kampanye dan sosialisasi tentang stop tindak kekerasan terhadap perempuan untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat khususnya pelaku tindak kekerasan.

11. Mempersiapkan materi dan sarana prasarana serta nara sumber untuk kegiatan pelatihan, seminar, sosialisasi dan kampanye tindak kekerasan terhadap perempuan.
12. Mengevaluasi dan menilai kinerja / prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian.
13. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah.
14. Melaporkan kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
15. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah - langkah / tindakan yang diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil keputusan.
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

SEKSI PERLINDUNGAN ANAK mempunyai rincian tugas:

1. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Seksi Perlindungan Anak berdasarkan Renstra , data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
2. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Perlindungan Anak dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
3. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar kerjaan Seksi Perlindungan Anak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.
4. Mempelajari peraturan perundang - undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan - bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Perlindungan Anak melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan dan keterampilan kerja.

5. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Perlindungan Anak dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku agar dapat dipergunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan.
6. Membuat pemetaan sekolah, kelurahan dan kampung yang rawan terjadi tindak kekerasan terhadap anak bekerjasama dengan organisasi perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan atau sekolah – sekolah, polsek – polsek dan kecamatan – kecamatan.
7. Membimbing pembuatan data terpilah anak berdasarkan laporan dari kecamatan – kecamatan sebagai bahan penetapan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencegahan tindak kekerasan terhadap anak.
8. Menyusun program pemberdayaan terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH) baik korban maupun pelaku tindak kekerasan agar tidak mengalami trauma yang berkepanjangan.
9. Mengontrol penyusunan data anak yang bekerja dan menjadi tulaang punggung keluarga, sebagai bahan perumusan kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan satuan kerja terkait.
10. Membuat bahan – bahan dan materi kampanye dan sosialisasi tentang stop tindak kekerasan terhadap anak untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat khususnya pelaku tindak kekerasan.
11. Mempersiapkan materi dan sarana prasaraana serta nara sumber untuk kegiatan pelatihan, seminar, sosialisasi dan kampanye tindak kekerasan terhadap anak.
12. Melaksanakan monitoring dan evaluas PUSPAGA agar dalam pemberian laporan kepada masyarakat sesuai standar pelayanan.
13. Mengevaluasi dan menilai kinerja / prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian.
14. Melaporkan kegiatan Seksi Perlindungan Anak berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
15. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah – langkah / tindakan yang diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan amaupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

SEKSI TUMBUH KEMBANG ANAK mempunyai rincian tugas:

1. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Seksi Tumbuh Kembang Anak berdasarkan Renstra , data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
2. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Tumbuh Kembang Anak dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
3. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar kerjaan Seksi Tumbuh Kembang Anak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.
4. Mempelajari peraturan perundang – undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Tumbuh Kembang Anak melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan dan keterampilan kerja.
5. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Tumbuh Kembang Anak dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku agar dapat dipergunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan.
6. Mempersiapkan sarana prasarana dan materi serta nara sumber dan peserta sosialisasi tentang forum anak daerah agar pelaksanaan sosialisasi berjalan secara efisien dan efektif.
7. Mengontrol pelaksanaan pendataan organisasi anak yang ada di daerah sebagai bahan untuk menghimpun perwakilan dari masing – masing organisasi anak untuk di masukkan dalam forum anak daerah.
8. Mempersiapkan pelaksanaan peningkatan kapasitas pengurus forum anak daerah bekerjasama dengan internal dinas ataupun eksternal..
9. Menyusun program dan kegiatan peningkatan kapasitas forum anak daerah, agar pelaksanaan kegiatan benar – benar bermanfaat untuk anak di daerah.
10. Membimbing pengelolaan data potensi, bakat dan minat anak melalui forum anak daerah, sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah daerah dalam aspek tumbuh kembang anak.
11. Merumuskan kegiatan – kegiatan yang terbaik bagi anak untuk mengisi waktu lowong anak, agar anak tidak terpengaruh dengan dinamika perkembangan zaman.

12. Melakukan koordinasi dengan institusi baik pemerintah maupun swasta dalam memberikan penguatan bagi forum anak daerah.
13. Menyusun program dan kegiatan pembinaan sekolah dan puskesmas ramah anak di daerah.
14. Menginventarisir ruang publik atau taman – taman untuk dijadikan ruang bermain ramah anak dan taman ramah anak.
15. Mengevaluasi dan menilai kinerja / prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian.
16. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Tumbuh Kembang Anak berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang di hadapi, serta pemecahan masalah.
17. Melaporkan kegiatan Seksi Tumbuh Kembang Anak berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
18. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah – langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.
19. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1.4 Sumber Manusia

1. Kepegawaian

Sampai dengan 31 Desember 2019 Jumlah Pegawai Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau berjumlah 69 Orang, yang dari PNS Struktural 42 dan Fungsional PKB 16 orang, sedangkan Honorer sebanyak 11 orang. Untuk lebih jelasnya rincian pegawai dapat dilihat pada table - table di bawah ini :

Tabel. I.1
Komposisi jumlah PNS dan Non PNS Berdasar Jenis Kelamin

1. URAIAN	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
PNS	14	27	41
NON PNS	11	11	22
	25	38	63

Tabel. I.2

1. Komposisi jumlah PNS Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

JABATAN	GOLONGAN				PENDIDIKAN						KET
	IV	III	II	I	S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	
KEPALA DINAS	1				1						
SEKRETARIS/KAB ID	4	2				2	3	1			
KASUBID / KASUBBAG	1	17				1	12		5		
STAF		9	7			1	6	1	8		
JUMLAH	6	28	7		1	4	21	2	13		

Di lihat dari tabel 1.1 dan 1.2 menunjukkan bahwa tenaga kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Berau. Hal ini sudah di anggap baik bahwa sumber daya manusia yang ada di DPPKBP3A Kabupaten Berau umumnya sudah pada tingkat pendidikan sarjana. Namun jumlah pegawai khususnya tenaga staf masih sangat kurang dapat di lihat pada tabel diatas dan pada Struktur Organisasi DPPKBP3A ,tergambar bahwa Dinas terdiri dari lima Bidang dan satu Sekretariat yang mana setiap bidang membawahi tiga Seksi dan tiga Kasubag dengan jumlah keseluruhan pejabat eselon empat (IV.a) sebanyak delapan belas (18) orang dengan kebutuhan staf minimal 54 orang , staf yang ada 38 orang sehingga kekurangan staf sebanyak 16 orang.

2. Perlengkapan

Tabel I.3

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Tahun 2019

No	Kode Barang	Nama / Jenis Barang	Merk / type	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Kedaaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang	Harga Barang	Keterangan
1	02.03.01.01.003	Staion Wagon	Toyota / Avanza	Pembelian	2009	Baik	1	174,250,000.00	Kendaraan Dinas Sekretaris DPPKBP3A
2	02.03.01.01.004	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	Toyota / Innova	Pembelian	2015	Baik	1	247,090,000.00	Pembelian Mobil Dinas Dari Belanja Modal Rutin
3	02.03.01.01.005	Double Cabin	Toyota / Hilux Double Cabin	Hibah	2014	Baik	1	342,180,000.00	Barang Hibah Mobil Hilux dari DPPKK
4	02.03.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	TOYOTA RUSH / TOYOTA RUSH	Pembelian	2015	Baik	1	217,080,000.00	Pemakai Operasional DPPKBP3A/P2TP2A
5	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter Z CW FI	Pembelian	2012	Baik	1	16,000,000.00	Pemakai Retno Kustiah (Mutasi ke Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
6	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter Z CW FI	Pembelian	2012	Baik	1	16,000,000.00	Pemakai Yelly Suriani, BA
7	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter Z CW FI	Pembelian	2012	Baik	1	16,000,000.00	Pemakai Dra. Hj. Sri Wahyuni S., S.Sos. (Mutasi ke Bapenda)
8	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter Z CW FI	Pembelian	2012	Baik	1	16,000,000.00	Pemakai Dra. Hj. Mariusna
9	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter Z CW FI	Pembelian	2012	Baik	1	16,000,000.00	Pemakai Yusriansyah, SE.
10	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter Z CW FI	Pembelian	2012	Baik	1	16,000,000.00	1 buah motor dinas dari DPPKK
11	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter Z CW FI	Pembelian	2012	Baik	1	16,000,000.00	Pemakai Suwondo
12	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	Yamaha / New-Vixion	Pembelian	2012	Baik	1	22,731,000.00	Pemakai Fitriah Kumala, SE
13	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter Z CW FI	Pembelian	2013	Baik	1	16,639,500.00	db. Maulana pindah ke BKKBN
14	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter / Jupiter Z	Pembelian	2015	Kurang Baik	1	16,000,000.00	Pemakai Saniah
15	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z	Pembelian	2016	Baik	8	170,960,000.00	Belanja Modal Dana DAK
16	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	Yamaha / Vixion	Pembelian	2017	Baik	1	29,150,000.00	Belanja Modal Dari Dana Dak KB
17	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	Yamaha / Vixion	Pembelian	2017	Baik	1	29,150,000.00	Belanja Modal Dari Dana Dak KB
18	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	Yamaha / Vixion	Pembelian	2017	Baik	1	29,150,000.00	Belanja Modal Dari Dana Dak KB
19	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	Yamaha / Vixion	Pembelian	2017	Baik	1	29,150,000.00	Belanja Modal Dari Dana Dak KB
20	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	Yamaha / Vixion	Pembelian	2017	Baik	1	29,150,000.00	Belanja Modal Dari Dana Dak KB
21	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	Yamaha / Vixion	Pembelian	2017	Baik	1	29,150,000.00	Belanja Modal Dari Dana Dak KB
22	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	Yamaha / Vixion	Pembelian	2017	Baik	1	29,150,000.00	Belanja Modal Dari Dana Dak KB

No	Kode Barang	Nama / Jenis Barang	Merk / type	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Kondisi Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang	Harga Barang	Keterangan
23	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	Yamaha / Vixion	Pembelian	2017	Baik	1	29,150,000.00	Belanja Modal Dari Dana Dak KB
24	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	Honda / Scoopy	Pembelian	2019	Baik	2	34,890,000.00	Belanja pengadaan kendaraan roda 2 (dua) / Bag. Sungram (Nurjatiyah) Kabid P.P.A (Yayu)
25	02.06.01.01.003	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	Olympia	Pembelian	2009	Baik	2	4,600,000.00	dari belanja modal
26	02.06.01.01.003	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	olympia	Pembelian	2010	Baik	1	2,600,000.00	1 buah mesin tik manual dari belanja modal
27	02.06.01.01.003	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	Olympia / Carina 3	Pembelian	2013	Baik	2	5,700,000.00	1 buah mesin ketik dari belanja modal
28	02.06.01.01.007	Mesin Ketik Elektronik	Brother GX-8250	Pembelian	2015	Baik	5	28,500,000.00	Pembelian Mesin Ketik Brother Dari Belanja Modal Rutin
29	02.06.01.02.001	Mesin Hitung Manual	Citizen,2 Memory	Pembelian	2015	Baik	10	4,200,000.00	Pembelian Kalkulator Citizen Dari Belanja Modal Rutin
30	02.06.01.04.003	Rak Kayu	-	Pembelian	2019	Baik	1	1.210.000,00	Pengadaan rak kayu untuk arsip 1 unit diruang Balai Penyuluhan KB Kel. Karang Ambun
31	02.06.01.04.004	Filling Besi/Metal	Brother	Pembelian	2009	Baik	1	1,600,000.00	1 buah filling kabinet dari belanja modal
32	02.06.01.04.004	Filling Besi/Metal	Lion	Pembelian	2010	Baik	2	7,100,000.00	dari belanja modal
33	02.06.01.04.010	Peti Uang	OKIDA / DS 60 A	Pembelian	2009	Baik	1	7,850,000.00	1 buah brankas dari belanja modal
34	02.06.01.04.012	Lemari Kaca	-	Pembelian	2019	Baik	1	1.925.000,00	Lemari Rumah Aman
35	02.06.01.04.015	Lemari Arsip	-	Pembelian	2019	Baik	1	1.400.000,00	Pengadaan lemari arsip 1 unit diruang Balai Penyuluhan KB Kel. Karang Ambun
36	02.06.01.05.006	Papan Nama Instansi	Papan Nama P2TP2A	Pembelian	2016	Baik	13	25,350,000.00	Belanja Modal PA
37	02.06.01.05.006	Papan Nama Instansi	-	Pembelian	2018	Baik	4	6.000.000,00	Belanja Modal PPA Papan Plang
38	02.06.01.05.010	White Board	-	Pembelian	2009	Baik	1	2,800,000.00	1 paket white board dan papan nama kantor dari belanja modal
39	02.06.01.05.010	White Board	-	Pembelian	2010	Baik	2	1,800,000.00	dari belanja modal
40	02.06.01.05.010	White Board	-	Pembelian	2011	Baik	1	2,620,000.00	
41	02.06.01.05.028	Overhead Projektor	-	Pembelian	2009	Kurang Baik	1	10,000,000.00	1 paket infocus dan layar proyektor
42	02.06.01.05.028	Overhead Projektor	IN FOCUS	Pembelian	2016	Baik	1	8,000,000.00	Belanja Modal PP
43	02.06.01.05.040	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	Sahitel	Pembelian	2009	Baik	2	400,000.00	dari belanja modal
44	02.06.01.05.040	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	Panasonic / KX-FT983	Pembelian	2009	Baik	1	2,000,000.00	dari belanja modal
45	02.06.01.05.040	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	Tangga Aluminium	Pembelian	2014	Baik	1	1,045,000.00	1 unit tangga aluminium dari belanja modal
46	02.06.01.05.045	Neon Box	Neon Box	Pembelian	2016	Baik	1	4,925,000.00	Belanja Modal PA
47	02.06.02.01.001	Lemari Kayu	-	Pembelian	2013	Kurang Baik	1	3,000,000.00	1 buah lemari locker dari belanja modal
48	02.06.02.01.002	Rak Kayu	-	Pembelian	2012	Baik	1	4,000,000.00	dari belanja modal
49	02.06.02.01.010	Meja Rapat	-	Pembelian	2012	Baik	1	3,400,000.00	dari belanja modal
50	02.06.02.01.027	Kursi Rapat	Furtura	Pembelian	2015	Baik	48	33,360,000.00	Pengadaan Belanja Modal Kursi Hadap Furtura Dari Rutin
51	02.06.02.01.027	Kursi Rapat	Kursi Tandu	Pembelian	2016	Baik	40	27,000,000.00	Belanja Modal PA

No	Kode Barang	Nama / Jenis Barang	Merk / type	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Kondisi Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang	Harga Barang	Keterangan
52	02.06.02.01.010	Meja Rapat	Multiplex PHL	Pembelian	2018	Baik	4	9.196.000,00	Meja Rapat (BM DAK 2018) APBD I
53	02.06.02.01.010	Meja Rapat	-	Pembelian	2019	Baik	6	14.850.000,00	Pengadaan meja rapat 6 unit diruang Balai Penyuluhan KB Kel. Karang Ambun
54	02.06.02.01.028	Kursi Tamu	Kursi Tamu	Pembelian	2016	Baik	1	4.925.000,00	Belanja Modal PA
55	02.06.02.01.033	Bangku Tunggu	Invorta	Pembelian	2016	Baik	1	1.918.500,00	Belanja Modal PA
56	02.06.02.01.048	Meja Biro	-	Pembelian	2009	Baik	4	2.800.000,00	dari bag. perlengkapan setda berau
57	02.06.02.01.027	Kursi Rapat	-	Pembelian	2018	Baik	60	29.370.000,00	Kursi Rapat (BM DAK 2018) APBD I
58	02.06.02.01.027	Kursi Rapat	-	Pembelian	2019	Baik	50	35.750.000,00	Pengadaan kursi rapat 50 unit diruang Balai Penyuluhan KB Kel. Karang Ambun
59	02.06.02.01.034	Kursi Lipat	Cheers	Pembelian	2019	Baik	1	7.980.000,00	Belanja modal pengadaan kursi rileksasi di ruang UPTD P2TP2A
60	02.06.02.01.048	Meja Biro	-	Pembelian	2009	Baik	16	9.280.000,00	
61	02.06.02.01.049	Sofa	-	Pembelian	2012	Baik	1	10.000.000,00	1 Set Sofa dari belanja modal
62	02.06.02.01.066	Kursi Kerja	Kursi Kerja	Pembelian	2016	Baik	4	10.000.000,00	Belanja Modal PA
63	02.06.02.01.066	Kursi Kerja	-	Pembelian	2019	Baik	1	690.000,00	Belanja modal pengadaan kursi kerja di ruang UPTD P2TP2A
64	02.06.02.02.003	Jam Elektronik	sciko	Pembelian	2009	Baik	2	900.000,00	dari belanja modal
65	02.06.02.03.003	Mesin Potong Rumput	Katana GX-31	Pembelian	2016	Baik	1	6.525.500,00	Belanja Modal Rutin
66	02.06.02.04.001	Lemari Es	Sharp / SJ-SI707-RD	Pembelian	2013	Baik	1	1.980.000,00	1 buah kulkas dari belanja modal
67	02.06.02.04.001	Lemari Es	-	Pembelian	2019	Baik	1	1.900.000,00	
68	02.06.02.04.003	AC Unit	Panasonic	Pembelian	2012	Baik	1	6.400.000,00	dari belanja modal
69	02.06.02.04.003	AC Unit	Ac Astey	Pembelian	2016	Baik	2	9.930.000,00	
70	02.06.02.04.003	AC Unit	Panasonic / 3/4 PK	Pembelian	2018	Baik	2	10.000.000,00	Pengadaan Belanja Modal Rutin
71	02.06.02.04.003	AC Unit	Panasonic	Pembelian	2018	Baik	4	24.200.000,00	AC (BMD DAK 2018) APBD I
72	02.06.02.04.003	AC Unit	Panasonic / CS-LN9UKJ	Pembelian	2019	Baik	4	24.640.000,00	Pengadaan AC 4 Unit diruang Balai Penyuluhan KB Kel. Karang Ambun
73	02.06.02.04.004	AC Split	Panasonic / CS-KC9PKJ	Pembelian	2013	Baik	2	12.000.000,00	1 buah AC dari belanja modal
74	02.06.02.04.004	AC Split	Ac Portebel Samsung	Pembelian	2015	Baik	6	60.000.000,00	Pembelian AC Portebel Samsung Dari Belanja Modal Rutin
75	02.06.02.04.006	Kipas Angin	Kipas Angin Gantung	Pembelian	2015	Baik	2	1.800.000,00	Pembelian Kipas Angin Gantung Dari Belanja Modal Rutin
76	02.06.02.04.006	Kipas Angin	Kipas Angin Gantung	Pembelian	2015	Baik	4	3.600.000,00	Pembelian Kipas Angin Gantung Dari Belanja Modal Rutin
77	02.06.02.05.002	Kompor Gas	Rinai	Pembelian	2009	Baik	1	575.000,00	1 buah kompor gas dari belanja modal

No	Kode Barang	Nama / Jenis Barang	Merk/ type	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Kondisi Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang	Harga Barang	Keterangan
78	02.06.02.05.002	Kompur Gas	Kompur Gas	Pembelian	2016	Baik	1	3,650,000.00	Belanja Modal PA
79	02.06.02.05.009	Tabung Gas	-	Pembelian	2009	Baik	1	600,000.00	1 buah tabung gas dari belanja modal
80	02.06.02.05.014	Alat Dapur Lain-lain	-	Pembelian	2009	Baik	1	2,870,000.00	piring, gelas, sendok, cangkir, baki, ceret, sula, dari belanja modal
81	02.06.02.05.014	Alat Dapur Lain-lain	-	Pembelian	2013	Baik	1	2,500,000.00	1 buah rak piring dari belanja modal
82	02.06.02.05.017	Magic Jar	Magic Com	Pembelian	2016	Baik	1	875,000.00	Belanja Modal PA
83	02.06.02.06.003	Televisi	LG	Pembelian	2009	Kurang Baik	1	1,500,000.00	dari belanja modal
84	02.06.02.06.003	Televisi	Sharp / LCD LC 22L	Pembelian	2010	Baik	1	3,950,000.00	1 buah televisi dari belanja modal
85	02.06.02.06.003	Televisi	LG 29	Pembelian	2015	Baik	4	19,000,000.00	Pembelian Televisi LG Dari Belanja Modal Rutin
86	02.06.02.06.008	Sound System	BMB / Tife MN 11 5A	Pembelian	2018	Baik	1	14,000,000.00	Pengadaan Belanja Modal Rutin
87	02.06.02.06.012	Wireless	-	Pembelian	2009	Baik	1	7,900,000.00	1 buah wireles dari belanja modal
88	02.06.02.06.012	Wireless	Wairless Sound Queen	Pembelian	2015	Baik	13	59,800,000.00	Pengadaan Belanja Modal Wairless Sound Queen Dari Proyek (KB)
89	02.06.02.06.012	Wireless	Sound Queen	Pembelian	2015	Baik	1	4,600,000.00	Pengadaan Belanja Modal Wairless Sound Queen Dari Proyek (KB)
90	02.06.02.06.012	Wireless	Wireless	Pembelian	2016	Baik	1	5,000,000.00	Belanja Modal PA
91	02.06.02.06.018	Unit Power Supply	prolink	Pembelian	2009	Baik	2	2,400,000.00	dari belanja modal
92	02.06.02.06.018	Unit Power Supply	Flazer	Pembelian	2010	Baik	2	2,000,000.00	dari belanja modal
93	02.06.02.06.021	Camera Video	Canon / DSLR EF-S 18-15 IS Kit	Pembelian	2012	Baik	1	11,565,000.00	1 Buah Kamera Digital Canon dari belanja modal
94	02.06.02.06.021	Camera Video	Canon / EOS 60 D	Pembelian	2014	Baik	1	17,100,000.00	1 buah Camera Canon dari Belanja Modal
95	02.06.02.06.021	Camera Video	Sony Cybershot / DSC-H400	Pembelian	2014	Baik	1	6,900,000.00	1 buah camara sony cybershot dari belanja modal
96	02.06.02.06.039	Dispenser	polytron	Pembelian	2009	Baik	1	1,650,000.00	dari belanja modal
97	02.06.02.06.039	Dispenser	Uchida	Pembelian	2009	Baik	1	1,175,000.00	dari belanja modal
98	02.06.02.06.039	Dispenser	Polytron / PWC-107	Pembelian	2013	Baik	1	2,431,000.00	1 buah dispenser dari belanja modal
99	02.06.02.06.039	Dispenser	Uchida	Pembelian	2015	Baik	4	11,200,000.00	Pembelian Dispenser Dari Belanja Modal Rutin
100	02.06.02.06.039	Dispenser	-	Pembelian	2015	Baik	1	2,800,000.00	Pembelian Dispenser Dari Belanja Modal Rutin
101	02.06.02.06.039	Dispenser	Miyako	Pembelian	2016	Baik	1	2,476,000.00	Belanja Modal PA
102	02.06.02.06.049	Handy Cam	-	Pembelian	2009	Baik	1	6,900,000.00	1 buah handycam dari belanja modal
103	02.06.02.06.050	Alat Rumah Tangga Lain2	Cangkir	Pembelian	2016	Baik	1	558,000.00	Belanja Modal PA
104	02.06.02.06.050	Alat Rumah Tangga Lain2	Gelas Medium	Pembelian	2016	Baik	1	453,000.00	Belanja Modal PA
105	02.06.02.06.050	Alat Rumah Tangga Lain2	Teco	Pembelian	2016	Baik	1	290,000.00	Belanja Modal PA

No	Kode Barang	Nama / Jenis Barang	Merk/ type	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Kondisi Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang	Harga Barang	Keterangan
106	02.06.02.06.050	Alat Rumah Tangga Lain2	piring Makan	Pembelian	2016	Baik	1	330,000.00	Belanja Modal PA
107	02.06.02.06.050	Alat Rumah Tangga Lain2	sendok	Pembelian	2016	Baik	1	155,000.00	Belanja Modal PA
108	02.06.02.06.050	Alat Rumah Tangga Lain2	Sendok Sayur	Pembelian	2016	Baik	1	95,000.00	Belanja Modal PA
109	02.06.02.06.050	Alat Rumah Tangga Lain2	Panci	Pembelian	2016	Baik	1	157,000.00	Belanja Modal PA
110	02.06.02.06.050	Alat Rumah Tangga Lain2	Wajan	Pembelian	2016	Baik	1	285,000.00	Belanja Modal PA
111	02.06.02.06.050	Alat Rumah Tangga Lain2	Sutil	Pembelian	2016	Baik	1	67,000.00	Belanja Modal PA
112	02.06.02.06.050	Alat Rumah Tangga Lain2	Sendok Nasi	Pembelian	2016	Baik	1	95,000.00	Belanja Modal PA
113	02.06.02.06.050	Alat Rumah Tangga Lain2	Tutup Gelas	Pembelian	2016	Baik	1	180,000.00	Belanja Modal PA
114	02.06.02.06.050	Alat Rumah Tangga Lain2	Garpu	Pembelian	2016	Baik	1	155,000.00	Belanja Modal PA
115	02.06.02.06.050	Alat Rumah Tangga Lain2	Ceret	Pembelian	2016	Baik	1	350,000.00	Belanja Modal Pa
116	02.06.02.06.050	Alat Rumah Tangga Lain2	Pisau	Pembelian	2016	Baik	1	365,000.00	Belanja Modal PA
117	02.06.02.06.050	Alat Rumah Tangga Lain2	Talen	Pembelian	2016	Baik	1	175,000.00	Belanja Modal PA
118	02.06.02.06.050	Alat Rumah Tangga Lain2	Baki	Pembelian	2016	Baik	1	175,000.00	Belanja Modal PA
119	02.06.02.06.050	Alat Rumah Tangga Lain2	Baki Bulat	Pembelian	2016	Baik	1	165,000.00	Belanja Modal PA
120	02.06.02.06.052	Spring Bed	Spring Bed	Pembelian	2016	Baik	3	14,850,000.00	Belanja Modal PA
121	02.06.02.06.055	Keranjang Sampah	Tempat Sampah Tiga Warna	Pembelian	2015	Baik	6	15,000,000.00	Pembelian Tempat Sampah Tiga Warna Dari Belanja Modal Rutin
122	02.06.02.06.057	Stavol	Stavol	Pembelian	2015	Baik	16	8,800,000.00	Pembelian Stavol Dari Belanja Modal Rutin
123	02.06.03.01.005	Personal Komputer Lain-lain	Kingston	Pembelian	2009	Baik	14	2,100,000.00	dari belanja modal
124	02.06.03.01.005	Personal Komputer Lain-lain	SPC	Pembelian	2009	Baik	1	75,000.00	1 buah mouse dari belanja modal
125	02.06.03.01.005	Personal Komputer Lain-lain	Neo	Pembelian	2009	Baik	1	75,000.00	1 buah mouse dari belanja modal
126	02.06.03.01.005	Personal Komputer Lain-lain	kingston	Pembelian	2010	Baik	6	1,800,000.00	dari belanja modal
127	02.06.03.02.001	P.C Unit	-	Pembelian	2009	Baik	1	6,900,000.00	1 buah komputer dari belanja modal
128	02.06.03.02.001	P.C Unit	-	Pembelian	2009	Baik	2	17,000,000.00	dari bag. perlengkapan setda berau
129	02.06.03.02.001	P.C Unit	-	Pembelian	2010	Baik	1	7,225,000.00	1 buah komputer / PC dari belanja modal
130	02.06.03.02.001	P.C Unit	Lenovo Think / center e73	Pembelian	2014	Baik	1	21,375,000.00	1 unit computer PC Lenovo dari belanja modal
131	02.06.03.02.001	P.C Unit	Lenovo	Pembelian	2015	Baik	8	69,600,000.00	Pembelian P.C Unit Dari Belanja Modal Rutin
132	02.06.03.02.001	P.C Unit	Asus	Pembelian	2015	Baik	1	13,099,250.00	Pengadaan Belanja Modal PC. Asus Dari Proyek (KLA)
133	02.06.03.02.001	P.C Unit	Lenovo	Pembelian	2016	Baik	1	7,500,000.00	Belanja Modal PP
134	02.06.03.02.001	P.C Unit	Asus / V221-BA038D	Pembelian	2018	Baik	3	29,964,000.00	Pengadaan Belanja Modal DAK

No	Kode Barang	Nama / Jenis Barang	Merk / type	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Kondisi Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang	Harga Barang	Keterangan
135	02.06.03.02.001	P.C Unit	Lenovo / F0DJ00321D	Pembelian	2019	Baik	1	13.000.000,00	Pengadaan 1 Unit PC di ruang Balai Penyuluhan KB Kel. Karang Ambun
136	02.06.03.02.002	Lap Top	Thosiba / C 840	Pembelian	2012	Baik	1	9.900.000,00	dari belanja modal
137	02.06.03.02.002	Lap Top	Thosiba / C 840	Pembelian	2012	Baik	2	19.800.000,00	dari belanja modal
138	02.06.03.02.002	Lap Top	Thosiba / C 840	Pembelian	2012	Baik	2	19.800.000,00	dari belanja modal
139	02.06.03.02.002	Lap Top	Thosiba / C 840	Pembelian	2012	Baik	1	9.900.000,00	dari belanja modal
140	02.06.03.02.002	Lap Top	Thosiba / C 840	Pembelian	2012	Baik	1	9.900.000,00	dari belanja modal
141	02.06.03.02.002	Lap Top	Thosiba / C 840	Pembelian	2012	Baik	1	9.900.000,00	dari belanja modal
142	02.06.03.02.002	Lap Top	Thosiba / C 840	Pembelian	2012	Baik	1	9.900.000,00	dari belanja modal
143	02.06.03.02.002	Lap Top	Thosiba / C 840	Pembelian	2012	Baik	1	9.900.000,00	dari belanja modal
144	02.06.03.02.002	Lap Top	Thosiba / C 840	Pembelian	2012	Baik	1	9.900.000,00	dari belanja modal
145	02.06.03.02.002	Lap Top	Thosiba / C 840	Pembelian	2012	Baik	1	9.900.000,00	dari belanja modal
146	02.06.03.02.002	Lap Top	Thosiba / C 840	Pembelian	2012	Baik	1	9.900.000,00	dari belanja modal
147	02.06.03.02.002	Lap Top	Thosiba / C 840	Pembelian	2012	Baik	1	9.900.000,00	dari belanja modal
148	02.06.03.02.002	Lap Top	Thosiba / C 840	Pembelian	2012	Baik	1	9.900.000,00	dari belanja modal
149	02.06.03.02.002	Lap Top	Thosiba / C 840	Pembelian	2012	Baik	1	9.900.000,00	dari belanja modal
150	02.06.03.02.002	Lap Top	Thosiba / C 840	Pembelian	2012	Baik	1	9.900.000,00	dari belanja modal
151	02.06.03.02.002	Lap Top	Thosiba / C 840	Pembelian	2012	Baik	1	9.900.000,00	dari belanja modal
152	02.06.03.02.002	Lap Top	Thosiba / C 840	Pembelian	2012	Baik	1	9.900.000,00	dari belanja modal
153	02.06.03.02.002	Lap Top	Thosiba / C 840	Pembelian	2012	Baik	1	9.900.000,00	dari belanja modal
154	02.06.03.02.002	Lap Top	Asus / 450j	Pembelian	2014	Baik	1	13.625.000,00	1 buah laptop Asus dari belanja modal
155	02.06.03.02.002	Lap Top	Toshiba	Pembelian	2015	Baik	2	19.900.000,00	Pembelian Laptop Dari Belanja Modal Rutin
156	02.06.03.02.002	Lap Top	Asus	Pembelian	2015	Baik	4	39.600.000,00	Pembelian Laptop Dari Belanja Modal Rutin
157	02.06.03.02.002	Lap Top	Asus	Pembelian	2015	Baik	1	15.199.250,00	Pengadaan Belanja Modal Laptop Asus Dari Proyek (TOT)
158	02.06.03.02.002	Lap Top	Asus	Pembelian	2015	Baik	1	15.199.250,00	Pengadaan Belanja Modal Laptop Asus Dari Proyek (KLA)
159	02.06.03.02.002	Lap Top	Lenovo	Pembelian	2015	Baik	1	13.500.000,00	Pembelian Laptop Dari Belanja Modal Rutin
160	02.06.03.02.002	Lap Top	Asus	Pembelian	2016	Baik	1	11.299.000,00	Belanja Modal PA
161	02.06.03.02.002	Lap Top	Asus / A 442 UR	Pembelian	2018	Baik	2	22.990.000,00	Pengadaan Belanja Modal DAK
162	02.06.03.02.002	Lap Top	HP / 14s-CF0044tx	Pembelian	2018	Baik	1	13.500.000,00	Pengadaan Belanja Modal Rutin
163	02.06.03.02.002	Lap Top	HP Pavilion / X360 Convertable	Pembelian	2019	Baik	1	14.600.000,00	Belanja pengadaan Lap Top an. Nurjatiyah (Kasubbag Sungram)

No	Kode Barang	Nama / Jenis Barang	Merck/ type	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keduaa Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang	Harga Barang	Keterangan
164	02.06.03.02.002	Lap Top	HP Pavilion / X360 Convertable	Pembelian	2019	Baik	1	13.997.500,00	Pengadaan 1 Unit Laptop diruang Balai Penyuluhan KB Kel. Karang Ambun
165	02.06.03.02.003	Note Book	Thosiba	Pembelian	2009	Baik	1	16,100,000.00	dari belanja modal
166	02.06.03.02.003	Note Book	-	Pembelian	2009	Baik	1	16,100,000.00	dari belanja modal
167	02.06.03.02.003	Note Book	Hp	Pembelian	2010	Baik	2	22,600,000.00	dari belanja modal
168	02.06.03.02.003	Note Book	Toshiba	Pembelian	2011	Baik	2	15,800,000.00	1 buah note book dari belanja modal
169	02.06.03.02.003	Note Book	Acer / V-5 471	Pembelian	2012	Baik	1	8,800,000.00	
170	02.06.03.02.003	Note Book	Appel / Macbook Pro 3-inci	Pembelian	2014	Baik	1	15,000,000.00	1 unit Notebook Apple dari belanja modal
171	02.06.03.04.008	Printer	Printer HP 2520	Pembelian	2015	Baik	1	2,500,000.00	Pembelian Printer HP 2520hc Dari Belanja Modal Proyek KB
172	02.06.03.04.008	Printer	Epson	Pembelian	2015	Baik	8	28,000,000.00	Pembelian Printer Dari Belanja Modal Rutin
173	02.06.03.04.008	Printer	Printer HP 2520hc	Pembelian	2015	Baik	16	40,000,000.00	Pembelian Printer HP 2520hc Dari Belanja Modal Proyek KB
174	02.06.03.04.008	Printer	Epson	Pembelian	2016	Baik	1	3,885,000.00	Belanja Modal PA
175	02.06.03.05.003	Printer	Epson LQ-2180	Pembelian	2009	Baik	1	8,925,000.00	1 unit printer dari Bag. Perlengkapan Setda Berau
176	02.06.03.05.003	Printer	Epson / R230	Pembelian	2010	Baik	2	2,250,000.00	dari belanja modal
177	02.06.03.05.003	Printer	Pixma MX 366 / Copy Scan Fax	Pembelian	2011	Baik	1	3,560,000.00	1 buah printer dari belanja modal
178	02.06.03.05.003	Printer	Canon / MX 377	Pembelian	2013	Baik	1	1,950,000.00	1 buah Printer dari belanja modal
179	02.06.03.05.003	Printer	Canon / MP 287	Pembelian	2013	Baik	1	2,000,000.00	1 buah printer dari belanja modal
180	02.06.03.05.003	Printer	Canon / MP 237	Pembelian	2013	Baik	1	1,500,000.00	1 buah printer dari belanja modal
181	02.06.03.05.003	Printer	Epson / L120	Pembelian	2014	Baik	3	8,010,000.00	3 unit printer epson L120 dari belanja modal
182	02.06.03.05.003	Printer	epson / L210	Pembelian	2014	Baik	1	3,000,000.00	1 unit printer epson l210
183	02.06.03.05.003	Printer	Epson	Pembelian	2016	Baik	1	3,400,000.00	Belanja Modal PA
184	02.06.03.05.003	Printer	Canon PIXMA / G2000	Pembelian	2016	Baik	1	3,500,000.00	Belanja Modal PP
185	02.06.03.05.003	Printer	Epson / L 360	Pembelian	2018	Baik	3	9.570.000,00	Pengadaan Belanja Modal DAK
186	02.06.03.05.003	Printer	Epson / L 360	Pembelian	2018	Baik	4	12.800.000,00	Berlanja Modal Rutin DPPKBP3A
187	02.06.03.05.003	Printer	-	Pembelian	2019	Baik	3	9.450.000,00	
188	02.06.03.05.003	Printer	Epson / Printer Multifungsi Berwarna Inkjet/Epson L3110	Pembelian	2019	Baik	1	3.150.000,00	Belanja Modal Rutin
189	02.06.03.05.003	Printer	Epson / Printer Multifungsi Berwarna Inkjet/Epson L3110	Pembelian	2019	Baik	1	3.150.000,00	Belanja Modal Rutin

No	Kode Barang	Nama / Jenis Barang	Merk / type	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Kondisi Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang	Harga Barang	Keterangan
190	02.06.03.05.003	Printer	Epson / L3150	Pembelian	2019	Baik	1	3.800.000,00	Pengadaan 1 Unit Printer di ruang Balai Penyuluhan KB Kel. Karang Ambun
191	02.06.03.05.004	Scanner	Epson / Scanner Dokumen Warna/DS-360 W	Pembelian	2019	Baik	1	6.900.000,00	Belanja Modal Rutin
192	02.06.03.05.009	Keyboard	SPC	Pembelian	2009	Baik	1	150.000,00	1 buah keyboard dari belanja modal
193	02.06.03.05.012	Hardisk Eksternal	Thosiba / 1 TB	Pembelian	2013	Baik	1	1.500.000,00	1 buah hardisk dari belanja modal
194	02.06.04.01.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	DINO / MK-120S	Pembelian	2009	Baik	1	1.815.000,00	1 buah meja letter L Ess III dari Bag. Perlengkapan Setda Berau
195	02.06.04.01.009	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	-	Pembelian	2010	Baik	6	4.500.000,00	
196	02.06.04.01.009	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	-	Pembelian	2019	Baik	3	8.250.000,00	Pengadaan Meja Kerja Pejabat 3 Unit diruang Balai Penyuluhan KB Kel. Karang Ambun
197	02.06.04.01.010	Meja Kerja	Meja Kerja	Pembelian	2016	Baik	4	9.820.000,00	Belanja Modal PA
198	02.06.04.01.010	Meja Kerja	Multiplex PHL	Pembelian	2018	Baik	3	7.500.000,00	Meja Kerja (BM DAK 2018) APBD I
199	02.06.04.01.010	Meja Kerja	-	Pembelian	2019	Baik	1	690.000,00	Belanja modal pengadaan meja kerja di ruang UPTD P2TP2A
200	02.06.04.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	ISOL-005	Pembelian	2009	Baik	1	950.000,00	1 buah kursi kerja Ess. III dari Bag. Perlengkapan Setda Berau
201	02.06.04.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	ISOL-005	Pembelian	2009	Baik	4	3.800.000,00	dari bag. perlengkapan setda berau
202	02.06.04.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	-	Pembelian	2018	Baik	3	2.250.000,00	Kursi Kerja Non Struktural (BM DAK 2018) APBD I
203	02.06.04.03.009	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	-	Pembelian	2019	Baik	3	5.940.000,00	Pengadaan kursi kerja pejabat 3 unit di ruang Balai Penyuluhan KB Kel. Karang Ambun
204	02.06.04.04.007	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff	Olympic	Pembelian	2009	Baik	15	6.000.000,00	dari bag. perlengkapan setda berau
205	02.06.04.04.007	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff	chitoose	Pembelian	2010	Baik	6	4.290.000,00	dari belanja modal
206	02.06.04.06.005	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	-	Pembelian	2009	Baik	1	4.450.000,00	1 set meja kursi tamu terdiri dari 1 buah kursi panjang, 3 buah kursi tunggal dan 1 buah meja kayu
207	02.06.04.07.004	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III	-	Pembelian	2012	Baik	1	12.010.000,00	1 buah Almari Furniture dari belanja modal
208	02.06.04.07.006	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	-	Pembelian	2009	Baik	2	2.400.000,00	dari bag. perlengkapan setda berau
209	02.06.04.07.006	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	-	Pembelian	2009	Baik	4	4.995.000,00	dari belanja modal

02.06.04.07.006	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	-	Pembelian	2010	Baik	2	3,574,000.00	dari belanja modal
02.06.04.07.006	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	-	Pembelian	2013	Baik	2	4,000,000.00	1 buah lemari arsip dari belanja modal
02.06.04.07.006	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	-	Pembelian	2013	Baik	2	4,000,000.00	1 buah lemari arsip dari belanja modal
02.06.04.08.001	Lemari Arsip	Lemari Arsip	Pembelian	2016	Baik	2	4,300,000.00	Belanja Modal PA
02.07.01.01.003	Proyektor + Attachment	Sony / DX221	Pembelian	2018	Baik	1	9.500.000,00	Pengadaan Belanja Modal Rutin
02.07.01.01.003	Proyektor + Attachment	Epson / EB-X400	Pembelian	2018	Baik	2	14.850.000,00	Projector (BM DAK 2018) APBD I
02.07.01.01.020	Compact Disc. Player	Sharp	Pembelian	2009	Baik	1	1,000,000.00	dari belanja modal
02.07.01.02.069	Printer	Epson / L 565	Pembelian	2019	Baik	1	4.750.000,00	Belanja Pengadaan Printer Ruang Sunggam
02.07.02.01.012	Telephone Mobile	Advance	Pembelian	2017	Baik	14	28,000,000.00	Belanja Hand Phone
02.07.02.01.012	Telephone Mobile	Huawei T2 / Tablet Android	Pembelian	2017	Baik	20	44,700,000.00	Belanja Modal Dana DAK KB
03.11.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	10/PPK/DAK-F/V/2018	Pembelian	2018	Baik	1	530.593.000,00	Gedung Balai Penyuluh KB Kecamatan Sambeliung Kabupaten Berau
03.11.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	41/PHO/PPK/DAK-F/XII/2019	Pembelian	2019	Baik	1	630.017.000,00	Pekerjaan pembuatan gedung balai penyuluhan KB Fisik Rp. 572.327,000 + Perencanaan 35.200,000 + Pengawasan Rp. 22.490,000
03.11.01.14.001	Gedung Garasi/Pool Permanen	04/PPK/PRGK/XI/2018	Pembelian	2018	Baik	1	29.745.000,00	Bangunan Tempat Parkir Keodaraan DPPKBP3A
05.17.01.07.010	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis Lain-lain	-	Pembelian	2019	Baik	5	1.515.000,00	Belanja modal pengadaan buku 5 Buah di ruang UPTD P2TP2A

Di lihat dari kondisi pada tabel 3 di atas, sarana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau tergolong cukup memadai. Sedangkan untuk prasarana Dinas PPKBP3A Kabupaten Berau, jika di lihat dari jumlah pegawai dan struktur Organisasi Dinas masih belum memadai di karenakan Kantor Dinas PPKBP2PA Kabupaten Berau masih menggunakan gedung terpadu (1 atap) yang luasan ruang kerjanya antara Bidang-Bidang dan Seksi-Seksi masih menjadi satu dengan ruangan kesekretariatan sehingga kurang terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam bekerja.

Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Rangking
	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30	Skor x Bobot	
Permasalahan anak												
Belum semua fasilitas pendidikan, kesehatan dan Fasilitas Umum lainnya yang termasuk kategori rumah anak.	4	80	4	80	4	60	4	60	1	30	310	3
Belum optimalnya pemenuhan hak anak di Kab/Kota/ Kecamatan.	5	100	5	100	3	45	1	45	1	30	310	4
Belum tersedianya sistem data terpilah	4	80	3	60	4	60	3	45	1	30	275	5
Belum optimalnya layanan bagi anak korban kekerasan.	3	60	2	40	3	45	4	60	1	30	235	6
Belum cukupnya peran forum anak	3	60	3	60	3	45	2	30	1	30	225	7
Belum tingginya korban kekerasan pada anak	2	40	3	60	3	45	3	45	1	30	220	8
Bidang PP												
Belum optimalnya DPRD melaksanakan PRG	5	100	5	100	4	60	5	75	1	30	365	1
Belum tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan PPO	5	100	5	100	4	60	4	60	1	30	350	2
Belum rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	5	100	5	100	3	45	4	60	1	30	335	3
Belum Optimalnya pemberdayaan pada lansia (potensial) perempuan.	4	80	5	100	3	45	4	60	1	30	315	4
Belum tersedianya sistem data terpilah gender dan anak	4	80	5	100	3	45	3	45	1	30	300	5

Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Rangking
	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30	Skor x Bobot	
Bidang Dalduk												
Lemahnya koordinasi antara instansi dan lembaga terkait terutama permintaan data mengenai kependudukan dan keluarga	4	80	4	80	3	45	3	45	1	30	280	3
Advokasi dan KIE mengenai KB belum responsip Gender.	5	100	5	100	5	75	3	45	1	30	350	1
Peran petugas lapangan PKB/PLKB dalam konseing belum optimal	4	80	4	80	4	60	3	45	1	30	295	2
Bidang KB												
Persepsi masyarakat tentang pember KB belum terpenuhi	5	100	5	100	5	75	4	60	1	30	365	1
Persepsi masyarakat tentang manfaat KB	4	80	5	100	5	75	4	60	1	30	345	2
Persepsi masyarakat Non-UM tentang metode kontrasepsi jangka panjang masih kurang di desa	4	80	5	100	5	75	3	45	1	30	330	3
Persepsi masyarakat tentang peran lembaga di bidang KB tahun 2017-2018	4	80	5	100	4	60	3	45	1	30	315	4
Bidang KS												
Partisipasi anggota kelompok UPPKS dalam program pelatihan pemerintah	5	100	5	100	5	75	5	75	1	30	380	1

Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Rangking
	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30	Skor x Bobot	
kurangnya pemahaman orang tua keluarga penerima yang ber	5	100	5	100	5	75	4	60	1	30	365	2
orang tuahnya masyarakat tentang pentingnya kelompok BKB, BKL dan BKL	5	100	5	100	5	75	3	45	1	30	350	3
dukungan dan bantuan serta Pusat Promosi dan Peningkatan BUMDes optimal	4	80	5	100	5	75	4	60	1	30	345	4
kegiatan pelatihan mengenai kesehatan produksi masih kurang	5	100	5	100	5	75	2	30	1	30	335	5
tidak di dukung oleh keluarga PS dan	4	80	5	100	5	75	3	45	1	30	330	6
kurangnya pemahaman orang tua keluarga penerima yang ber	4	80	4	80	5	75	3	45	1	30	310	7
masyarakat menganggap tidak masuk dalam kelompok BKL pun tidak bisa membuat orang tua sendiri yg bisa	4	80	4	80	5	75	2	30	1	30	295	8

Sekretariat

Pemasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Rangking
	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30	Skor x Bobot	

Berdasarkan hasil scoring ditetapkan isu strategis pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:

1.5.1. Isu – isu strategis pelayanan Keluarga Berencana sebagai berikut :

1. Masih tingginya kebutuhan ber KB yg tidak terpenuhi (unmeet need)
Masih tingginya
2. Advokasi dan KIE mengenai KB belum responsip Gender.
3. Masih rendahnya partisipasi pria ber KB
4. Akseptor KB Non MKJP (metode kontrasepsi jangka panjang) masih cukup besar
5. Pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegitan (BKB, BKR ,BKL) dan UPPKS (usaha peningkatan penghasilan keluarga Sejahtera) belum optimal di masyarakat dalam mendukung kelestariSn ber KB
6. Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga
7. Peran petugas lapangan PKB/PLKB dalam konseing belum optimal

1.5.2. Isu – isu strategis pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

1. Belum optimalnya OPD melaksanakan PPRG

2. Belum tersedianya sistem data terpilah
3. Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga
4. Tingginya kasus kekerasan perempuan dan TPPO
5. Belum optimalnya pemberdayaan pada lansia (potensial) perempuan
6. Belum optimalnya lembaga penyedia layanan dan perlindungan anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus
7. Belum optimalnya lembaga PUSPAGA dalam pemenuhan hak anak
8. Belum semua Fasilitas pendidikan, Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Umum lainnya yang termasuk kategori ramah anak.
9. Belum optimalnya pemenuhan hak anak di Kab/Kota
10. Belum tersedianya system data terpilah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGI

2.1.1 VISI DAN MISI

VISI

Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar dapat terus eksis, antisipatif, kreatif, dan inovatif. Visi adalah juga suatu gambaran yang menantang keadaan di masa datang yang diinginkan oleh instansi pemerintah.

Dengan demikian dalam merencanakan program kerja dan merencanakan visi misinya lembaga ini berpedoman dengan Visi Pemerintah Kabupaten Berau yaitu **"Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul dan Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya Manusia dan Bermanfaat Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan "**.

Unsur Visi yang terkait dengan tugas dan fungsi secara sederhana menjadi sebuah konsep ideal Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Sejahtera yang berarti suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat Berau yang merasa aman, damai dan tentram lahir dan batin dimana masyarakat dapat memenuhi kehidupan pokok/dasar secara jasmani dan sosial yang sebaik – baiknya bagi diri dan lingkungan dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu kondisi yang sesuai dengan kondisi Sosial – Budaya masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Berau.

MISI

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Misi Pertama : Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. Misi Kedua: Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal

3. Misi Ketiga: Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi
4. Misi Keempat: Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau mendukung pencapaian Misi Kedua : "Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal". Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau adalah Kebijakan sektor perekonomian akan diarahkan pada pemberdayaan dan penguatan pelaku ekonomi sektor informal berbasis gender, Jumlah penduduk yg terkendali dapat membantu menanggulangi masalah dan berbagai isu penting untuk kesejahteraan dengan sasaran adalah meratanya pendapatan masyarakat.

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam mewujudkan tujuan yang dicanangkan untuk jangka 5 (Lima) tahun ke depan. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju, lebih baik daripada sebelumnya, lebih bahagia, yang diwujudkan atau dihasilkan dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan (Das Salen) dan Kenyataan (Das Seen) pada kurun waktu tertentu.

Penetapan tujuan sebagai penjabaran dari pelaksanaan Visi dan Misi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan tujuan yang merupakan kondisi dan proyeksi yang diinginkan ke depan dalam kurun waktu 3 (Tiga) sampai 5 (Lima) tahun yang akan datang
2. Penetapan indikator tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tersebut

Dari tahapan tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau menetapkan tujuan sebagai arah pembangunan Pemerintah Kabupaten Berau sebagai berikut :

1. Meningkatkan intensitas kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dalam Pembangunan.

Sasaran yang ingin di capai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut :

- a. Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender
- b. Tersedianya system data pilah Gender pada anak OPD yang berkualitas
- c. Meningkatnya sumbangan pendapatan perempuan dalam pembangunan.

2. Meningkatkan efektivitas perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan

Sasaran yang ingin di capai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan lembaga layanan dan perlindungan korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus ..
- b. Meningkatnya implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak.

3. Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana

Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga meliputi sebagai berikut :

- a. Keikutsertaan Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB Aktif
- b. Tersedianya data dan informasi program kependudukan, KB dan Pembangunan keluarga yang akurat dan tepat waktu.
- c. Tersedianya jaringan kemitraan dan sarana advokasi dan KIE.
- d. Meningkatnya peran petugas PKB/PLKB dan Kader KB.
- e. Menurunnya akseptor KB non MKJP (metode kontrasepsi jangka panjang)
- f. Terbangunnya ketahanan keluarga remaja dan kualitas remaja dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga
- g. Terwujudnya pemberdayaan ekonomi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- h. Meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia.

2.1.3 KEBIJAKAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM KEBIJAKAN

Kebijakan adalah ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan petunjuk bagi kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, Visi dan Misi Pemerintah Daerah.

Adapun kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada DPPKBP3A Kabupaten Berau melalui melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif Gender (PPRG).
2. Memperkuat lembaga/jejaring PUG di Daerah untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan PUG
3. Pengembangan data pilah di prioritaskan pada OPD yang terkait dengan isu gender dan anak.
4. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media masa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang.
5. Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.
6. Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan focus pada UMKM perempuan.
7. Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dalam kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.
8. Meningkatkan kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat dan modal.
9. Memperkuat mekanisme kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
10. Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)
11. Penguatan Kelembagaan P2TP2A
12. Peningkatan pemenuhan hak anak dan perempuan korban kekerasan melalui KIE.
13. Pemenuhan hak anak dengan focus pada percepatan pencapaian Kabupaten / Kota Layak Anak.
14. Pemenuhan hak anak dengan focus dan peduli dengan forum anak dan forum peduli anak berkebutuhan khusus (ABK).
15. Upaya fasilitasi pengumpulan data anak.
16. Menyusun, mereview, mengoordinasikan dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak.

17. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media masa tentang pemenuhan hak anak di daerah
18. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelebagaan kabupaten/kota layak anak.
19. Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di pusat dan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi perlindungan khusus anak.
20. Memperkuat lembaga / jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak
21. Memperkuat sistem penyediaan, pemuktahiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan / program / kegiatan pembangunan di tingkat daerah.
22. Memberikan dukungan sarana dan prasarana, dan ketersediaan SDM dalam penyelenggaraan dan perlindungan hak anak.
23. Menyediakan dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
24. Memberikan kesempatan yang seluas – luasnya kepada anak untuk mendapatkan pendidikan.
25. Menyusun profil melalui pengumpulan data anak dari tingkat kecamatan.
26. Menguatkan Advokasi dan KIE tentang KB dan KR di seluruh wilayah.
27. Peningkatan standar kualitas pelayanan tenaga medis
28. KIE dan Advokasi tentang keluarga berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (KR)
29. Pelatihan Updating pendataan keluarga
30. Refreshing captor (pencatatan dan pelaporan) bulanan
31. Pembentukan Kampung KB
32. Peningkatan kualitas PKB/PLKB dan kader KB melalui bimtek dan pelatihan melalui BKKBN
33. KIE dan Advokasi tentang KB dan Kesehatan Reproduksi (KR) untuk menurunkan akseptor KB non MKJP (Metode kontrasepsi jangka panjang)
34. Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan kesejahteraan keluarga
35. Pengembangan / Revitalisasi Peran, fungsi dan pengelolaan PIK remaja dan BKR.

36. Peningkatan Fasilitas pembentukan dan Pembinaan PIK Remaja dan BKR.
37. Peningkatan penyuluhan tentang pentingnya keluarga dan kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS) serta penguatan 8 fungsi keluarga.
38. Pengembangan model kelembagaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
39. Peningkatan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga.
40. Peningkatan akses dan pelayanan informasi program pembangunan keluarga kepada masyarakat.

Strategi

Pencapaian maupun perwujudan dari Visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau yang telah ditetapkan, maka dalam periode 2016-2021 akan ditempuh strategi sebagai berikut :

Strategi Dasar dan Strategi Operasional dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan penyusunan perencanaan dan penganggaran responsip gender (PPRG) serta pendampingan implementasi PPRG.
2. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan DPPKBP3A Kabupaten Berau
3. Peningkatan pelayanan dan pemenuhan hak anak
4. Optimalisasi pelayanan KB dan penguatan kapasitas kelembagaan ketahanan serta kesejahteraan keluarga.

PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuan 1 yaitu " Meningkatkan Intensitas Kesetaraan Gender , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak", maka ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Kegiatan :

- 1) Kegiatan Advokasi dan fasilitas PUG bagi Perempuan.
- 2) Fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A)
- 3) Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

- 4) Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak.
- 5) Advokasi dan Fasilitasi Permasalahan Anak.
- 6) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
- 7) Kegiatan Fasilitasi Pusat Layanan Autis
- 8) Fasilitasi Penguatan kelembagaan Pusat pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) berbasis hak Anak.
- 9) Peningkatan Pengembangan Kabupaten/Kota /Kecamatan/Kampung Layak Anak.
- 10) Sosialisasi dan Advokasi Sekolah Ramah Anak dan Pukesmas ramah Anak.
- 11) Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA)
- 12) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Forum Peduli Anak dan Forum Peduli ABK
- 13) Expose Peningkatan Kreatifitas Anak dalam Pembangunan.
- 14) Pelatihan Tenaga Pendamping ABK dan Pelatihan Deteksi Dini Tumbuh kembang Anak.
- 15) Pendataan dan Pengolahan data Profil Anak/Organisasi serta Potensi Anak.

Tujuan 2 “Meningkatnya Efektivitas Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pembangunan”. Maka program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

Kegiatan :

- 1) Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah.
- 2) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga kerja Perempuan.
- 3) Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak kekerasan.
- 4) Melaksanakan Koordinasi dengan lintas OPD untuk mencegah Trafficking dan KDRT.

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Kegiatan :

- 1) Pembinaan Organisasi Perempuan.
- 2) Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Pengelolaan Usaha.
- 3) Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan.
- 4) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.
- 5) Pembentukan Desa Prima.
- 6) Pembinaan dan Evaluasi Model Desa prima.
- 7) Peningkatan Motivasi Perempuan Lansia dalam Pembangunan.

Tujuan 3 "Meningkatkan Akses Layanan Keluarga Berencana". Maka program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Program Keluarga Berencana.

Kegiatan :

- 1) Penyediaan Pelayanan Kontrasepsi KB dan Alat Kontrasepsi.
- 2) Pembinaan Klinik KB.
- 3) Sosialisasi Jaminan Pelayanan KB bagi Klinik KB, Dr. Praktek Swasta dan Bidan Praktek Swasta.
- 4) Pendampingan DAK - BOK.
- 5) Penyusunan Data Informasi Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana.
- 6) Penyediaan Data Base Informasi Penduduk dan Keluarga Berencana Berbasis IT
- 7) Penyediaan Sarana, Alat dan Kelengkapan Kerja Tenaga (PKB/PLKB) dan Kader KB.
- 8) Advokasi dan Pendampingan Peserta Program KB
- 9) Peningkatan Promosi dan Pergerakan Masyarakat.
- 10) Penyuluhan KB dan Penguatan Kelembagaan Kader KB.
- 11) Sosialisasi Kebijakan dan Program Pengendalian Penduduk.
- 12) Peningkatan Kapasitas Tenaga PKB/PLKB dan Kader KB.

Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Kegiatan :

- 1) Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).
- 2) Pembinaan PIK Remaja dalam Membangun Keluarga Sejahtera

Program Pelayanan Kontrasepsi.

Kegiatan :

- 1) Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi.

Program Ketahanan dan Kesejahteraan

Kegiatan

- 1) Pembinaan dan Evaluasi Kelompok UPPKS.
- 2) Pembinaan dan Penilaian Keluarga Harmonis dalam Membangun Keluarga harmonis.
- 3) Pembentukan, Pembinaan dan Evaluasi Kelompok BKB, BKR dan BKL.
- 4) Pelatihan Tenaga Pendamping kelompok Bina Keluarga .

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sebagai salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, maka di terbitkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER.09/M.PAN/5/2007 Tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kabupaten Berau

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULA PENGHITUNGAN
1	2	3	6
1.	Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender	Persentase OPD yang sudah melaksanakan PPRG	$\frac{\text{Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100$
2.	Meningkatnya Lembaga Layanan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak	$\frac{\text{Jumlah Kasus terlaporkan}}{\text{Jumlah Kasus yang di layani}} \times 100$
3.	Meningkatnya Implementasi Kabupaten / Kota Layak Anak	Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA)	Peringkat dalam KLA
4.	Keikutsertaan PUS menjadi peserta KB Aktif	Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR)	$\frac{\text{KB Aktif}}{\text{PUS}} \times 100$

2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana kerja tahunan merupakan penjabaran dari sasaran program yang telah di tetapkan dalam renstra, yang akan di laksanakan oleh unit kerja melalui berbagai kegiatan tahunan yang mendukung tercapainya indikator kinerja utama. Penyusunan rencana kinerja tahunan di lakukan dengan penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang akan di

capai pada tahun berjalan. Penyusunan rencana kinerja tahunan meliputi sasaran strategis, Indikator Kinerja, satuan dan target. Adapun Rencana Kinerja Tahun 2019 Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

Tabel 5.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan Implementasi Pengarusutamaan Gender	Presentase OPD yang sudah melaksanakan PPRG	23,4 %
2	Meningkatkan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Presentase Penanganan Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak	100 %
3	Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA)	Madya (650) P0in
4	Keikut Sertaan Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi KB Aktif	Presentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	75,84 %

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Tahun 2019 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan indikator kinerja di tahun 2019 menjadi tumpuan bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau untuk mewujudkan kinerja Output ataupun Outcome yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Tahun 2019 berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja.

Penetapan Kinerja adalah perjanjian kinerja dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada

hasil dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Tahun 2019 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Tahun 2019 dan melaporkannya dalam LK-JIP. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau telah membuat penetapan kinerja Tahun 2019, sebagai berikut :

Tabel 6
Perjanjiaan Kinerja Tahun 2019
Belanja Langsung

No.	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Internal Dinas	Prosentase Pelayanan Administrasi perkantoran yang terselesaikan	100 %	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :	Rp. 1.393.339.500,-
		Jumlah Benda Pos yang tersedia	600 Lembar	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 3.200.000,-
		Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 93.500.000,-
		Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara Mobil dan Motor setiap bulan	432 UB	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Rp. 297.856.000,-
		Jumlah Orang Bulan Tenaga Administrasi Keuangan	180 OB	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp. 118.113.000,-
		Jumlah Alat dan Bahan Pembersih	100 Buah	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp. 12.000.000,-
		Jumlah Peralatan Kerja Yang di	35 Unit	Penyediaan Jasa Peralatan Kerja	Rp. 33.000.000,-

No.	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
		Perbaiki			
		Jumlah Jenis ATK yang Tersedia	50 Jenis	Penyediaan ATK	Rp. 24.800.000,-
		Jumlah Foto Copy, jilid dan Cetak	30.000 Lbr	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 35.500.000,-
		Jenis Komponen Listrik Yang Tersedia	70 Buah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 8.000.000,-
		Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 Unit	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 47.732.000,-
		Tersedianya Peratan Rumah Tangga dan Cendramata	25 Jenis	Penyediaan Peralatan Rumag Tangga	Rp. 10.442.500,-
		Jumlah Berlangganan Koran	1.080 Eksemplar	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Rp. 9.000.000,-
		Jumlah Kali Makan dan Minum untuk TRapat dan Tamu	20 kali Rapat	Penyediaan Makan dan Minum	Rp. 100.000.000,-
		Jumlah Kali Pelaksanaan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	35 Kali	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rp. 385.000.000,-

No.	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
2.		Jumlah Kali Pelaksanaan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Daerah	100 Kali	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Rp. 80.000.000,-
		Jumlah Orang Bulan Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Teknis Perkantoran	144 OB	Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Perkantoran	Rp. 386.400.000,-
		Persentase Terpeliharannya Sarana dan Prasaran SKPD	100 %	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan :	Rp. 157.000.000,-
		Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	2 Unit	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Rp. 50.000.000,-
		Jumlah Gedung Yang Terpelihara	1 Unit	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp. 107.000.000,-
3	Meningkatnya Kualitas Penyusunan, Perencanaan, Program Pelaporan dan Monitoring	Nilai LKJIP	70,41	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan :	Rp. 67.300.000,-
		Terlaksananya Pameran Pembangunan	1 Kegiatan	Sosialisasi Kinerja Program SKPD	Rp. 20.000.000,-
		Jumlah Tersedianya Dokumen / Laporan	9 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian	Rp. 47.300.000,-

No.	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatkan Intensitas Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak",			Kinerja SKPD Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Kegiatan :	Rp. 1.835.555.000,-
		Presentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang datang ke P2TP2a	100%	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A)	Rp. 775.770.000,-
		Jumlah OPD yang mengikuti Pelatihan, Bimtek PUG melalui PPRG	20 OPD	Pelatihan dan Road Show PUG melalui PPRG	Rp. 100.000.000,-
		Peningkatan dalam Kabupaten Layak Anak	Madya (650) Poin	Kabupaten Kota Layak Anak (KLA)	Rp. 400.000.000,-
		Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan PUSPAGA	4.000 Orang	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PUSPAGA Berbasis Hak Anak	Rp. 282.784.000,-
		Pembentukan, Pembinaan dan Evaluasi Forum Anak di Kecamatan	33 FA	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PUSPAGA Berbasis Hak Anak	Rp. 277.001.000,-
5	Meningkatkan Efektivitas Perlindungan			Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam	Rp. 566.502.000,-

No.	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
	gan Perempua n dan Anak dalam Pembang unan			Pembangunan Kegiatan :	
		Jumlah Organisasi yang terbina dan te evaluasi	23 Organisasi	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Rp. 416.200.000,-
		Terlaksananya Expose Peningkatan Kreatifitas Ibu dalam Pembangunan	2 Kali	Expose Peningkatan Kualitas Perempuan dalam Pembangunan	Rp. 100.302.000,-
		Terbinanya dan terevaluasinya Desa Prima di Kecamatan	6 Kelompok	Pembinaan dan Evaluasi Model Desa Prima	Rp. 50.000.000,-
6	Meningka tkan Akses Layanan Keluarga Berencana			Program Keluarga Berencana Kegiatan :	Rp. 4.677.942.000,-
		Terlayannya Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB	10 Kecamatan	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Rp. 100.00.000,-
		Tersedianya Sarana dan Prasaran Penyuluh KB	1 Unit BPKB	Penyediaan Sarana dan Prasaran Penyeluhan Keluarga Berencana	Rp. 979.252.000,-
		Terlayani nya Masyarakat dalam hal ber KB	4 Kegiatan / 390 Kali Pertemuan	Bantuan Operasional KB (DAK Non Fisik)	Rp. 3.098.690.000,-

No.	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
		Jumlah Petugas Klinik KB dan Faskes yang Mengikuti Sosialisasi / Pelatihan	15 Orang	Sosialisasi / Pelatihan Jaminan Pelayanan KB bagi Klinik KB, dr. Praktek dan Bidan Praktek	Rp. 175.000.000,-
				Program Kesehatan Reproduksi Remaja Kegiatan :	Rp. 233.956.000,-
7		Terlaksananya Pembentukan, Pembinaan dan Evaluasi PIK R di Kabupaten Berau	35 Kelompok	Jambore Remaja Mahasiswa PIK /	Rp. 233.956.000,-
				Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Kegiatan :	Rp. 317.233.000,-
8		Jumlah Kelompok UPPKS yang terbina dan terevaluasi	13 Kelompok	Pembinaan dan Evaluasi Kelompok UPPKS	Rp. 235.123.000,-
		Jumlah BKB, BKL, yang terbentuk, Terbina dan Terevaluasi	13 Kelompok	Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu - PAUD	Rp. 82.110.000,-
Total Belanja Langsung (BL)					Rp. 9.500.031.500,-

Tabel 7
Perjanjiaan Kinerja Tahun 2019
Belanja Tidak Langsung

No.	Uraian	Target Anggaran
1	2	3
1	Belanja Pegawai	5.748.042.500
Total Belanja Tidak Langsung (BTL)		5.748.042.500

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LK-JIP merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajiban Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai misi dan Rencana Strategik. Keberhasilan/kegagalan kinerja tersebut diukur berdasarkan pencapaian sasaran stratejik yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan (goal) serta visi/misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK-JIP) adalah dokumen yang berisi perwujudan yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sebagai alat untuk menilai kinerja organisasi.

LK-JIP menjadi kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Formulir Pengukuran Sasaran.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. Selanjutnya, pemaknaan dari capaian nilai kinerja dibagi berdasarkan klasifikasi berikut :

SKALA PENILAIAN	
SKALA NILAI	KATEGORI PENILAIAN
> 100	SANGAT BAIK
80 > 100	BAIK
> 55 - 80	SEDANG
< 55	KURANG

Untuk dapat mengukur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Kabupaten Berau tahun 2019, maka ditetapkan indikator-indikator kinerja sebagai berikut :

1. Masukan atau Input : adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa pendanaan, personil, peralatan dan dokumentasi.
2. Keluaran atau Output : adalah barang atau jasa yang di hasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Hasil atau Outcome : adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan – kegiatan dalam satu program.

3.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

LKJIP Tahun 2018 yang telah di evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Berau pada tahun 2019 di peroleh hasil evaluasi dengan nilai **89,81** dengan kategori **A** interpretasi Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel. Namun ada beberapa rekomendasi dari Inpsektorat yang harus di tindaklanjuti oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adapun rekomendasi tersebut antara lain :

1. Rencana aksi atas kinerja telah di monitor pencapaiannya secara berkala namun Penerapan reward and punishment yang belum dilaksanakan sesuai kriteria yang di tetapkan.
2. Rencana aksi belum sepenuhnya di manfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan, belum adanya bukti sampai sejauh mana terget – terget kinerja dalam perencanaan aksi di jadikan alasan untuk memberikan otoritas dan eksekusi di teruskan atau di tundanya suatu kegiatan.
3. Pengukuran Kinerja belum di kembangkan melalui / menggunakan teknologi informasi.
4. Hasil pengukuran (Capaian) Kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum di kaitkan dengan (di manfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & Pusihment.

5. IKU yang di sajikan seharusnya mengacu kepada creteria IKU yang di persyaratkan yaitu SMART dan harus mempertimbangkan isu strategis yang sedang berkembang (dengan penambahan beban tugas pembentukan UPTD) perlindungan anak.
6. Evaluasi program telah di laksanakan namun belum menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program.
7. Informasi mengenai kinerja yang di lakporkan (output) belum sepenuhnya dapat di andalkan baik di peroleh dari dasar perhitungan (formulasi) yang falid dapat di verifikasi up to date.

Tindak lanjut hasil evaluasi LKJIP tahun 2018 yang telah di lakukan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

1. - Rencana Aksi tahun 2018 telah di tindaklanjuti telah terevaluasi per triwulan dan telah di laporkan kepada bagian Organisasi Sekretaris Daerah Kabupaten Berau per triwulan dari triwulan I s.d triwulan IV dan Rencana Aksi tahun 2019 sebagai tahun berjalan juga telah di lakukan pelaporan per triwulan dari triwulan I s.d triwulan IV.
 - Penerapan reword and punishment sudah di tindaklanjuti oleh mKasubag Umum dan Kepegawaian untuk Tahun 2019 telah di lakukan Penetapan reword dan punishment terhadap seluruh pegawai dan di kreterikan penetapan rewort kepada pegawai yang berprestasi dengan memberikan piagam penghargaan.
2. Rencana aksi yang sudah di buat, di evaluasi dan dilaporkan pada tahun 2018 sudah menjadi acuan, pengarahan dan pengorganisasi kegiatan dengan bukti adanya kebijakan dari kepala Dinas program dan kegiatan yang menjadi program prioritas akan terus dilaksanakan dan penganggaran di utamakan atau P1.
3. Pengukuran Kinerja pada tahun 2018 belum di informasikan dengan menggunakan teknologi informasi, DPPKBP3A di tahun 2019 menggunakan teknologi informasi hanya sebatas publikasi semua kegiatan yang di laksanakan di lapangan dengan menggunakan website..... Dan
4. Tahun 2019 DPPKBP3A sudah memberikan Reward dan punishment kepada PNS yang memiliki didikasi dan prestasi dalam bekerja.
5. IKU yang di sajikan merupakan IKU yang ada di dalam Renstra lima tahun, yang sudah menjadi indikator utama harus di capai selama lima tahun. Telah di

- laksanakan empat tahun dan tidak mungkin untuk di lakukan perubahan. Namun untuk Renstra Lima tahun mendatang akan di buat IKU yang berkriteria SMART.
6. Sebagai bahan evaluasi DPPKBP3A untuk tahun kedepan akan di lakukan evaluasi program dengan menyimpulkan keberhasilan dan kegagalan suatu program.
 7. Informasi kinerja yang di laporkan (Output) sudah di tindak lanjuti dengan membuat laporan Fisik dan keuangan dari semua kegiatan yang dilakukan oleh semua penanggung jawab kegiatan.

3.2 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

A. Capaian Rencana Kinerja Tahun 2019 Berdasarkan Sasaran Strategis

Realisasi Kinerja berdasarkan Sasaran Strategis yang merupakan Rencana Kerja dari Kepala Dinas sebagaimana table III.1

Tabel III.1

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Implementasi Pengarusutaman Gender	Presentase OPD yang sudah melaksanakan PPRG	23,4 %	42,56%	181 %
2	Meningkatkan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Presentase Penanganan Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak	100 %	100%	100%
3	Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA)	Madya (650) Poin	Pratama (>600) Poin	92,3 %

4	Keikut Sertaan Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi KB Aktif	Presentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	75,84 %	76,50 %	100,9 %
---	---	---	---------	---------	---------

Realisasi Kinerja berdasarkan berdasarkan Sasaran strategis tahun 2019 sebagai berikut :

1. Meningkatkan implementasi pengarusutaman gender dengan indikator kinerja Presentase OPD yang melaksanakan PPRG (Perencanaan Penganggaran Responsip Gender) target 23,41 % dari 47 OPD di Kabupaten Berau yang di harapkan sudah melaksanakan PPRG sebanyak 11 OPD di tahun 2019.

Realisasi dari Anggaran tahun 2019 dan target sasaran strategi tahun 2019 Capaian dapat di tingkatkan menjadi 20 Opd dari 47 OPD yang ada di Kabupaten Berau sehingga prosentase capaian sebesar 42, 56 % hal tersebut di anggab sangat baik karena ada kenaikan target sebesar 19,15 % dari target yang di rencanakan. Hal tersebut karena adanya dukungan dari Bapelitbang atas usulan kegiatan dari OPD DPPKBP3A.

2. Meningkatkan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Memerlukan Perlindungan Khusus dengan indikator kinerja Presentase Penanganan Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak target 100% dari kasus yang terlapor dan kasus yang di tangani.

Realisasi dari Anggaran tahun 2019 dan target sasaran strategi tahun 2019 Capaian Kasus yang terlapor 67 Kasus dan kasus tertangani 67 Kasus capaian kinerja sebesar 100 %.

Adapun jkenis kasus yang terlapor dan di tangani Tahun 2019 sebagai berikut:

- 2.1. KDRT 1 Kasus terlapor dan di tangani dari bulan Agustus - Desember 2019.
- 2.2 Kekerasan Seksual 19 kasus terlapor dan di tangani dari bulan Januari - Desember 2019.
- 2.3. Penelantaran 2 kasus terlapot dan di tangani dari bulan September - Desember 2019.

- 2.4. Kekerasan Masa Pacaran 2 kasus terlapor dan di tangani dari bulan Februari – Desember 2019.
- 2.5. Hak Asuh Anak 7 kasus terlapor dan di tangani dari bulan Februari Desember 2019.
- 2.6. Kekerasan Pada Anak 4 kasus terlapor dan di tangani dari bulan Maret – Desember 2019.
- 2.7. Penganiayaan / Kekerasan Publik 3 kasus terlaporkan dan di tangani dari bulan Februari – Desember 2019.
- 2.8. Perdagangan Orang (TPPO) 1 kasus terlaporkan dan di tangani dari bulan September – Desember 2019.
- 2.9. Anak Berhadapan dengan Hukun (ABH) 12 kasus terlaporkan dan di tangani dari bulan Januari – Desember 2019.
- 2.10. Jenis kasus lain – lain 16 kasus terlaporkan dan di tangani dari bulan Januari – Desember 2019.

3. Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dengan Indikator kinerja Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA), target Madya dengan poin 650.

Realisasi dari Anggaran tahun 2019 dan target sasaran strategi tahun 2019 Capaian Pratama 600 Poin hal tersebut tidak mencapai harapan yang di inginkan di karenakan dalam melaksnakan kegiatan masih di temukan kekurangan atau permasalahan sebanyak 20 permasalahan yang masih kurang mendukung dalam pencapaian kinerja dengan target Madya. Adapun permasalahan dan tindak lanjut tersebut akan di uraikan pada capaian kinerja belanja langsung tahun 2019.

4. Keikut Sertaan Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi KB Aktif dengan Indikator kinerja Presentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR) target 75,84 % dari KB Aktif (PUS Aktif) sebanyak 34.596 per Pasangan Usia Subur (PUS) 45.615 Target tahun 2019.

Realissi dari Anggaran tahun 2019 dari target sasaran strategi tahun 2019 Capaian per Desember 2019 sebesar 76,5 % dari KB Aktif (PUS Aktif) 34.149 per Pasangan Usia Subur (PUS) 44.378.

Dari capaian tersebut bahwa dengan jumlah pasangan usia subur sebanyak 44.378 PUS sudah 7 % sudah menjadi peserta KB aktif atau sebanyak

34.149 PUS Aktif dengan menggunakan alat kontrasepsi antara lain IUD, MOW, MOP Kondom, Implat, Suntik dan Pil.

B. Capaian kinerja Belanja Langsung Tahun 2019

Capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Tahun 2019 dilakukan dengan menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja realisasi Belanja Langsung tahun 2019 realisasi fisik dan keuangan tahun 2019 dapat di lihat dari tabel program dan kegiatan per masing – masing kegiatan di bawah ini :

Tabel III.2

Capaian Kinerja Belanja Langsung Tahun 2019

No.	Kegiatan	Anggaran			Keluaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1	Penyediaan jasa surat menyurat	3.200.000,-	3.200.000,-	100	600 Lembar	600 Lembar	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	93.500.000,-	85.193.800,-	91,12	12 Bulan	12 Bulan	100
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	297.856.000,-	289.286.000,-	97,12	432 UB	432 UB	100
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	118.113.000,-	111.180.000,-	94,13	180 OB	180 OB	100
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12.000.000,-	11.992.500,-	99,94	100 Buah	110 Buah	100
6	Penyediaan jasa perbaikan	33.000.000,-	33.000.000,-	100	35 Buah	35 Buah	100

No.	Kegiatan	Anggaran			Keluaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	peralatan kerja						
7	Penyediaan alat tulis kantor	24.800.000,-	24.799.000,-	99,99	50 Jenis	50 Jenis	100
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	35.500.000,-	35.472.000,-	99,92	30.000 Lbr	30.000 Lembar	100
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/pe nerangan bangunan kantor	8.000.000,-	7.972.000,-	99,65	70 Buah	70 Buah	100
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.732.000,-	46.540.000,-	97,50	11 Unit	11 Unit	100
11.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.442.500,-	10.412.500,-	99,71	25 Jenis	25 Jenias	100
12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	9.000.000,-	6,480.000,-	72,00	1.080 Eksemplar	1080 Eksemplar 1	100
13	Penyediaan makanan dan minuman	100.000.000,-	99.990.000,-	99,99	20 kali Rapat	20 Kali Rapat	100
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	385.000.000,-	384.908.141,-	99,98	35 Kali	35 kali	100
15	Rapat-rapat koordinasi dan	80.000.000,-	80.000.000,-	100	100 Kali	100 Kali	100

No.	Kegiatan	Anggaran			Keluaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	konsultasi ke dalam daerah						
16	Penyediaan Jasa Administrasi/ Teknis Perkantoran	386.400.000,-	370.455.840,-	95,87	144 OB	140	97,22
Total. Prog. 1		1.644.543.500,-	1.600.881.781,-	97,35			99,83
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						
1	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	50.000.000,-	35,405.000,-	70,81	2 Unit	2 Unit	100
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	107.000.000,-	106.920.000,-	99,93	2 Unit	2 Unit	100
Total. Prog. 2		157.000.000,-	142.325.000,-	90,65			100
3.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						
1.	Sosialisasi Kinerja Program SKPD	20.000.000,-	20.000.000,-	100	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	47.300.000,-	42.593.450,-	90,05	9 Dokumen	9 Dokumen	100
Total. Prog. 3		67.300.000,-	62.593.450,-	93,01			100
4.	PROGRAM KELUARGA BERENCANA						
1	Penyediaan Pelayanan KB dan Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	245.000.000,-	244.938.426,-	99,97 %	10 Kecamatan	10 Kecamatan	100
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluh	979.252.000,-	922.789.100,-	94,23	1 Unit BPKB	1 Unit BPKB	100

No.	Kegiatan	Anggaran			Keluaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Keluarga Berencana (DAK - Fisik 2019)						
3	Bantuan Operasional KB (DAK Non Fisik 2019)	3.098.690.000,-	1.535.351.388,-	49,23	4 Kegiatan 390 pertemuan	4 Kegiatan 110 Pertemuan	28
4	Pendampingan DAK BOKB dan DAK Fisik	180.000.000,-	167.490.001,-	93,05	13 Kecamatan	13 Kecamatan	100
5	Sosialisasi / Pelatihan Jaminan Pelayanan KB bagi Klinik KB, dr, Praktek dan Bidan Praktek	175.000.000,-	170.771.359,-	97,58	15 orang	15 Orang	100
Total. Prog. 4		4.677.942.000,-	3.041.340.274,-	65,01			85,64
5.	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA						
1	Pembinaan PIK Remaja / Mahasiswa di Kab. Berau	233.956.000,-	219.717.924,-	93,91	35 Kelompok	35 Kelompok	100
Total. Prog. 5		233.956.000,-	219.717.924,-	93,91			100
6.	PROGRAM Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak						
1	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A)	775.770.000,-	719.656.870,-	92,77	100	100	100
2	Pelatihan dan Road Show PUG melalui PPRG	100.000.000,-	90.860.700,-	90,86	20 OPD	20 OPD	100
3	Kabupaten Kota	400.000.000,-	345.504.295,-	88,63	Madya 650	Pratama > 600	92,31

No.	Kegiatan	Anggaran			Keluaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Layak Anak (KLA)				skoring	Skoring	
4	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PUSPAGA Berbasis Hak Anak	282.784.000,-	264,345.101,-	93,48	4.000 Orang	1,653 Orang	41,33
5	Pemenuhan Hak Anak)	277.000.000,-	260.014.502,-	93,97	-1 FA Kabupaten -13 FA Kec. -11 FA Kampung	-1 FA Kabupaten -13 FA Kec. -6 FA Kampung	80
Total. Prog. 6		1.835.555.000,-	1.689.381.468,-	92,04			80,30
7.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN						
1	Pembinaan Organisasi Perempuan	418.200.000,-	381.120.300,-	91,57	23 Organisasi	23 Organisasi	100%
2	Expose Peningkatan Kualitas Perempuan dalam Pembangunan.	100.000.000,-	96.238.000,-	95,95	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
3	Pembinaan dan Evaluasi Model Desa Prima	50.000.000,-	46.360.000,-	92,72	6 Kelompok	6 Kelompok	100
Total. Prog. 7		566.502.000,-	523.718.300,-	92,45			100
8.	PROGRAM KETAHANAN DAN KELUARGA SEJAHTERA						
1	Pembinaan dan Evaluasi Kelompok UPPKS	235.123.000,-	209.288.338,-	95,22	13 Kelompok.	13 Kelompok	100
2	Pengkajian	82.110.000,-	78.181.055,-	95,22	13 Kel	13 Kel	100

No.	Kegiatan	Anggaran			Keluaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu - PADU						
Total Prog. 8		317.233.000,-	287.469.393,-	90,62			100
Total 1 s.d 8		9.500.031.500,-	7.567.427.590,-	79,66			96,22

Dari table III.2 Capaian Kinerja Belanja Langsung Tahun 2019 dari target anggaran Rp. 9.500.031.500,- realisasi anggaran Rp. 7.567.427.590,- dengan prosentase capaian sebesar **79,66 %** Jika di lihat dari Skala penilaian > 50 – 80 kategori penilaian **Sedang** dan untuk realisasi capaian target kinerja prosentase **96,22 %** dilihat dari skal penilaian 80 > 100 kategori penilaian **Baik**

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019

Analisis capaian kinerja tahun 2019 lebih rinci per program dan per kegiatan dapat di lihat dari table – table tersebut di bawah ini :

1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tabel III.3

Realisasi Program pelayanan Adm. Perkantoran tahun 2019

No.	Kegiatan	Anggaran			Keluaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	3.200.000,-	3.200.000,-	100	600 Lembar	600 Lembar ✓	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	93.500.000,-	85.193.800,-	91,12	12 Bulan	12 Bulan ✓	100
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	297.856.000,-	289.286.000,-	97,12	432 UB	432 UB ✓	100

No.	Kegiatan	Anggaran			Keluaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	118.113.000,-	111.180.000,-	94,13	180 OB	180 OB ✓	100
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12.000.000,-	11.992.500,-	99,94	100 Buah	110 Buah ✓	100
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	33.000.000,-	33.000.000,-	100	35 Buah	35 Buah ✓	100
7	Penyediaan alat tulis kantor	24.800.000,-	24.799.000,-	99,99	50 Jenis	50 Jenis ✓	100
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	35.500.000,-	35.472.000,-	99,92	30.000 Lbr	30.000 Lembar ✓	100
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/pe nerangan bangunan kantor	8.000.000,-	7.972.000,-	99,65	70 Buah	70 Buah ✓	100
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.732.000,-	46.540.000,-	97,50	11 Unit	11 Unit ✓	100
11.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.442.500,-	10.412.500,-	99,71	25 Jenis	25 Jenias ✓	100
12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	9.000.000,-	6,480.000,-	72,00	1.080 Eksemplar	1080 ✓ Eksemplar 1	100
13	Penyediaan makanan dan	100.000.000,-	99.990.000,-	99,99	20 kali Rapat	20 Kali Rapat ✓	100

No.	Kegiatan	Anggaran			Keluaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	minuman						
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	385.000.000,-	384.908.141,-	99,98	35 Kali	35 kali ✓	100
15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	80.000.000,-	80.000.000,-	100	100 Kali	100 Kali ✓	100
16	Penyediaan Jasa Administrasi/ Teknis Perkantoran	386.400.000,-	370.455.840,-	95,87	144 OB	140 ✓	97,22
Total		1.644.543.500,-	1.600.881.781,-	97,35			99,83

- Tujuan Kegiatan : Meningkatkan Kualitas Layanan Internal Dinas
- Sasaran Strategis : Tersedianya data pegawai dan data aset.
- Indikator Program/Keluaran : Pelayanan Administrasi perkantoran yang terselesaikan target 100%
- Indikator Kegiatan/Hasil : Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Realisasi Fisik Keuangan dengan Presentase 97,35 % dan Realisasi Target Kinerja 99,83 Progres di nilai dari skala penilaian capaian keuangan dan kinerja masuk pada penilaian 80>100 dengan penilaian **Baik**
- Manfaat : Pelaksanaan Administrasi perkantoran berjalan dengan baik
- Dampak : Meningkatnya kualitas layanan internal Dinas.
- Permasalahan Yang di hadapi :
 1. Masih adanya pembiayaan yang di butuhkan tidak sesuai dengan anggaran yang ada di karenakan kondisi yang tidak terduga.
 2. Masih kurang tertibnya pencatatan data persediaan barang dan asset
 3. Masih Kurangnya staf yang memiliki standar pendidikan S1 dan memiliki keterampilan maksimal
 4. masih di buthkannya Tenaga Sopir kendaraan operasional.
 5. Ruang kerrja yang belum tetata dengan baik di karenakan enam bidang di gabung menjadi satu ruangan, belum terpisahnya ruangan sehingga koordinasi antara saf dan kasi dan kepala bidang kurang baik.
- Cara Pemecahan Masalah :
 1. Untuk memaksimalkan pembiayaan akan di lakukan pendataan kembali kebutuhan sehingga di hasilkan data akurat untuk perencanaan seluruh kebutuhan Dinas
 2. Akan di lakukan evaluasi kepada pengelola dan penyimpan barang.
 3. Memaksimalkan tenaga staf yang ada dan membuat usulan kepada Pemda untuk di berikan staf yang di butuhkan Dinas.
 4. Memaksimalkan ruangan yang ada dan akan melakukan penyekatan ruangan membuat usulan minta kantor baru kepada Pemda Kabupaten Berau.

1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

Tabel III.4
Program Peningkatan Saprastahun 2019

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	50.000.000,-	35,405.000,-	70,81	2 Unit	2 Unit	100
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	107.000.000,-	106.920.000,-	99,93	2 Unit	2 Unit	100
Total		157.000.000,-	142.325.000,-	90,65			100

- Tujuan Kegiatan : Meningkatnya Kualitas dan pemeliharaan Sarana dan prasarana gedung kantor
 - Sasaran Strategis : Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai.
 - Indikator Program/Keluaran : Tersedianya Fasilitas Kantor yang di butuhkan
 - Indikator Kegiatan/Hasil : 2 Unit Kendaraan Roda Dua dan 2 Unit Gedung terpelihara
 Prosentase capaian keuangan 90,65 dan prosentase capaian kinerja 100% Progres kerja dari skala penilaian capaian keuangan dan kinerja masuk pada penilaian >100 dengan penilaian **Baik dan Sangat Baik**
 - Manfaat : Terpenuhinya Sarana dan prasarana gedung kantor.
 - Dampak : Tersedianya 2 Unit Kendaraan Roda dua, terpeliharaan 2 Unit Gedung (Gedung Busak Mallu dan Pembuatan Taman di Balai Penyuluhan KB Kec. Sambaliung)
 - Permasalahan Yang di hadapi :
 1. Masih Kurang Fasilitas Kendaraan Operasional roda 2 untuk pejabat eselon IV dan III
 2. Masih Kurangnya ruangan kerja untuk kebutuhan dari 5 Bidang dan 1 Sekretariat
 - Cara Pemecahan Masalah :
 1. Berdasarkan Usulan Persediaan Barang Daerah akan di lakukan pengadaan kendaraan roda 2 berdasarkan kebutuhan sebanyak 10 unit yang sudah masuk dalam rencana pengadaan barang daerah..
 2. Akan di lakukan pengusulan kepada Pemerintah Daerah untuk permohonan Gedung Kantor yang baru untuk memenuhi kebutuhan dari DPPKBP3A Kabupaten Berau dan UPTD PPA

1.3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tabel III.5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

No.	Kegiatan	Anggaran	Capaian (%)	Keluaran	Capaian (%)
-----	----------	----------	-------------	----------	-------------

		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Sosialisasi Kinerja Program SKPD	20.000.000,-	20.000.000,-	100	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	47.300.000,-	42.593.450,-	90,05	9 Dokumen	9 Dokumen	100
Total		67.300.000,-	142.325.000,-	93,01			100
<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan Kegiatan : Meningkatkan kualitas Penyusunan, Perencanaan, Program, kegiatan, Pelaporan dan Monitoring - Sasaran Strategis : Tersedianya Dokumen Perencanaan , Program, Pelaporan dan Monitoring yang berkualitas. - Indikator Program/Keluaran : Tersusunya RKA, DPA, Lakip, SOP, IKM, LPPD, LKPI, Perjanjian Kerja, Evaluasi Renja, Teppra, Smep On Line, E- Sakip. Krisna. Morena - Indikator Kegiatan/Hasil : Laporan 9 Dokumen . Prosentase capaian keuangan 93,01% dan prosentase capaian kinerja 100% Progres kerja dari skala penilaian capaian keuangan dan kinerja masuk pada penilaianan 80>100 dan >100 dengan penilaian Baik dan Sangat Baik - Manfaat : Terpenuhinya dokumen Perencanaan, Program, pelaporan dan Evaluasi. - Dampak : Tersedianya Laporan dan Realisasi Kinerja SKPD - Permasalahan Yang di hadapi : <ul style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya perhatian dari Bidang - bidang untuk menyampaikan data - data hasil kegiatan yang telah di laksanakan per tiga bulan 2. Kurangnya pemahaman dari SDA sehingga adanya kesulitan dalam pembuatan laporan dari tugas dan fungsinya. - Cara Pemecahan Masalah : <ul style="list-style-type: none"> 1. Akan melakukan koordinasi yang kontinyu kepada bidang - bidang dengan harapan adanya perhatian yang lebih khusus atas laporan kegiatan yang telah di laksanakan. 2. Membuatkan Form - form laporan untuk mempermudah penyampaian laporan dari semua kegiatan yang di laksanakan. 3. Akan di lakukan peningkatan SDA dengan mengikuti pelatihan dan diklat yang sesuai dengan kebutuhan dari seluruh ASN 							

1.4 Program Keluarga Berencana

Tabel III.6
Program Keluarga Berencana
Kegiatan Penyediaan Pelayanan KB dan Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Penyediaan Pelayanan KB dan Kontrasepsi bagi	245.000.000,-	244.938.426,- [√]	99,97 %	10 Kecamatan	10 Kecamatan [√]	100

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
	Keluarga Miskin						
<p>1. Tujuan Kegiatan : Meningkatkan akses layanan KB Meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan Kesertaan ber KB Meningkatkan Kualitas Keluarga Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk <p>2. Sasaran Strategis :</p> <ol style="list-style-type: none"> Sasaran kegiatan pelayanan KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS) Strategi yang di lakukan adalah Strategi jemput bola : <ul style="list-style-type: none"> - Mengadakan pelayanan KB kepada PUS di kampung – kampung yang belum ber KB yang cukup tinggi dan jauh dari fasilitas pelayanan KB. - Bekerjasama dengan IBI Kabupaten Berau, Pimpinan Pukesmas Induk dan Bidan Pustu serta PLKB setempat. - Dengan mendata calon – calon akseptor yang ingin di layanan di kampung – kampung terdekat dari tempat pelayanan yang sudah di tentukan. - Menjemput calon akseptor di kampung terdekat untuk di layani di tempat pelayanan – pelayanan yang sudah di tentukan, - Melakukan KIE dan Konseling kepada Masyarakat - Memberikan soufenir kepada akseptor MKJP yang di layani. <p>3. Indikator Program/Keluaran : Terlayani Pasangan usia subur menjadi peserta KB Kegiatan yang dilakukan dalam mencapai target kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun rencana kegiatan pelayanan - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait terutama Camat, Kepala Kampung, Pimpinan Puskesmas, Bidan Pustu, PLKB, serta tokoh masyarakat setempat. - Melakukan pendataan kepada calon akseptor KB yang ingin mendapatkan pelayanan KB di Kampung – Kampung terdekat oleh bidan Pustu, PLKB dan Kader - Melakukan KIE dan Konseling untuk meningkatkan pemahaman kepada Masyarakat tentang program KB dan KB MKJO serta Kontak. - Memberikan soufenir / Cenderamata kepada akseptor KB yang telah di alyani. <p>- Indikator Kegiatan/Hasil : Prosentase Pemakaian Kontrasepsi KB (CPR) Prosentase capaian keuangan 93,01% dan prosentase capaian kinerja 100% Progres kerja dari skala penilaian capaian keuangan dan kinerja masuk pada penilaian 80>100 dan >100 dengan penilaian Baik dan Sangat Baik Capaian dari target kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Target pelayanan kepada 10 Kecamatan realisasi pelayanan 12 Kecamatan atau 120 % dapat di lihat dari table capaian layanan KB di bawah - Target Akseptor KB sebanyak 325 akseptor Realisasi 513 akseptor atau prosentase 157 % <p>4. Dampak : Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk</p> <p>5. Permasalahan Yang di hadapi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih rendah tingkat pemahaman masyarakat tentang KB MKJP dan Kontak - Jarak yang sangat jauh yang di tempuh akseptor KB untuk mendapatkan pelayanan KB di tempat- tempat / fasilitas pelayanan KB - Sarana dan Prasarana KB kurang memadai terutama Obgynbed Cara Pemecahan Masalah : dan IUD Kit di Pustu - Dari 110 Kampung yang ada di 13 kecamatan yang bisa dan terjangkau dalam pelayanan KB baru 12 Kampung / Kelurahan di 12 Kecamatan sehingga masih ada 98 yang perlu mendapatkan pelayanan KB. - Tidak tersedianya kendaran operasional jemput antar akseptor sehingga tidak maksimalnya pelayanan kepada akseptor tempat tinggal jauh dari tempat pelayanan. - Petugas PLKB sebagai ujung tombak di lini lapangan terbatas tidak sebanding dengan jumlah kampung dan medan lapangan yang sangat jauh, Jumlah PLKB sebanyak 18 Orang. Idealnya 2 Kampung 1 PLKB. - Belum semua Bidan di Kecamatan dan Pustu sudah mendapatkan pelatihan CTU sebagai 							

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)	
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
		dasar untuk melakukan pelayanan penggunaan alat kontrasepsi IUD dan Implant (KB MKJP)						
7.	Tindak lanjut dalam mengatasi permasalahan :	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu dilaksanakannya penyuluhan KIE dan Konseling kepada Akseptor dan Masyarakat. - Perlu adanya peningkatan prasarana KB melalui pengadaan Obygnbed dan IUD Kit pada puskesmas yang memerlukan dengan melakukan pengusutan pengadaan melalui APBD atau Dana DAK atau melalui Hibdah dari BKKBN Provinsi Kaltim. - Melakukan usulan anggaran kegiatan tahun 2020 dengan menambah sasaran kinerja dari 13 Kecamatan dengan pelayanan kampung / kelurahan yang belum terlayani di tahun 2019 sebanyak 98 kampung. - Melakukan usulan tahun 2020 untuk pengadaan Mobil Operasional melalui DAK Fisik Tahun 2020 - Melakukan data ulang petugas PLKB dan melakukan Koordinasi dengan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. - Melakukan koordinasi kepada Kasi Jaminan Pelayanan KB untuk usulan pelatihan dan Bimtek CTU (Contraceptive Technology Update) bagi Bidang Puskesmas di Kecamatan. 						

CAPAIAN KINERJA PELAYANAN KB DI 12 KECAMATAN TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	KAMPUNG / KELURAHAN	Target	Hasil Pelayanan					Total	Presentase Capaian
				IUD	Implan	SUNTIK (pack)	PIL (strip)	KONDOM (gross)		
1	Kelay	Merapun	25	32	22	2	2	2	60	240
2	Talisayan	Sumber Mulya	25	13	12	6	10	2	43	172
3	Sambaliung	Sukan Tengah	25	31	8	2	1	0	42	160
4	Segah	Tepian Buah	25	0	0	0	0	0	0	0
5	Tanjung Redeb	Tanjung Redeb	25	39	29	6	47	11	132	528
6	Gunung Tabur	Melati Jaya	25	10	6	10	1	0	27	108
7	Pulau Derawan	Tlk. Semanting & Pulau Derawan	25	41	14	0	3	0	58	232
8	Teluk Bayur	Labanan Jaya	25	10	11	1	0	3	25	100
9	Biduk - Biduk	Biduk - Biduk	25	26	8	0	0	0	34	136
10	Tabalar	Tubaan	25	11	0	1	0	0	12	48
11	Biatan	Manunggal Jaya	25	12	11	8	12	0	43	172
12	Batu Putih	Tembudan	25	16	2	4	0	0	22	88

13	Maratua	Bohe Silian	25	13	0	2	0	0	15	60
	Total		325	254	123	42	76	18	153	157

Tabel III.7
Program Keluarga Berencana
Kegiatan Penyediaan Saprass Penyuluhan KB (DAK-Fisik) Tahun 2019

No	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK - Fisik 2019)	979.252.000,-	922.789.100,-	94,23	1 Unit BPKB	1 Unit BPKB	100
<p>1. Tujuan Kegiatan : Meningkatkan Advokasi dan KIE KB ke seluruh wilayah Kabupaten Berau</p> <p>2. Sasaran Strategis :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pemakaian kontrasespsi (CPR) - Meningkatkan Pemakaian MKJP - Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi (DO) - Menurunnya Un meet need - Menurunnya kelahiran pada remaja 15-19 tahun <p>3. Indikator Program/Keluaran : Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana penyuluhan KB</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indikator Kegiatan/Hasil : Terbangunnya 1 Unit Balai penyuluhan KB (BPKB), 13 kit KIE (8kit KIE, 6 kit BKB, 8 kit BKL) 10 GenRe kit , 10 sarana PKB, 110 sarana PPKBD (Rompi), 3 Unit Komputer, 3 Unit Printer, 2 Unit Lap Top, 2 Unit LCD Proyektor. . <p>Prosentase capaian keuangan 94,23 % dan prosentase capaian kinerja 100% Progres kerja dari skala penilaian capaian keuangan dan kinerja masuk pada penilaian 80>100 dan >100 dengan penilaian Baik dan Sangat Baik</p> <p>2 Manfaat : Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan KB</p> <p>3 Dampak : Meningkatnya kepesertaan KB CPR 68 %</p> <p>4 Permasalahan Yang di hadapi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedianya tanah yang legal untuk pengadakan saprass KB di 7 kecamatan. - Pemerintah Daerah tidak menyediakan tanah yang bersertifikat untuk membangun Balai Penyuluhan KB, Tanah yang tersedia di kel. Sambaliung sehingga pembangunan BPKB di Kelurahan Sambaliung. <p>5 Cara Pemecahan Masalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPPKBP3A Melalui Bidang Dalduk akan membuat pemetaan dan perencanaan dan usulan untuk pengadaan tanah melalui Dinas pertanahan 							

CAPAIAN KINERJA SARANA DAN PRASARANA KB TAHUN 2019

No	BELANJA	TARGET	REALISASI	DISERAHKAN KEPADA
I	Gedung Balai Penyuluhan KB	1 Unit	1 Unit	DPPKBP3A
	Bak Sampah	2 Buah	2 Buah	DPPKBP3A
	Kursi Pejabat	3 Buah	3 Buah	DPPKBP3A
	Meja Pejabat	3 Buah	3 Buah	DPPKBP3A
	Meja Rapat	6 Buah	6 Buah	DPPKBP3A
	Kursi Rapat	50 Buah	50 Buah	DPPKBP3A

	AC 1 Pk	4 Buah	4 Buah	DPPKBP3A
	Lamari Arsip	1 Buah	1 Buah	DPPKBP3A
	Rak Arsip	1 Buah	1 Buah	DPPKBP3A
2	Laptop	1 Buah	1 Buah	DPPKBP3A
3	PC	1 Buah	1 Buah	DPPKBP3A
4	Printer	1 Buah	1 Buah	DPPKBP3A
5	KIE Kit	5 Set	5 Set	PKB
6	Sarana dan	48 Set	48 Set	PKB

Tabel III.8
Program Keluarga Berencana
Bantuan Operasional KB (DAK Non Fisik 2019)

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
3	Bantuan Operasional KB (DAK Non Fisik 2019)	3.098.690.000,-	1.535.351.388,-	49,23	4 Kegiatan 390 pertemuan	4 Kegiatan 110 Pertemuan	29
<p>1. Tujuan Kegiatan : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung melalui Program KKBPK serta membangun sector terkait dalam rangka meningkatkan keluarga kecil berkualitas dengan harapan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menurunkan angka kelahiran Total Fertelity Rate (TFR) - Meningkatkan Anggak Prefelensi Pemakaian Kontrasepsi / Contacepstive prevalence rate (CPR) - Menurunkan Kebutuhan Ber KB yang tidak terpenuhi (Un Meet Need) - Menurunnya Anka Kelahiran pada Remaja - Menurunkan Angka Kehamilan yang tidak di inginkan pada wanita usia subur. <p>2. Sasaran Strategis : Masyarakat, Keluarga, PUS Strategi yang di lakukan dalam kegiatan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) - Dengan melaksanakan kegiatan Kelompok Kerja, Kampung KB, Pertemuan Forum Musyawarah Tingkat Desa, Lokakarya Mini Program KKBPK Tingkat Desa, Kecamatan di Kampung KB, Operasional Ketahanan Keluarga berbasis Kelompok Kegiatan di Kampung KB. - Menyediakan dukungan dan operasional kegiatan bagi balai penyuluh KB dalam upaya percepatan tujuan program kependudukan KB dan pembangunan keluarga. Dengan menyediakan : <ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan dana distribusi alokon di setiap fasilitas kesehatan b. Biaya dukungan operasional integrase di tingkat desa di kampung KB di 13 Kecamatan di 30 Kampung KB di tingkat Kelurahan dan Kampung. c. Dukungan Media Komunikasi informasi dan Edukasi (KIE) d. Dukungan management dana BOKB <p>3. Indkator Program/Keluaran : Terlayannya Masyarakat dalam hal ber KB target 4 Kegiatan 390 kali pertemuan. Kegiatan yang di lakukan dalam pencapaian target kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun rencana kegiatan di kampung KB di 13 Kecamatan - Melakukan koordinasidengan instansi terkait terutama Camat, Kepala Kampung dan sasaran kerja pada Pokja Kampung KB, Narasumber , Masyarakat Kampung. - Melakukan koordinasi dengan PKB dan Kader Kampung KB - Melakukan penyuluhan, Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang program KKBPK 							

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)	
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
		<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan dukungan media KIE sebagai sarana meningkatkan pengetahuan maupun pemahaman tentang program KKBPK. 						
4.	Indikator Kegiatan/Hasil : Peningkatan jangkauan pelayanan KB. Prosentase capaian keuangan 49,23 % dan prosentase capaian kinerja 28 % Progres kerja dari skala penilaian capaian keuangan dan kinerja masuk pada penilaian < 55 dengan penilaian Kurang Baik Capaian dari target kinerja :	<ul style="list-style-type: none"> - Target kegiatan pertemuan kelompok kerja di Kampung KB sebanyak 156 pertemuan capaian 55 kali pertemuan dengan prosentase 35 % - Target Kegiatan Pertemuan Musyawarah Tingkat Desa / Kecamatan sebanyak 78 Kali capaian 6 kali pertemuan dengan prosentase 7,7 % - Target Lokakarya Mini tingkat desa di Kampung KB sebanyak 78 Kali capaian 6 kali pertemuan dengan prosentase 7,7 % - Target Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan 78 pertemuan Capaian 44 Kali pertemuan dengan prosentase 56 % - Terlaksananya penyuluhan KB, Meeting / Rapat Teknis PLKB, Lokakarya Mini Tk. Desa dan Kecamatan di Kampung KB, Ketahanan Keluarga berbasis Kel. Tribina, Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB, Pembinaan program KB bagi Masyarakat oleh kader (PPKBD dab sub PPKBD), 						
5.	Dampak : Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk menjadi 75,84 %							
6.	Permasalahan Yang di hadapi :	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih rendah tingkat pemahaman masyarakat tentang Program KKBPK b. Akses menuju kampung KB yang sangat jauh dan sulit (melalui jalan yang berbatu, sungai dan lautan) c. Masih banyak kampung KB yang letak geografisnya jauh dan belum ada signal telepon seluler sehingga sulit untuk berkoordinasi melalui telepon seluler. d. Tidak tersedianya mobil Mupen sebagai sarana melakukan penyuluhan keliling maupun pemutaran film program KKBPK di masyarakat yang sulit untuk di jangkau. e. Petugas PLKB sebagai ujung tombak di lini lapangan sangat terbatas, dari 110 Kelurahan / Kampung hanya ada 16 PLKB, idealnya setiap 2 Kampung 1 PLKB. Bahkan ada 1 Kecamatan yang tidak mempunyai PLKB / PKB. 						
7.	Cara Pemecahan Masalah :	<ul style="list-style-type: none"> a. Perlu meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi program KKBPK di masyarakat melalui pemutaran Film yang tersedia di sarana Mobil MUPEN. b. Perlunya Mobil MUPEN sebagai sarana untuk media KIE dalam penyuluhan program KKBPK di kampung - kampung yang jauh dari perkotaan. c. Perlu penambahan anggarann pendampingan BOKB melalui APBD II yang akan di uslkan pada anggaran tahun 2020 d. Dilakukannya penunjukan PKB sebagai pengampu (Pembina Kampung KB) dengan meklalui Surat Penunjukan SK Kepala DPPKBP3A e. Melaskukan usulan kepada BKKBN Perwakilan Provinsi untuk penambahan tenaga PLKB 						

CAPAIAN KINERJA PEMBENTUKAN KAMPUNG KB DARI TAHUN 2016 S.D 2019

No	Kecamatan / Kampung	Nama Kampung KB	No. SK	Keterangan
1	Kec. Gunung Tabur Kampung Maluang	Kp. KB. Sakura	No. 12 Thn 2016	
2	Kec. Biatan Kampung Bitan Ilir	Kp. KB.Biatan Ilir	-No. 588 Thn 2017	
3	Kec. Tanjung Redeb Kel.Gunung Panjang	Kp. KB. Lestari	-No. 580 Thn 2017	
4	Kec. Sambaliung Kel. Sambaliung	Kp.KB.Bakarumun	-No. 581 Thn 2017	

5	Kec. P.Derawan Kamp.Tlk.Semanting	Kp.KB.Mangrove	-No. 582 Thn 2017	
6	Kec. Kelay 8. Kamp.Long Beliu	Kp.KB. Sejahtera	-No. 579 Thn 2017	
7	Kec. Segah Kamp.MudipBangen	Kp.KB. Mudip Bangen	-No. 578 Thn 2017	
8	Kec. Biduk - Biduk Kamp.tl.Sulaiman	Kp.KB.Mahligai Bahagia	-No. 577 Thn 2017	
9	Kec. Batu Putih Kamp.Tembudan	Kp.KB,Batu Lungkup	-No. 576 Thn 2017	
10	Kec. Talisayan Kamp.Sumber Mulia	Kp.KB.Estining Manah	-No. 575 Thn 2017	
11	Kec. Tabalar Kamp.Tabalar Muara	Kp.KB.Rantau Tarik	-No. 574 Thn 2017	
12	Kec. Gunung Tabur Kamp.Pulau Besing	Kp.KB. Bangsawan	-No. 573 Thn 2017	
13	Kec. Teluk Bayur -Kamp.Labanan Jaya	Kp.KB. Lbn,Jy,Bersahaja	-No. 572 Thn 2017	
14	Kec. Biatan Kampung Bitan ulu	Kp.KB. Danum Pia	SK dalam Proses	Di bentuk th 2018
15	Kec. Sambaliun Kamp.Sukan Tengah	Kp.KB. Amanah	SK dalam Proses	Di bentuk th 2018
16	Kec. P.Derawan Kamp, Batumbuk	Kp.KB. Smart	SK dalam Proses	Di bentuk th 2018
17	Kec. Kelay Kamp. Muara Lesan	Kp.KB.Mudip Mading Harapan Baru	SK dalam Proses	Di bentuk th 2018
18	Kec. Segah Kamp.Siduung Indah	Kp.KB. Ncamta	SK dalam Proses	Di bentuk th 2018
19	Kec. Biduk-Biduk Kamp. Sumbang	Kp.KB. Tiga Bidadari	SK dalam Proses	Di bentuk th 2018
20	Kec. Batu Putih Kamp.Balikukup	Kp.KB. Nusa Daing	SK dalam Proses	Di bentuk th 2018
21	Kec. Talisayan Kamp. Purnasari	Kp.KB. Mekar Sari	SK dalam Proses	Di bentuk th 2018
22	Kec. Tabalar Kamp,Harapan Maju	Kp.KB. Sawit Perkasa	SK dalam Proses	Di bentuk th 2018
23	Kec. Gunung Tabur Kamp. Melati Jaya	Kp.KB. Melati Sejahtera	SK dalam Proses	Di bentuk th 2018
24	Kec. Segah Kamp. Batu Rajang	Kp. KB. Mudip Saeq	SK dalam Proses	Di bentuk th 2018
25	Kec. Teluk Bayur Kamp.Tumbit Melayu	Kp.KB. Indanta	SK dalam Proses	Di bentuk th 2018
26	Kec. Maratua Kamp. Teluk Alulu	Kp. KB. Kecil Bahagia	SK dalam Proses	Di bentuk th 2019
27	Kec. Gunung Tabur Kamp. Birang	Kp. KB. Bahtera	SK dalam Proses	Di bentuk th 2019
28	Kec. Tanjung Redeb Kel. Gayam	Kp. KB. Puri Kencana	SK dalam Proses	Di bentuk th 2019
29	Kec. Tanjung Redeb Kel. Karang Ambun	Kp. KB. Sanggam Kula	SK dalam Proses	Di bentuk th 2019
30	Kec. Teluk Bayur Kamp. Labanan	Kp. KB. Labanan Makmur Sejahter.	SK dalam Proses	Di bentuk th 2019

Tabel III.9
Program Keluarga Berencana
Pendampingan DAK BOKB dan DAK FISIK

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
4	Pendampingan DAK BOKB dan DAK Fisik	180.000.000,-	167.490.001,-	93,05	13 Kecamatan	13 Kecamatan	100
<p>1. Tujuan Kegiatan : Mendukung terlaksananya kegiatan DAK BO KB dan DAK Fisik</p> <p>2. Sasaran Strategis : Masyarakat, Keluarga, PUS</p> <p>3. Indikator Program/Keluaran : Terdukungnya kegiatan DAK BO KB dan DAK Fisik di Kecamatan Target 13 Kecamatan.</p> <p>Kegiatan yang di lakukan dalam pencapaian target kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun rencana kegiatan di 30 kampung KB di 13 Kecamatan - Melakukan Monitoring dan Evaluasi di 30 Kampung KB di 13 Kecamatan <p>4. Indikator Kegiatan/Hasil : Terlaksananya dukungan pendampingan DAK BO KB dan DAK Fisik di 13 Kecamatan. Prosentase capaian keuangan 93,05% dan prosentase capaian kinerja 100% Progres kerja dari skala penilaian capaian keuangan dan kinerja masuk pada penilaian 80>100 dan >100 dengan penilaian Baik dan Sangat Baik</p> <p>5. Dampak : Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk</p> <p>6. Permasalahan Yang di hadapi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya anggaran pendampingan untuk biaya operasional perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah yang akan di gunakan untuk kegiatan menghadiri undangan, pertandingan dan konsultasi dan koordinasi ke BKKBN perwakilan provinsi Kalimantan Timur dan BKKBN Pusat. b. Biaya Transportasi Darat dan Laut yang masih kurang sehingga kegiatan di Kampung KB untuk tahun 2019 dari 24 kali pertemuan hanya di laksanakan 6 kali pertemuan. <p>9. Cara Pemecahan Masalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Di rencanakan untuk tahun 2020 melalui dana APBD akan menaikkan dana pendampingan sebesar 5 % dari Dana DAK Bo KB tahun 2020. b. Rencana usulan dana pendampingan untuk mendukung maksimalnya pelaksanaan kegiatan tersebut dengan usulan anggaran sebesar Rp. 118.400.000,- 							

Tabel III.10
Program Keluarga Berencana
Sosialisasi / Pelatihan Jaminan Pelayanan KB bagi Klinik KB, dr, Praktek & Bidan Praktek

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Reallsasi		Target	Realisasi	
5	Sosialisasi / Pelatihan Jaminan Pelayanan KB bagi Klinik KB, dr, Praktek dan Bidan Praktek	175.000.000,-	170.771.359,- [√]	97,58	15 orang	15 Orang	100

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
	<p>1. Tujuan Kegiatan : Meningkatkan akses layanan KB Meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas petugas pemberi pelayanan KB b. Meningkatkan jumlah Akseptor KB khususnya peserta PUS yang ikut KB MKJP c. Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk <p>2. Sasaran Strategis :</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Sasaran kegiatan pelatihan CTU kepada Bidan Praktek, dr. Praktek, Bidan PNS d. Strategi yang di lakukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan peserta latih yaitu Bidang klinik KB yang belum pernah mengikuti pelatihan CTU. - Penyediaan Narasumber yang berasal dari P2KS Provinsi Kalimantan Timur. - Penentuan jadwal dan tempat kegiatan. - Penyediaan bahan daan alat yang di butuhkan dalam pelatihan CTU, - Penyediaan calon akseptor KB yang akan di layani oleh peserta latih sebagai persyaratan untuk mendapatkan Sertivikat Pelatihan CTU. <p>3. Indikator Program/Keluaran : Jumlah petugas klinik KB dan Faskes yang mengikuti pelatiahn. : Capaian dari target Kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Target Kinerja yang di tetapkan sebanyak 15 Orang - Capaian Kinerja sebanyak 15 orang Bidan terlatih dan bersertifikat 15 orang (100%) <p>Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun rencana kerja pelatihan CTU - Melakukan koordinasi dengan Bidang Latbang dan Bidang KB&KS di BKKBN perwakilan Kaltim tentang rencana pelatihan CTU - Melakukan koordinasi ke P2KS Provinsi Kaltim berkenaan dengan permintaan Narasumber Pelatihan CTU - Menghubungi Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas untuk meminta data data bidan yang akan mengikuti pelatihan CTU - Mempersiapkan jadwal dan tempat kegiatan termasuk tempat melakukan praktek pemasangan danpencabutan IUD dan Inplant. - Melaksanakan kegiatan pelatihan sesuai dengan jadwal dalam kerangka acuan. <p>4. Indikator Kegiatan/Hasil : Prosentase Pemakaian Kontrasepsi KB (CPR) 75,84 Prosentase capaian keuangan 97,58% dan prosentase capaian kinerja 100% Progres kerja dari skala penilaian capaian keuangan dan kinerja masuk pada penilaianan 80>100 dan >100 dengan penilaian Baik dan Sangat Baik</p> <p>5. Dampak : Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk</p> <p>6. Permasalahan Yang di hadapi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan CTU untuk pemasngan dan pencabutan IUD dan Inplant hanya 1 kelas (15 orang) sehingga peserta hanya Bidan PNS. - Keterbatasan anggaran sehingga pembayaran honor narasumber masih di bawah standar perjamnya. - Belum tersedianya bahan / model praktek yaitu Phantom yang di butuhkan untuk menerapkan teori CTU (pemasangan dan pencabutan Implant) - Penyediaan ATK dan Foto Copy kegiatan pelatihan CTU masih terbatas sehingga biaya penggandaan buku juknis pelatihan di bebankan kepada peserta pelatihan. <p>7. Tindak lanjut dalam mengatasi permasalahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengajukan penambahan anggaran untuk pelatihan CTU yang memungkinkan untuk 2 kelas (30 Orang) sehingga bidan PTT juga bisa diikutkan pelatihan CTU - Menganggarkan Honor Narasumber pelatihan CTU sesuai dengan standar - Menyiapkan bahan / model praktek untuk CTU - Menganggarkan ATK dan biaya penggandaan yang memadai untuk buku juknis pelatihan CTU 						

**CAPAIAN KINERJA SOSIALISASI / PELATIHAN JAMINAN PELAYANAN KB BAGI
KLINIK KB, dr. PRAKTEK DAN BIDAN PRAKTEK TAHUN 2019**

No	NAMA PESERTA	KECAMATAN	No. Sertifikat	Keterangan
1	Ramlah Rahim, Amd. Keb.	Puskesmas Kelay	3963/18.00/STFT /CSP-TKT/1500W -11-12/IV/19	JNPK-KR bekerja sama dgn PPKS Kaltim dan DPPKBP3A
2	Sugesi, Amd. Keb	RSUD Tanjung Redeb	3959/18.00/STFT /CSP-TKT/1500W -11-12/IV/19	
3	Risma Asmari, Amd. Keb	Puskesmas Tanjung Batu	3965/18.00/STFT /CSP-TKT/1500W -11-12/IV/19	
4	Marlina, Amd. Keb	Puskesmas Bugis	3962/18.00/STFT /CSP-TKT/1500W -11-12/IV/19	
5	Sari Lamma, Amd. Keb	Puskesmas Talisayan	3960/18.00/STFT /CSP-TKT/1500W -11-12/IV/19	
6	Halija, Amd. Keb	Puskesmas Tabalar	3957/18.00/STFT /CSP-TKT/1500W -11-12/IV/19	
7	Rika Suswati, A.Md. Keb	Puskesmas Biatan	3967/18.00/STFT /CSP-TKT/1500W -11-12/IV/19	
8	Vivin Eka Febriani, Amd. Keb	Puskesmas Gunung Tabur	3958/18.00/STFT /CSP-TKT/1500W -11-12/IV/19	
9	Eka Rahmawati, Amd. Keb	Puskesmas Maratua	3961/18.00/STFT /CSP-TKT/1500W -11-12/IV/19	
10	Anita Andayani, Amd. Keb	Puskesmas Biduk - Biduk	3964/18.00/STFT /CSP-TKT/1500W -11-12/IV/19	
11	Vicha Rumengan, Amd. Keb	Puskesmas Segah	3966/18.00/STFT /CSP-TKT/1500W -11-12/IV/19	
12	Yenny Gustia, Amd. Keb	Puskesmas Suaran	3955/18.00/STFT /CSP-TKT/1500W -11-12/IV/19	
13	Norhasanah, Amd. Keb	Puskesmas Tanjung Redeb	3953/18.00/STFT /CSP-TKT/1500W -11-12/IV/19	
14	Sri Umi Kalsum, Amd. Keb	Puskesmas Teluk Bayur	3954/18.00/STFT /CSP-TKT/1500W -11-12/IV/19	
15	Helensia, Amd. Keb	Puskesmas Pulau Derawan	3956/18.00/STFT /CSP-TKT/1500W -11-12/IV/19	

1.3 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Tabel III.11
Program Kesehatan Reproduksi 2019

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Pembinaan PIK Remaja / Mahasiswa di Kab. Berau	233.956.000,-	219.717.924,-	93,91	35 Kelompok	35 Kelompok	100
<p>1. Tujuan Kegiatan : Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan remaja melalui wadah PIK Remaja tentang bahayanya TRIAD KRR dan meningkatkan kualitas keluarga.</p> <p>2. Sasaran Strategis : Siswa SMP/SMA dan Mahasiswa dan Remaja yang belum menikah dan belum menjadi Anggota PIK Remaja di Kabupaten Berau</p> <p>3. Indikator Program/Keluaran : Terlaksananya pembentukan , pembinaan dan evaluasi PIK R di Kabupaten Berau Target 35 Kelompok.</p> <p>Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi ke sekolah – sekolah - Melakukan pembinaan melalui Jambore paada kelompok PIK R - Melakukan pendekatan pada remaja - Melakukan pendekatan kepada sekolah – sekolah melalui guru BK selaku Pembina PIK R di sekolah. - Melakukan evaluasi kepada kelompo PIK yang sudah di bentuk - Meningkatkan komunikasi kepada ketua PIK R mengenai perkembangan kelompok PIK R. <p>4. Indikator Kegiatan/Hasil : Terlaksananya pembinaan di 35 kelompok PIK R.</p> <p>Prosentase capaian keuangan 93,91% dan prosentase capaian kinerja 100% Progres kerja dari skala penilaian capaian keuangan dan kinerja masuk pada penilaianan 80>100 dan >100 dengan penilaian Baik dan Sangat Baik</p> <p>Melalui kegiatan Jambore dan Melakukan Sosialisasi dengan mengunjungi kelompok PIK R jalur masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bertambahnya wawasan wawasan dan pengetahuan keterampilan dan kemampuan dalam mengelola PIK di sekolah / di kampus. - Menyebarkan informasi program KB dan pembangunan keluarga khususnya memberi konseling tentang Triad KRR tiga resiko yang di hadapi oleh remaja yaitu resiko yang berkaitan dengan seksual, Napza dan HIV AIDS kepada remaja / mahasiswa - Wadah program GENRE yang di kelola oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaj / mahasiswa serta kegiatan penunjang lainnya. - Untuk menarik minat remaja untuk aktif berperan serta dalam PIK R?M. <p>5. Dampak : Terbentuknya prilaku remaja yang sehat, berkualitas, cerdas dan ceria serta Mengurangi Kenakan remaja TRIAD KKR (Pernikahan Dini, Sek Pranikah dan Napza)</p> <p>6. Permasalahan Yang di hadapi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya pemahaman remaja tentang bahaya TRIAD KRR - Masih kurangnya pengetahuan orang tua dalam mendidik anak remajanya sehingga masih ada terjadi pernikahan di bawah umur. - Pembinaan kelompok PIK R di Kecamatan belum maksimal dari 13 kecamatan tahun 2019 baru di lakukan di 4 Kecamatan di karenakan keterbatasan anggaran. - Belum tersedianya data pilah remaja - Kelompok PIK R yang sudah di bentuk tidak memiliki dana operasional sehingga terbatasnya melaksanakan kegiatan di kelompok – kelompok secara mandiri.. <p>7. Cara Pemecahan Masalah :</p>							

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)	
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
		<ul style="list-style-type: none"> - Perlu dilakukannya pembinaan dengan sosialisasi kepada remaja tentang baha TRIAD KRR secara kontinyu melalui kelompok - kelompok PIK R yang sudah di bentuk. - Perlu di adakannya kegiatan sosialisasi kepada orang tua remaja melalui Bina Keluarga Remaja (BKR) - Melakukan usulan anggaran dengan menambah sasaran kelompok PIK R di 9 Kecamatan . - Melakukan pendataan jumlah remaja dan kasusus remaja dengan bekerjasama kepada instansi - instansi terkait. - Mengusulkan dana dukungan operasional PIK R kepada Tim Panggar tahun 2020. 						

**CAPAIAN KINERJA PEMBINAAN PIK R MELALUI JAMBORE
DI KABUPATEN BERAU TAHUN 2019**

No.	Data PIK					
	Nm.Kel.PIK	Nm.Sekolah	Jml.Anggota Yang mengikuti	TGL/No.SK	Ms.Berlaku	Ket.(Draf/Proses/SK)
1	KORPS	SMAN 1 BERAU	4	15 Nov 2018/ 363/SMAN1-BERAU/XI/2018	2019	
2	RAINBOW	SMAN 2 BERAU	3	27 Okt 2018/ 800/49/SMAN2-BR/III/2018	2019	
3	SAGET	SMAN 3 BERAU	2	15 Okt 2018/ 422/247/SMAN3-BERAU/X/2018	2019	
4	PURI	SMAN 4 BERAU	4	21 Mar 2017/ 421/107/SMAN4/III/2017	2018	
5	BANUA	SMAN 5 BERAU	3	22 Feb 2018/ 129/SMAN5/II/2018	2019	
6	KARUNA	SMAN 6 BERAU	3			Draf
7	R4B	SMAN 7 BERAU	3	15 Nov 2018/ 421.7/707/SMAN7/XI/2018	2019	
8	KRESIRAU	SMAN 8 BERAU	3			Krm Draf
9	TURTLE	SMAN 9 BERAU	2			Draf
10	PIK REMAJA SMAN 10	SMAN 10 BERAU	2	16 Nov 2018/ 422/186/SMAN10-KESIS/XI/2018	2019	
11	GERANA	SMAN 12 BERAU	4	15 Nov 2018/ 421.6/415/SMAN12/XI2018	2019	
12	GEMASI BULIR	SMAN 14 BERAU	3	20 Okt 2018/ 422/137/SMAN14/X/2018	2019	
13	TAJDID	MAN BERAU	4			Krm Draf
14	PRIMA	SMA PGRI BERAU	4			Krm Draf
15	IKHLAS	SMA MUHAMMADIYAH BERAU	3			Belum Krm Draf & SK

16	SURYA	SMKN 1 BERAU	4	15 Sep 2018/ 016/BPH-SURYA/SMKN1/IX/2018	2019	
17	TIGER	SMKN 2 BERAU	3			Krm Draf
18	SMART	SMKN 3 BERAU	2	5 Nov 2018/ 421.5/327/SMKN3- TR/XI/2018	2019	
19	HANURJA	SMKN 4 BERAU	2	7 Nov 2018/ 422/132/SMKN4- BR/XI/2018	2019	
20	PIK REMAJA SMKN 5	SMKN 5 BERAU	2	31 Okt 2018/ 201/VI- SMKN5/2018	2019	
21	PIK REMAJA SMKN 7	SMKN 7 BERAU	2	1 Nov 2018/ 422/103/SMKN7- BERAU/XI/2018	2019	
22	HCL	SMK SEHAT PERSADA BERAU	3	3 Sep 2018/ 421.5/SMK- SPS/BRU/XI/2018	2019	
23	FARMASI AL FALAAH QUEEN	SMK AL-FALAH QUEEN BERAU	2	1 Okt 2018/ 003/SK-MK- AFQ/X/2018	2019	
24	CAHAYA	SMK MA'ARIF BERAU	3			Belum Krm Draf & SK
25	CRANIUM	SMPN 1 TG.REDEB	3			Belum Krm Draf & SK
26	SINAR	SMPN 2 TG.REDEB	4	6 Agt 2018/ 422.1/220/I- SMPN 2/VII/2018	2019	
27	Raja CS	SMPN Tg. Redeb	3			Belum Krm Draf & SK
28	MUTIARA	SMPN 4 TG.REDEB	3			Krm Draf
29	ORION	SMPN 5 TG.REDEB	3	15 Nov 2018/ 800/523/I- SMPN5/XI/2018	2019	
30	SAGITARIUS	SMP N 1 Sambaliung	4	20 Feb 2018/427/058/III- SMPN1SBL/II/2018	2019	
31	ASTER	MTSN TG.REDEB	4			Baru Krm Draf
32	BARINTAK	PIK REMAJA BARINTAK	4	2 Jan 2018/ 479.2/07/Bid- KKK/I/TAHUN 2018	2019	
33	TUNAS ABADI	PIK REMAJA MALUANG	2	27 Sep 2018/ 32 TAHUN 2018	2019	

**CAPAIAN KINERJA PEMBINAAN PIK /R MELALUI SOSIALISASI
KUNJUNGAN Ke SEKOLAH DI KABUPATEN BERAU TAHUN 2019**

No.	Data PIK		
	Nama Kelompok PIK	Jml.Anggota Yang mengikuti	Kegiatan Pembinaan
1	Tajdid	30 Orang	Sosialisasi PKBR dan Pengelolaan Sosmed PIK R
2	Surya	30 Orang	Sosialisasi PKBR dan Pengelolaan

			Sosmed PIK R
3	Sagitarius	30 Orang	Sosialisasi PKBR dan Pengelolaan Sosmed PIK R
4	Rainbow	30 Orang	Sosialisasi PKBR dan Pengelolaan Sosmed PIK R

1.6 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Tabel III.12
Program Penguatan Kelembagaan PUG
Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A)	775.770.000,-	719.656.870,-	92,77	100	100	100

1. Tujuan Kegiatan : Meningkatkan intensitas kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam pembangunan.
Dengan Melalui :
 - Meningkatkan hak perlindungan perempuan dan anak
 - Terlayani kasus kekerasan terhadap perempuan dan yang terlapor ke P2TP2A
 - Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aktivis PATBM tentang perlindungan Anak
 - Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anak tentang Sex Education
 - Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada anak tentang bagaimana melindungi diri sendiri.
 - Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman orang tentang pendidikan sex bagi anak dan remaja
2. Sasaran Strategis : Perempuan dan anak, Aktivis PATBM, Anak SD kelas 4 s/d 6, serta orang tua anak.
3. Indikator Program/Keluaran : Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang datang ke P2TP2A. target 100%
Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja :
 - Melakukan penguatan Aktivis PATBM, yaitu aktivis kampung maluung, teluk alulu
 - Pembentukan dan Pelatihan aktivis PATBM Pulau Derawan
 - Pendampingan desa wisata ramah anak bebas eksploitasi di Kampung Pulau Derawan yang difasilitasi Kementerian PPPA
 - Parenting Sex Education For Kids bagi orang tua anak SD kelas 4 sampai kelas 6 Kampung Maluang selama 2 kali pertemuan
 - Parenting Education For Kids di Kampung Pulau Derawan
 - Parenting Education For Kids Kecamatan Maratua
 - Pelatihan Sex Education For Kids bagi Fasilitator Anak Kampung Maluang dan Kabupaten.
 - Pelatihan Sex Education For Kids bagi anak SDN untuk kelas 4 sampai kelas 6 SDN 001 Maluang selama 4 kali pertemuan.
 - Koordinasi dan assisment orang tua dan anak di Areal Perusahaan PT. Hutan Hijau Mas Kecamatan Segah Kampung Gunung Sari.

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kapasitas SDM bagi tenaga Psikolog, Tenaga Pendamping Hukum dan Tenaga Pendamping ABK, di Luar Daerah (Banjarmasin, Surabaya dan Sanmarinda) - Study Pembelajaran UPT PPA di Kabupaten Sleman Jogjakarta. 						
4.	<p>Indikator Kegiatan/Hasil : Presentase Lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak (Pusat Layanan Terpadu). 100%</p> <p>Prosentase capaian keuangan 92,77% dan prosentase capaian kinerja 100% Progres kerja dari skala penilaian capaian keuangan dan kinerja masuk pada penilaianan 80>100 dan >100 dengan penilaian Baik dan Sangat Baik</p> <p>Capaian target kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penagan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dating ke P2TP2A sebanyak 67 kasus terlayani 67 kasus Prosentase 100% - Penguatan Aktivis PATBM target 20 Aktivis yaitu aktivis Kampung Maluang dan Kampung Teluk Alulu Prosentase 100% - Pembentukan dan pelatihan Aktivis PATBM Kampung Pulau derawan target 10 Aktivis realisasi 13 Aktivis Prosentase 103 % - Parenting Sex Education For Kids bagi orang tua anak usia SD kelas 4 s.d 6 di kampung Maluang, Kampung maratua paying – paying dan kampung pulau derawan target 3 kampung Prosentase 100% - Pelatihan Sex Education For Kids bagi Fasilitator Anak Kampung Maluang dan Kabupaten Targrt 20 orang realisasi 100% - Pelatihan Sex Education For Kids bagi anak SDN untuk kelas 4 sampai kelas 6 SDN 001 Maluang selama 4 kali pertemuan target 82 orang realisasi 100% - Koordinasi dan assisment orang tua dan anak di Areal Perusahaan PT. Hutan Hijau Mas Kecamatan Segah Kampung Gunung Sari. Target 15 orang anak usia SD kelas 4 s.d 6 dan 15 orang tua anak, Realisasi 100% - Peningkatan Kapasitas SDM bagi tenaga Psikolog, Tenaga Pendamping Hukum dan Tenaga Pendamping ABK, di Luar Daerah (Banjarmasin, Surabaya dan Sanmarinda) Realisasi 100% - Study Pembelajaran UPT PPA di Kabupaten Sleman Jogjakarta. Realisasi 100% 						
5.	<p>Dampak : Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak di kabupaten berau</p>						
6.	<p>Permasalahan Yang di hadapi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak semua masyarakat yang mengalami kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mau melaporkan ke P2TP2A, di karenakan masyarakat masih beranggapan bahwa melaporkan kasus berarti membuka aib keluarga - Dalm melaksnakan kegiatan parenting Sex Education For Kids bagi orang tua murid SD kelas 4 s.d 6 , tingkat kehadiran orang tua masih kurang, di karenakan orang tua menganggap Sex Education hanya di berikan kepada orang dewasa. - Beberapa PATBM yang di bentuk belum melaksanakan fungsinya secara maksimal di karenakan keterbatasan anggaran. 						
7.	<p>Cara Pemecahan Masalah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Gerakan pencegahan kekerasan perempuan dan anak lewat aktivis PATBM yang sudah di bentuk di Kelurahan dan Kampung – kampung. - Penambahan tenaga konselor melalui APBD tahun 2020 - Peningkatan Kapasitas SDM layanan, Aktivis PATBM dan Tenaga Pendamping ABK melalui FPABK - Mengupayakan dan memperbanyak kegiatan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kampung sampai RT yang rawan terhadap kejahatan seksual anak. 						

**CAPAIAN KASUS YANG TERLAPOR DI P2TP2A DAN YANG DITANGANI
TAHUN 2019**

NO	JENIS KASUS	KASUS TERLAPORKAN	KASUS DI TANGANI	PENANGATAN KASUS
1.	KDRT	1	1	Agts-Des 2019
2.	Kekerasan Seksual	19	19	Jan-Des 2019
3.	Penelantaran	2	2	Sept-Des 2019
4.	Kekerasan Masa Pacaran	2	2	Febr-Des 2019
5.	Hak Asuh Anak	7	7	Febr-Des 2019
6.	Penculikan	0	0	-
7.	Kekerasan Pada Anak	4	4	Maret-Des 2019
8.	Perselingkuhan	0	0	-
9.	Penganiayaan / Kekerasan Publik	3	3	Febr-Des 2019
10.	Perdagangan Orang (TPPO)	1	1	Sept-Des 2019
11.	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	12	12	Jan-Des 2019
12.	Lain - lain	16	16	Jan-Des 2019
JUMLAH		67	67	Jan - Des 2019

**Tabel III.13
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
Kegiatan pelatihan dan Road Show PUG melalui PPRG**

No	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
2	Pelatihan dan Road Show PUG melalui PPRG	100.000.000,-	90.860.700,-	90,86	20 OPD	20 OPD	100
<p>1. Tujuan Kegiatan : Meningkatkan Intensitas Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pembangunan</p> <p>2. Sasaran Strategis : Organisasi Perangkat daerah (OPD).</p> <p>3. Indikator Program/Keluaran : Jumlah OPD yang mengikuti pelatihan , Bimtek PUG melalui PPRG target 20 OPD. Kegiatan yang di lakukan dalam pencapaian target kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Pelatihan PUG melalui PPRG dengan mengundang 20 OPD untuk mengikuti pelatihan - Melakukan Road Show / Jemput Bola ke 20 OPD yang sudah mengikuti pelatihan PUG dan mengevaluasi sampai sejauh mana pemahaman OPD tentang PUG <p>4. Indikator Kegiatan/Hasil : OPD yang memahami PUG Capaian 20 OPD Persentase 100% Prosentase capaian keuangan 90,86 % dan prosentase capaian kinerja 100% Progres kerja dari skala penilaian capaian keuangan dan kinerja masuk pada penilaian 80>100 dan >100 dengan penilaian Baik dan Sangat Baik</p> <p>Capaian target kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan dilaksanakan satu hari dan peserta pelatihan sebanyak 20 OPD masing- masing OPD di wakili 2 orang peserta, - Road Show dilaksanakan dengan tim dari DPPKBP3A mendatangi ke 20 OPD dan melakukan sosialisasi secara langsung kepada OPD terkait masing masing peserta sekretaris, Kabid, penyusunan program dan staf program. 							

No	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)	
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
5.	Dampak : Meningkatnya komitmen pemerintah dalam mewujudkan PPRG							
6.	Permasalahan Yang di hadapi :							
	a. Fungsi dari Kelompok Kerja (Pokja) PUG yang belum optimal							
	b. Fungsi dari Driver PUG yang belum Optimal							
	c. Pelatihan PUG Melalui PPRG di lihat dari waktu pelaksanaan kurang maksimal pelaksanaan hanya 1 hari yang seharusnya pelatihan maksimal 2 hari.							
	d. Peserta Pelatihan dari 20 OPD yang di undang dari masing - masing OPD 2 orang peserta yang di harapkan peserta adalah Kasubag penyusunan program dan sekretaris namun yang hadir hanya Kasubag penyusunan program di karenakan antusias dari OPD masih kurang di anggap kegiatan PUG tidak penting.							
	e. Terbatasnya Nara Sumber dan kurangnya waktu sehingga tidak maksimal dalam pemberian contoh - contoh pembuatan GAP dan GBS .							
	f. Road Show PUG melalui PPRP dengan melakukan kunjungan langsung ke 20 OPD waktu pelaksanaan cukup memadai namun tidak semua kabid atau kasi dapat mengikuti pertemuan di karenakan adanya kesibukan lain .							
	g. Peserta Road Show di harapkan seluruh Eselon III dan IV pada kenyataannya OPD juga belum respon positif atas kegiatan tersebut.							
	h. Dilihat dari kunjungan ke 20 OPD dan kegiatan yang sudah di laksanakan pada prakteknya sudah banyak OPD sudah mempunyai hasil kerja yang responsive gender namun hal tersebut belum tergambar di dalam perencanaan penganggarannya hal tersebut dapat di lihat dari Indikator Keluaran (Output) nya							
7.	Cara Pemecahan Masalah :							
	a, Kelompok kerja PUG yang telah di bentuk untuk lebih optimalnya perlu adanya penjadwalan atau di agendakan pada tahun mendatang pertemuan kelompok kerja setiap tiga bulan sekali untuk menotoring dan evaluasi atas PUG melalui PPRG di semua OPD.							
	b. Perlu di lakukannya Peningkatan SDA kepada Tim Driver dalam upaya pendampingan bagi OPD dalam peningkatan PUG melalui PPRG.							
	c. Dalam membuat kegiatan di wajibkan semua OPD membuat kerangka acuan (KAK) / Term of Reference (TOR) hal tersebut upaya membuat gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan di laksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing - masing OPD.							
	d. Tahun 2020 akan di upayakan penganggaran kegiatan pelatihan peningkatan PUG dengan waktu pelatihan bagi OPD di maksimalkan 2 (dua) hari sehingga peserta pelatihan lebih maksimal dalam pemahaman PUG melalui PPRG.							
	e.. DPPKBP3A akan terus melakukan sosialisasi dan pelatihan yang mengharapakan semua OPD di Kabupaten berau paham bahwa PUG melalui PPRP bukan saja menjadi tanggung jawab DPPKBP3A tetapi menjadi komitmen OPD untuk melaksnakan PUG melalui PPRG dengan menjalankan fungsi Fokal Point yang ada di OPD masing masing.							
	f. OPD setiap tahun dapat membuat GAP dan GBS dalam melaksnakan semua kegiatan yang ada di OPD							

No	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
dan akan di monev oleh Tim Driver Kabupaten.							

Data Pilah OPD Peserta Road Show PUG melalui PPRG Menurut Jenis Kelamin
(Sumber Data DPPKBP3A) tahun 2019

No.	OPD	PESERTA			%	
		Jumlah	L	P	L	P
01.	DPPKBP3A	25	7	18	28	72
02.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3	1	2	33	67
03.	Dinas Sosial	4	3	1	75	25
04.	Dinas Perikanan	4	1	3	25	75
05.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2	2	-	100	-
06.	Dinas Kesehatan	5	2	3	40	60
07.	Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi	4	2	2	50	50
08.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	-	100	-
09.	Dinas Pendidikan	8	6	2	75	25
10.	Dinas PU dan Penataan Ruang	1	1	-	100	-
11.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2	2	-	100	-
12.	Dinas Perhubungan	3	3	-	100	-
13.	Dinas Koperindak	5	4	1	80	20
14.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4	3	1	75	25
15.	Dinas Pemuda dan Olahraga	3	3	-	100	-
16.	Dinas Pertanian dan Peternakan	1	-	1	-	100
17.	Dinas Perkebunan	3	1	2	33	67
18.	Baadan Pendapatan Daerah	2	2	-	100	-
19.	Badan Penganggaran Keuangan dan Aset Daerah	1	-	1	-	100
20.	Baplitbang	2	2	-	100	-
JUMLAH		84	47	37	56	44

Data Jumlah OPD yang mengikuti Pelatihan dan Road Show PUG melalui PPRG
(Sumber Data DPPKBP3A) tahun 2019

No.	OPD	Jumlah OPD					
		PELATIHAN			ROAD SHOW		
		IKUT	TIDAK	%	IKUT	TIDAK	%
01.	47	20	27	42,6	20	27	42,6

vData Hasil Pelatihan dan Road Show PUG melalui PPRG yang di harapkan
(Sumber Data OPD Terkait)

No.	OPD	DATA HASIL KEGIATAN				
		SK FOCAL POINT	DATA PILAH OPD	GAP	GBS	RKA
01.	DPPKBP3A	√	√	√	√	√
02.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	√	√	√	√	√
03.	Dinas Sosial	√	√	√	√	√
04.	Dinas Perikanan	√	√	√	√	√
05.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	√	√	√	√	√
06.	Dinas Kesehatan			√	√	√
07.	Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi	√	√	√	√	√
08.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	√	√	√	√	√
09.	Dinas Pendidikan	√	√	√	√	√
10.	Dinas PU dan Penataan Ruang	√	√	√	√	√
11.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	√	√	√	√	√
12.	Dinas Perhubungan	√	√	√	√	
13.	Dinas Koperindak	√	√	√	√	
14.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	√	√	√	√	√
15.	Dinas Pemuda dan Olahraga	√	√	√	√	√
16.	Dinas Pertanian dan Peternakan	√	√	√	√	√
17.	Dinas Perkebunan	√	√	√	√	√
18.	Baadan Pendapatan Daerah	√	√	√	√	√
19.	Badan Penganggaran Keuangan dan Aset Daerah					
20.	Baplitbang					
Jumlah						

Tabel III.14
Program Penguatan Kelembagaan PUG
Kegiatan Kabupaten Layak Anak (KLA)

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
3	Kabupaten Kota Layak Anak (KLA)	400.000.000,-	345.504.295,-	88,63	Madya 650 skoring	Pratama > 600 Skoring	92,31
1. Tujuan Kegiatan : Mewujudkan Berau Menuju Kabupaten Layak Anak (KLA) 2. Sasaran Strategis : OPD terkait, LSM, Dunia Usaha, Media dan Forum Anak 3. Indikator Program/Keluaran : Jumlah Scoring yang di peroleh, Target Madya skoring 650 Kegiatan yang di lakukan dalam pencapaian target kinerja : <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan rapat koordinasi Gugus tugas - Pembelajaran ke Kabupaten Sleman untuk SRA dan PRA - Sosialisasi Sekolah Ramah Anak ke Dinas Pendidikan 							

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Sekolah Ramah Anak di Kecamatan Tanjung Redeb - Sosialisasi Sekolah Ramah Anak di Kecamatan Sambaliung - Sosialisasi Sekolah Ramah Anak di Kecamatan Gunung Tabur - Sosialisasi Sekolah Ramah Anak di Kecamatan Teluk Bayur - Pelatihan Konvensi Hak Anak - Sosialisasi APSAI (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia) 						
	<p>4. Indikator Kegiatan/Hasil : Peningkatan dalam Kota Layak Anak (KLA) Realisasi Pratama Skoring > 600. Prosentase capaian keuangan 88,63 % dan prosentase capaian kinerja 92,31 % Progres kerja dari skala penilaian capaian keuangan dan kinerja masuk pada penilaian 80>100 dan >100 dengan penilaian Baik dan Sangat Baik</p> <p>2. Dampak : Kabupaten Berau dapat menjadi Kabupaten Layak Anak..</p> <p>3. Permasalahan Yang di hadapi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perda yang ada belum mencakup 5 Klaster dari 24 Indikator KLA - Gugus Tugas KLA belum terkoordinasi dengan maksimal - RAD KLA belum terkoordinasi dengan maksima; - Profil anak belum sesuai dengan yang di inginkan - Kelana baru 1 dari 13 Kecamatan - Dekala baru 2 dari 109 Kelurahan / Kampung - PATBM ada 43 dari 109 Kelurahan / Kampung - Lembaga masyarakat belum ada peningkatan dan belum terkoordinasi dengan baik - Dunia usaha tidak bisa mendapatkan datanyua dengan baik terkait perannya di pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak . - APSAI belum terbentuk - Mekanisme pengawasan internal di sarana – sarana public milik pemerintah belum terkoordinasi dengan baik. - FA Kabupaten 1, FA Kecamatan 13, FA Kelurahan / Kampung 8, peran dan peningkatan kapasitas mereka belum maksimal - Lembaga pengasuhan keluarga dan anak (Puspaga, LK3.BKK.BKB) belum maksimal - Belum adanya Lembaga pengasuhan alternative yang berstandarisasi dan pengawasan yang maksimal. - Koordinasi tentang PAUD HI belum maksimal - Taman yang ada belum pernah di adakan audit - Zona KTR dan pelaksanaan sanksinya belum maksimal - SRA baru 20 sekolah - Koordinasi dengan APH terkait ABH perlu di tingkatkan. - Data Teknis. <p>4. Cara Pemecahan Masalah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membuat Perda yang mencakup 5 klaster dan 24 indikator KLA - Memaksimalkan koordinasi dengan Gusus Tugas KLA di tahun 2020 - Memaksimalkan RAD KLA - Perbaikan dalam pembuatan profil anak - Pembentukan kemabali Kelana yang baru. - Pembentukan kembali Dekela yang baru - Memaksimalkan Fungsi PATBM - Meningkatkan koordinasi dengan Lembaga masyarakat - Memaksimalkan permintaan data dari Dunia Usaha terkait perannya dalam pemenuhan dan perlindungan khusus - Membentuk APSAI - Meningkatkan koordinasi terkait mekanisme pengawasan internet di sarana public - Membentuk Forum Anak di tingkat Kelurahan / Kampung - Peningkatan kualitas dan kapasitas forum anak - Memaksimalkan Lembaga pengasuhan keluarga dan anak - Memaksimalkan koordinasi tentang PAUD HI - Melaksanakan audit terhadap taman yang ada - Pelaksanaan sanksi di zona KTR 						

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan sekolah ramah anak - Memaksimalkan koordinasi dengan APH terkait ABH. 							

Tabel III.15
Program Penguatan Kelembagaan PUG
Kegiatan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PUSPAGA Berbasis Hak Anak

NO.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
4	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PUSPAGA Berbasis Hak Anak	282.784.000,-	264,345.101,-	93,48	4.000 Orang	1,653 Orang	41,33
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan Kegiatan : Meningkatkan pemahaman masyarakat / orang tua dan anak tentang ketahanan keluarga. 2. Sasaran Strategis : Masyarakat / Orang Tua, Anak Sekolah tingkat TK, SD, SMP, SMA 3. Indikator Program/Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan PUSPAGA target 4.000 orang realisasi 1.653 orang presentase 41,33 % Kegiatan yang di lakukan dalm pencapaian target kinerja <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan kegiatan sosialisasi Puspaga GO TO School ke 26 Sekolah Ramah anak b. Kegiatan Program Kelas Ibu di 3 Kecamatan c. Parenting Orang Tua ABK d. Rakor Gugus tgas TPPO di Kupang Nusa Tenggara Timur e. Study Pembelajaran Pelayanan Puspaga di Kabupaten Sleman Yogyakarta f. Pelatihan Nasional Konselor Anak dan Remaja g. Peringatan hari Disabilitas Internasional di Yogyakarta 4. Indikator Kegiatan/Hasil : terselesainya kasus keluarga yang datang ke layanan PUSPAGA Presentase capaian keuangan 93,48 % dan prosentase capaian kinerja 41,33 % Progres kerja dari skala penilaian capaian keuangan dan kinerja masuk pada penilaian 80>100 dan >100 dengan penilaian Baik dan Kurang Baik Capaian Hasil Kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan hak perlindungan perempuan dan anak b. Memperkuat pencegahan kekerasan terhadap anak melalui Puspaga c. Meningkatkan opengetahuan dan pemahaman anak tentang media social d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anak tentang seksualitas secara dini e. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada anak bagaimana melindungi diri sendiri f. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dan kapasitas orang tua tentang ketahanan keluarga, Pola Asuh dan manajemen konflik. 5. Dampak : Meningkatnya pemenuhan hak dalam lingkungan keluarga di Kabupaten Berau.. 6. Permasalahan Yang di hadapi : <ol style="list-style-type: none"> a. Banyaknya anak yang bermaslah berawal dari keluarga yang bermasalah / orang tua yang tidak mengetahui pola asuh yang baik b. Masih adan orang tua ABK (Anak berkebutuhan khusus) yang belum mendapat sosialisasi atau parenting c. Dalam melaksanakan kegiatan kelas ibu masih ada pasangan yang belum mendapatkan akte nikah d. Dalam Kegiatan kelas ibu masih ada anak yang putus sekolah e. Banyak anak – anak yang menggunakan media social yang berdampak buruk terhadap perkembangan anak. 							

NO.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
	f. Masih banyak sekolah sekolah yang belum mendapatkan sosialisasi						
	g. Kegiatan luar Gedung / dalam Gedung , konseling belum maksimal karena konselor bertugas rangkap di P2TP2A.						
	7. Cara Pemecahan Masalah :						
	a. Melakukan pendataan terhadap anak putus sekolah dan pasangan yang belum memiliki akte nikah.						
	b. Peningkatan Kapasitas SDM layanan Puspaga						
	c. Pendataan ABK						
	d. Mengupayakan dan memperbanyak kegiatan social / parenting orang tua di tingkat kampung sampai RT dan di sekolah yang rawan terhadap kejahatan seksual anak.						
	e. Melakukan perencanaan penambahan anggaran tahun 2020 untuk sasaran yang lebih luas sekolah - sekolah di seluruh kecamatan untuk mendapatkan sosialisasi / parenting orang tua anak untuk memperkuat pencegahan kekerasan terhadap anak.						
	f. Personal Puspaga pada tahun 2020 akan terpisah dengan P2TP2A						
	g. Meningkatkan Publitasi Puspaga pada tahun 2020.						

**CAPAIAN PELAYANAN KONSELING YANG DATANG KE PUSPAGA
TAHUN 2019**

NO	NAMA KLIEN	Hari / TANGGAL	PELAYANAN	KONSELOR	KET.
1.	Dra. Suentini Syakinatul, M.S.Pd	Kamis, 17 Jan 2019	- Konsultasi - Pengaduan Kasus	Susi Novita, ST	Rujukan P2Tp2A
2.	Yanti	Senin, 28 jan 2019	Konsultasi	Susi Novita, ST	Selesai
3.	Mahyuni Nining Indrayani	Senin, 15 Maret 2019	Konsultasi KDRT	Susi Novita, ST	Selesai
4.	Mahyuni Nining Indrayani	Kamis, 18 Maret 2019	Mediasi RT	Susi Novita, ST	Selesai
5.	Ines	Kamis, 2 Mei 2019	Konsultasi	Susi Novita, ST	Selesai
6.	Aji Nasution	Rabu, 22 Mei 2019	Konsultasi Kasus Anak	Susi Novita, ST	Selesai
7.	Eny Sulistiowati	Senin, 30 Sept 2019	Konsultasi Permasalahan Rumah Tangga	Susi Novita, ST	Selesai
8.	Anik Kusriani	Selasa, 1 Okt 2019	Konsultasi	Susi Novita, ST	Selesai
9.	Hasnawati	Rabu, 27 Nov 2019	Pelecehan Seksual	Susi Novita, ST	Rujukan P2Tp2A
10.	Diana Rohma Nur (Fathan Azhiun)	Senin 4 Des 2019	Konsultasi	Susi Novita, ST	Selesai

Tabel III.16
Program Penguatan Kelembagaan PUG
Kegiatan Pemenuhan Hak Anak

No	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
5	Pemenuhan Hak Anak)	277.000.000,-	260.014.502,-	93,97	-1 FA Kabupaten -13 FA Kec. -11 FA Kampung	-1 FA Kabupaten -13 FA Kec. -6 FA Kampung	80
<p>1. Tujuan Kegiatan : Terpenuhinya Hak Partisipasi Anak)</p> <p>2. Sasaran Strategis : Forum Anak</p> <p>3. Indikator Program/Keluaran : Pembentukan, Pembinaan, dan Evaluasi Forum Anak target 1 FA Kabupaten, 13 FA Kecamatan dan 11 FA Kampung Kegiatan yang di lakukan dalam pencapaian target kinerja :</p> <p>a. Penguatan Forum Anak</p> <p>b. Pelatihan 2 P</p> <p>c. Mengikuti Musrembang anak se Provinsi Kalimantan Timur</p> <p>4. Indikator Kegiatan/Hasil : Jumlah Anak dan Fasilitator Kabupaten, Kecamatan dan Kampung Prosentase capaian keuangan 93,97 % dan prosentase capaian kinerja 80% Progres kerja dari skala penilaian capaian keuangan dan kinerja masuk pada penilaianan 80>100 dan >100 dengan penilaian Baik Capaik Kinerja :</p> <p>a. Terbentuk 1 FA Kabupaten</p> <p>b. Terbentuk dan terbinanya 13 FA FA Kecamatan</p> <p>c. Terbentuk dan Terbinanya 6 FA Kampung.</p> <p>5. Dampak : Kabupaten Berau dapat menjadi Kabupaten Layak Anak.</p> <p>6. Permasalahan Yang di hadapi :</p> <p>a. Belum secara maksimal berfungsinya forum anak sebagai pelopor dan pelapor</p> <p>b. Perlu banyak bimbingan terhadap forum anak kecamatan dan kampung dalam menjalankan tugas sebagai pelopor dan pelapor</p> <p>c. Peran Pembina di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan / Kampung belum maksimal.</p> <p>7. Cara Pemecahan Masalah</p> <p>a. Perlu terus di lakukan pelatihan pelopor dan pelapor untuk forum anak</p> <p>b. Terus dilakukan bimbingan dan penguatan terhadap forum anak</p> <p>c. Peningkatan kapasitas pengurusan Forum Anak</p> <p>d. Koordinasi dengan Pembina tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan / Kampung.</p>							

CAPAIAN KINERJA PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN FORUM ANAK
TAHUN 2019

NO	FORUM ANAK				
	NAMA FORUM	KECAMATAN	JUMLAH ANGGOTA	TGL/No>SK	KET. Draf/Pros/SK
1	FA Kabupaten	Kab. Berau	32	2 Febr 2018 SK BUpati No, 117 tahun 2018	SK
2	FA Kecamatan Talisayan	Talisayan	31	22 Maret 2017 SK.Camat No.09	SK

				Tahun 2017	
3	FA Kecamatan Maratua	Maratua	30	09 Maret 2018 SK. Bupati No. 247 Tahun 2018	SK
4	FA Kecamatan Segah	Segah	38	09 Maret 2018 SK. Bupati No. 248 Tahun 2018	SK
5	FA Kecamatan Sambaliung	Sambaliung	29	12 Maret 2018 SK. Bupati No. 251 Tahun 2018	SK
6	FA Kecamatan Batu Putih	Batu Putih	22	26 Maret 2018 SK. Bupati No. 285 Tahun 2018	SK
7	FA Kecamatan Biduk - Biduk	Biduk - Biduk	20	26 Maret 2018 SK Bupati No. 284 Tahun 2018	SK
8	FA Kecamatan Gunung Tabur	Gunung Tabur	31	29 Maret 2018 SK Bupati No. 285 Tahun 2018	SK
9	FA Kecamatan Kelay	Kelay	20	08 Mei 2018 SK Bupati No. 384 Tahun 2018	SK
10	FA Kecamatan Tanjung Redeb	Tanjung Redeb	16	17 Mei 2018 SK Bupati No. 403 Tahun 2018	SK
11	FA Kecamatan Teluk Bayur	Teluk Bayur	29	17 Mei 2018 SK Bupati No. 404 Tahun 2018	SK
12	FA Kecamatan Pulau Derawan	Pulau derawan	30	08 Okt 2018 SK Bupati No. 633 Tahun 2018	SK
13	FA Kecamatan Tabalar	Tabalar	30	17 Okt 2018 SK Bupati No. 660 Tahun 2018	SK
14	FA Kecamatan Biatan	Biatan	29	22 Nop 2018 SK Bupati No. 733 Tahun 2018	SK
15	FA Kelurahan Karang Ambun	Karang Ambun	13	25 Februari 2019 SK Lurah No. 5 Tahun 2019	SK
16	FA Kampung Maluang	Maluang	29	31 Agustus 2018 SK Bupati No. 566 Tahun 2018	SK
17	FA Kelurahan Tanjung Redeb	Tanjung Redeb	15	26 Februari 2019 SK Lurah No. 08 Tahun 2019	SK
18	FA Kelurahan Sei Bedungun	Sei Bedungun	19	27 Februari 2019 SK Lurah No. 04 Tahun 2019	SK
19	FA Kampung Filanjau	Kampung Pijanau	31	28 Februari 2019 SK Lurah No. 09 Tahun 2019	SK
20	FA Kelurahan Gunung Panjang	Biatan	28	30 September 2019 SK Lurah No. 10 Tahun 2019	SK

1.7 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Tabel III.17
Program Peningkatan Peran Serta & Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Pembinaan Organisasi Perempuan	418.200.000,-	381.120.300,-	91,57	23 Organisasi	23 Organisasi	100%
<p>1. Tujuan Kegiatan : Meningkatkan peran serta organisasi perempuan dalam pembangunan di Kab. Berau (Pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan) antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk meningkatkan kapasitas SDM baik petugas / pelaksanaan maupun seluruh organisasi yang bergabung dalam GOW sebanyak 24 Organisasi terutama dalam hal pengetahuan, keterampilan dan keahlian organisasi perempuan dalam manajemen organisasi. - Untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta seluruh GOW dalam pembangunan terutama organisasi dalam pemberdayaan perempuan. - Menyampaikan beberapa regulasi yang terkait dengan penataan organisasi yang ideal dan menyampaikan program – program dan kegiatan yang ada pada DPPKBP3A. - Meningkatkan akses kelompok perempuan terhadap informasi dan edukasi di bidang PP <p>2. Sasaran Strategis : 23 GOW di Kabupaten Berau.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selain organisasi perempuan sasaran juga kepada pengurus dan anggota Dharmawanita Persatuan Kabupaten. <p>3. Indikator Program/Keluaran : Organisasi yang terbina dan terevaluasi target 23 Organisasi perempuan di Kabupaten Berau</p> <p>Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dilakukan dengan mengunjungi 12 Organisasi perempuan melakukan sosialisasi program DPPKBP3A dan menyampaikan beberapa regulasi terkait kegiatan di organisasi perempuan. - Rapat koordinasi dengan seluruh organisasi perempuan yang tergabung di GOW (24 Organisasi) - Melakukan monitoring dan evaluasi ke seluruh organisasi perempuan. - Sosialisasi peningkatan kapasitas perempuan / anggota Dharmawanita Persatuan Kabupaten Berau. - Pertemuan rutin bulanan GOW - Koordinasi dan pemberlajaran ke Samarinda dan Kutai Kertanegaran dalam rangka pencapaian penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (Penilaian panji – panji bidang PP) - Menghadiri HUT Dharmawanita tingkat Provinsi - Melaksanakan HUT Dharmawanita Persatuan dengan mengadakan lomba – lomba yang diikuti oleh seluruh anggota Dharmawanita Kabupaten Berau. <p>4. Indikator Kegiatan/Hasil : Terlatihnya dan terfasilitasinya kegiatan organisasi perempuan. Prosentase capaian keuangan 91,57 % dan prosentase capaian kinerja 100% Progres kerja dari skala penilaian capaian keuangan dan kinerja masuk pada penilaian 80>100 dan >100 dengan penilaian Baik dan Sangat Baik</p> <p>Capaian Kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2019 target kinerja 23 organisasi perempuan, Setelah melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap organisasi hasil evaluasi organisasi yang terdaftar sebanyak 25 organisasi wanita, Dengan sisa dana dari pembinaan 23 organisasi maka dapat kembali menghidupkan 1 organisasi perempuan sehingganya capaian target 23 Organisasi dan 1 menghidupkan kembali organisasi. Untuk 1 organisasi sdh tidak aktif lagi, <p>5. Dampak : Meningkatnya SDM Organisasi Perempuan</p> <p>6. Permasalahan Yang di hadapi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jadwal kunjungan pembinaan organisasi yang sering terjadi perubahan jadwal karena adanya 							

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
	kegiatan yang bersamaan di organisasi - Masih ada organisasi yang yang tidak bersedia di kunjungi. - Masih terbatasnya anggaran untuk melibatkan semua bidang dalam hal kunjungan ke Organisasi perempuan - Kurangnya staf pada Bidang PP sehingga dalam penyelesaian administrasi dan pelaporan tidak maksimal dalam tepat waktu dalam penyampaian. 7. Cara Pemecahan Masalah : - Perlu adanya pendekatan – pendekatan yang intensif, komunikasi dan koordinasi yang baik yang di akomodir dalam schedule dan rencana aksi. - Perlu strategis tertentu untuk tetap melibatkan semua bidang dengan anggaran yang ada. - Perlu adanya penambahan tenaga staf di Bidang PP khususnya seksi Bina Organisasi Perempuan.						

**CAPAIAN KINERJA PEMBINAAN DAN EVALUASI ORGANISASI PEREMPUAN
TAHUN 2019**

NO.	NAMA ORGANISASI	KEGIATAN
1.	Gabungan Organisasi Wanita	Pertemuan Ruti Bulanan Rakorda, Monev Organisasi, Gebyar Merah Putih
2.	Dharmawanita Kabupaten Berau	Rakorda, Monev Organisasi, Gebyar Merah Putih
3.	Persit Kartika Chandra Kiranan	Kunjungan Silaturahmi & Bina Organisasi Rakorda, Monev Organisasi, Gebyar Merah Putih
4.	Bhayangkari	Rakorda, Monev Organisasi, Gebyar Merah Putih
5.	Persatuan Istri Purawirawan (PERIP)	Rakorda, Monev Organisasi, Gebyar Merah Putih
6.	Himpunan Wanita Karya (HWK)	Rakorda, Monev Organisasi, Gebyar Merah Putih
7.	Pengajian Al Hidayah	Rakorda, Monev Organisasi, Gebyar Merah Putih
8.	Muslimah NU	Rakorda, Monev Organisasi, Gebyar Merah Putih
9.	Fatayat NU	Kunjungan Silaturahmi & Bina Organisasi ,Rakorda, Monev Organisasi
10.	Wanita Persatuan Pembangunan	Kunjungan Silaturahmi & Bina Organisasi ,Rakorda, Monev Organisasi
11.	Wanita Persatuan Whedatama RI	Kunjungan Silaturahmi & Bina Organisasi ,Rakorda, Monev Organisasi
12.	Persatuan Wanita Katolik RI	Kunjungan Silaturahmi & Bina Organisasi ,Rakorda, Monev Organisasi
13.	Aisyiyah	Rakorda, Monev Organisasi
14.	Ikatan Istri Karyawan TRH (IIKK)	Kunjungan Silaturahmi & Bina Organisasi ,Rakorda, Monev Organisasi
15.	Persit Yon Armed	Kunjungan Silaturahmi & Bina Organisasi ,Rakorda, Monev Organisasi
16.	Ikatan Bidan Indonesia	Rakorda, Monev Organisasi, Gebyar Merah Putih
17.	Muslimah Hidayatullah	Kunjungan Silaturahmi & Bina Organisasi ,Rakorda, Monev Organisasi

18.	Dharmayukti Karini	Kunjungan Silaturahmi & Bina Organisasi ,Rakorda, Monev Organisasi
19.	Ikatan Wanita Sulawesi Selatan	Rakorda, Monev Organisasi, Gebyar Merah Putih
20.	Persatuan Istri Karyawan Berau Coal	Rakorda, Monev Organisasi, Gebyar Merah Putih
21.	Persaudaraan Muslimah	Kunjungan Silaturahmi & Bina Organisasi ,Rakorda, Monev Organisasi
22.	Persatuan Karyawan Indo Pusaka Berau (PTIPB)	Kunjungan Silaturahmi & Bina Organisasi ,Rakorda, Monev Organisasi
23.	Kestuan Perempuan Partai Golkar (KPPG)	Kunjungan Silaturahmi & Bina Organisasi ,Rakorda, Monev Organisasi
24.	Ikatan Adhiaksa Dharmakarini Daerah	Rakorda, Monev Organisasi, Gebyar Merah Putih

Tabel III.18

Program Peningkatan Peran Serta & Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Kegiatan Expose Peningkatan Kualitas Perempuan dalam Pembangunan

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
2	Expose Peningkatan Kualitas Perempuan dalam Pembangunan	100.000.000,-	96.238.000,-	95,95	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
<p>1. Tujuan Kegiatan : Meningkatnya peran perempuan Ind. Dalm setiap aspek kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menuju pembangunan nasional yg berkelanjutan dan berkeadilan.</p> <p>2. Sasaran Strategis : Organisasi perempuan, OPD Khususnya perempuan, PKK</p> <p>10. Indikator Program/Keluaran : Terlaksananya kegiatan Expose peningkatan kualitas perempuan dalam pemabngunan (Dalam rangka peringatan hari ibu dan Hari Kartini)</p> <p>11. Indikator Kegiatan/Hasil : Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional Peringatan Hari Kartini dan Peringatan Hari Ibu Nasional. Prosentase capaian keuangan 95,95 % dan prosentase capaian kinerja 100% Progres kerja dari skala penilaian capaian keuangan dan kinerja masuk pada penilaianan 80>100 dan >100 dengan penilaian Baik dan Sangat Baik</p> <p>12. Dampak : Memotifasi serta meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya kaum ibu – ibu serta Meningkatkan pemahaman perempuan dalam menyatakan diri dalam kesetaraan gender di berbagai aspek pembangunan</p> <p>13. Permasalahan Di hadapi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya partisipasi dari seluruh organisasi perempuan yang ikut dalam kegiatan Expose peningkatan kualitas perempuan dalam pembangunan (pertandingan kudapan berbahan dasar ikan). - Kurangnya Peserta Pameran Hasil Karya dari Kelompok – kelompok UPPKS dan desa Prima dalam Pameran yang di adakan - Tempat yang di gunakan untuk acara pertandingan dan pameran yang belum tersedia. - Dana pendukung kegiatan masih belum maksimal. <p>14. Cara Pemecahan Masalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada tahun 2020 akan melakukan sosialisasi den pendekatan komunikasi dan 							

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
	koordinasi dengan seluruh organisasi perempuan di kabupaten Berau untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan – giatan yang dilakukan oleh DPPKBP3A.						
	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendekatan kepada kelompok UPPKS dan Kelpok Desa Prima untuk menghimbau kembali bahwa pentingnya mengikuti even – even yang di adakan untuk mendukung dan mempromosikan hasil produk yang telah di buat oleh kelompok dan dapat di perkenalkan kepada masyarakat. - Akan melakukan koordinasi kepada badan asset daerah untuk menyediakan tempat – tempat khusus yang dapat digunakan sebagai tempat pameran. - Tahun 2020 akan di upayakan membuat usulan penambahan anggaran untuk kegiatan Expose tersebut. 						

Tabel III.19
Program Peningkatan Peran Serta & Kesetiaan Gender dalam Pembangunan
Pembinaan dan evaluasi Model Desa Prima

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
3	Pembinaan dan Evaluasi Model Desa Prima	50.000.000,-	46.360.000,-	92,72	6 Kelompok	6 Kelompok	100
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan Kegiatan : Membuka dan memperluas kesempatan bagi kaum perempuan untuk mengembangkan potensi diri serta meningkatkan kesejahteraan hidup melalui mekanisme pengembangan aktivitas ekonomi produktif. 2. Sasaran Strategis : Ibu-ibu yang ada di kelompok desa prima. 3. Indikator Program/Keluaran : Terbina dan terevaluasinya Desa Prima di Kecamatan 4. Indikator Kegiatan/Hasil : Terbinanya kelompok Desa Prima. Prosentase capaian keuangan 92,72 % dan prosentase capaian kinerja 100% Progres kerja dari skala penilaian capaian keuangan dan kinerja masuk pada penilaian 80>100 dan >100 dengan penilaian Baik dan Sangat Baik 5. Dampak : Meningkatnya jumlah penghasilan keluarga 6. Permasalahan Yang di hadapi : Berdasarkan hasil pembinaan dan evaluasi ke kelompok – kelompok Desa Prima ada beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Kelompok Desa Prima Bedungun belum adanya alat untuk pengepakan ataupun pengemasan, mesin jahit dan permintaan study banding antara desa prima dan ke luar daerah - Kelompok Desa Prima Labanan belum adanya untuk alat pres serta mesin jahit dan border, rak kaca untuk etalase - Kelompok Desa Prima Maratua mengusulkan permintaan pengadaan mesin jahit penggilingan bakso , rak etalase - Kelompok Desa Prima Segah mengusulkan permintaan Mesin jahit dan etalase - Kelompok Desa Prima Gunung Tabur Mengusulkan pengadaan mesin jahit dan study banding di luar daerah dan Estale. - Kelompok Desa Prima Sambaliung mengusulkan untuk study banding antara desa prima dan luar daerah, pengadaan etalase dan meminta pelatihan keterampilan lainnya. - Kelompok Desa Prima Tanjung Batu mengusulkan pengadaan Mesin jahit, mesin pres dan mesin border. 7. Cara Pemecahan Masalah : <ul style="list-style-type: none"> - Akan di lakukan inventarisasi semua kebutuhan yang menjadi permasalahan dari semua kelompok desa prima dimana semua yang menjadi factor penghambat dalam meningkatkan kreatifitas dan produksi serta pemasaran dari kelompok desa prima di sebabkan adanya kurang mendukungnya peralatan kerja sehingga hal tersebut harus dapat di jadikan masukan dan progres kerja yang akan di usulkan pada penyusunan anggaran tahun 2020. 						

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
	<ul style="list-style-type: none"> - Pada kegiatan tahun 2020 juga selain berupaya mengusulkan pengadaan peralatan kerja bagi kelompok Desa Prima juga akan di programkan kegiatan untuk pelatihan – pelatihan yang mendukung meningkatnya produksi kreatif dan bagaiman mengemas produk sehingga di pasaran produk tersebut menjadi menarik dan memiliki identitas yang unggul. - Mengenai Program study banding untuk kelompok Desa Prima juga akan di rencanakan terutama study banding Kelompok Desa Prima anatar Kecamatan. 						

1.8 Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Tabel III.20

Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pembinaan dan Evaluasi Kelompok UPPKS

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Pembinaan dan Evaluasi Kelompok UPPKS	235.123.000,-	209.288.338,-	95,22	13 Kelom pok..	13 Kelompok	100
<p>8. Tujuan Kegiatan : Pembinaan dan Evaluasi Kelompok UPPKS secara luas antara lai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menumbuhkan Dinamika Kelompok - Meningkatkan Kualitas Keluarga - Menggali dan memanfaatkan sumber daya dan potensi masyarakat setempat guna memajukan kelompok. - Menyeragamkan dalam cara kegiatan administrasi kelompok termasuk administrasi keuangan. - Merangsang kelompok agar dapat meningkatkan usaha dan membangun ekonomi keluarga - Meningkatkan dan memantapkan para anggota kelompok dalam kesetaraan ber KB <p>9. Sasaran Strategis : Anggota Kelompok UPPKS di 13 Kecamatan</p> <p>Adapun Strategi yang di lakukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pembinaan tentang pentingnya kegiatan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) - Memberikan pembinaan tentang pengelolaan kelompok - Memberikan pembinaan tentang tugas- tugas kader pada kegiatan kelompok UPPKS - Memberikan pembinaan tentang pengelolaan administrasi dan keuangan - Memberikan pembinaan tentang pengelolaan usaha kelompok - Memberikan pembinaan tentang pembentukan kelompok UPPKS di Kampung KB - Mengundang nara sumber dari BPC Aku untuk memnberikan pembinaan. <p>10. Indikator Program/Keluaran : Jumlah Kelompok UPPKS yang terbina dan terevaluasi target 13 Kelompok.</p> <p>11. Indikator Kegiatan/Hasil : Terbinanya 13 Kelompok UPPKS</p> <p>Prosentase capaian keuangan 95,22 % dan prosentase capaian kinerja 100% Progres kerja dari skala penilaian capaian keuangan dan kinerja masuk pada penilaianan 80>100 dan >100 dengan penilaian Baik dan Sangat Baik</p> <p>12. Dampak : Meningkatnya tahapan keluarga sejahtera bagi kelompok UPPKS</p> <p>13. Permasalahan Yang di hadapi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terutama di kampung KB tentang UPPKS - Sarana dan prasarana yang di gunakan masih terbatas - Keterbatasan Modal - Ada beberapa produk belum memiliki PIRT - Pengemasan produk yang ada belum memadai. - Pemasaran produknya masih sangat terbatas, baru pada sekitar daerah sendiri <p>14. Cara Pemecahan Masalah :</p>							

No.	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
<ul style="list-style-type: none"> - Akan di lakukan pembinaan tentang pengelolaan kegiatan administrasi dan keuangan - Akan di adakanya pelatihan / pembinaan tentang pengemasan. - Akan melakukan pendataan kader UPPKS yang belum memiliki ijin PIRT akan di usulkan ke Dinas Kesehatan untuk mengikuti pelatihan. - Memberikan pelatihan pengemasan kepada anggota kelompok UPPKS. 							

**CAPAIAN KINERJA PEMBINAAN DAN EVALUASI KELOMPOK UPPKS
TAHUN 2019**

NO.	KECAMATAN	KAMPOK/ KELURAHAN	NAMA KELOMPOK	KEGIATAN YANG DI LAKUKAN
1.	Maratua	Teluk Alulu		Pembinaan / penyuluhan perlunya pembentukan kel. UPPKS di Kampung KB, Menyerahkan Buku pedoman materi pedoman pengelolaan UPPKS
2.	Gunung Tabur	Pulau Besing	Kembang Goyang	Pembinaan / penyuluhan perlunya pembentukan kel. UPPKS di Kampung KB, Menyerahkan Buku pedoman materi pedoman pengelolaan UPPKS
		Gunung Tabur	Pangeran di ulu	Pembinaan / penyuluhan perlunya pembentukan kel. UPPKS di Kampung KB, Menyerahkan Buku pedoman materi pedoman pengelolaan UPPKS
		Birang	Lavender	Pembinaan / penyuluhan perlunya pembentukan kel. UPPKS di Kampung KB, Menyerahkan Buku pedoman materi pedoman pengelolaan UPPKS
3.	Sambaliung	Sambaliung		Pembinaan / penyuluhan perlunya pembentukan kel. UPPKS di Kampung KB, Menyerahkan Buku pedoman materi pedoman pengelolaan UPPKS
4.	Segah	Tepian Buah	Tepian Buah	Pembinaan / penyuluhan perlunya pembentukan

				kel. UPPKS di Kampung KB, Menyerahkan Buku pedoman materi pedoman pengelolaan UPPKS
5.	Tanjung Redeb	Gunung Panjang	Lestari	Pembinaan / penyuluhan perlunya pembentukan kel. UPPKS di Kampung KB, Menyerahkan Buku pedoman materi pedoman pengelolaan UPPKS
		gayam		Pembinaan / penyuluhan perlunya pembentukan kel. UPPKS di Kampung KB, Menyerahkan Buku pedoman materi pedoman pengelolaan UPPKS
		Karang Ambon		Pembinaan / penyuluhan perlunya pembentukan kel. UPPKS di Kampung KB, Menyerahkan Buku pedoman materi pedoman pengelolaan UPPKS
6.	Teluk Bayur	Labanan Jaya	Mawar	Pembinaan / penyuluhan perlunya pembentukan kel. UPPKS di Kampung KB, Menyerahkan Buku pedoman materi pedoman pengelolaan UPPKS
		Tumbit Melayu		Pembinaan / penyuluhan perlunya pembentukan kel. UPPKS di Kampung KB, Menyerahkan Buku pedoman materi pedoman pengelolaan UPPKS
7.	Pulau Derawan	Teluk Semanting	Sejahtera Khas Semanting	Pembinaan / penyuluhan perlunya pembentukan kel. UPPKS di Kampung KB, Menyerahkan Buku pedoman materi pedoman pengelolaan UPPKS
		Pulau Derawan	Pengrajin	Pembinaan / penyuluhan perlunya pembentukan

				kel. UPPKS di Kampung KB, Menyerahkan Buku pedoman materi pedoman pengelolaan UPPKS
8.	Talisayan	Sumber Mulya		Pembinaan / penyuluhan perlunya pembentukan kel. UPPKS di Kampung KB, Menyerahkan Buku pedoman materi pedoman pengelolaan UPPKS
9.	Biduk – Biduk	Teluk Sulaiman	Pasi Putih	Pembinaan / penyuluhan perlunya pembentukan kel. UPPKS di Kampung KB, Menyerahkan Buku pedoman materi pedoman pengelolaan UPPKS
10.	Tabalar	Tabalar Muara		Pembinaan / penyuluhan perlunya pembentukan kel. UPPKS di Kampung KB, Menyerahkan Buku pedoman materi pedoman pengelolaan UPPKS
11.	Biatan	Biatan Ilir		Pembinaan / penyuluhan perlunya pembentukan kel. UPPKS di Kampung KB, Menyerahkan Buku pedoman materi pedoman pengelolaan UPPKS
12.	Batu Putih	Sumber Agung		Pembinaan / penyuluhan perlunya pembentukan kel. UPPKS di Kampung KB, Menyerahkan Buku pedoman materi pedoman pengelolaan UPPKS
13.	Kelay	Muara Lesan		Pembinaan / penyuluhan perlunya pembentukan kel. UPPKS di Kampung KB, Menyerahkan Buku pedoman materi pedoman pengelolaan UPPKS

Tabel III.21
Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Kegiatan Pengkajian, Pengembangan Model Operasional BKB Tahun 2018

No.	Kegiatan	Anggaran		Capai (%)	Keluaran		Capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
2	Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu - PADU	82.110.000,-	78.181.055,-	95,22	13 Kel	13 Kel	100
<p>1. Tujuan Kegiatan : Meningkatnya pengetahuan Masyarakat dan peran serta para kader BKB, BKR, BKL Pos Yandu , Padu dalam program PKKBPK (Penyulu kependudukan keluarga berencana dan pembangunan Keluarga)</p> <p>2. Sasaran Strategis : Kader BKB, BKR, BKL, Pos Yandu dan PADU antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orang tua yang mempunyai anak balita (BKB) yang ada di wilayah desa / kelurahan - Orang tua yang mempunyai anak Remaja (BKR) yang ada di wilayah desa / kelurahan - Orang tua yang mempunyai anak Lansia (BK) yang ada di wilayah desa / kelurahan <p>3. Indikator Program/Keluaran : Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan BKB, BKR, BKL, target 13 Kelompok Tribina</p> <p>4. Indikator Kegiatan/Hasil : Terbinanya Para Kader BKB, BKR, BKL di 13 Kelompok . Prosentase capaian keuangan 95,22 % dan prosentase capaian kinerja 100% Progres kerja dari skala penilaian capaian keuangan dan kinerja masuk pada penilaianan 80>100 dan >100 dengan penilaian Baik dan Sangat Baik</p> <p>5. Dampak Meningkatkan Kesadaran masyarakat tentang pentingnya kegiatan Tribina dalam rangka pembinaan pada keluarga yang memiliki balita, remaja dan lansia sehingga dapat meningkatkan aktualita menuju Indonesia sehat.</p> <p>6. Permasalahan Yang di hadapi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ibu kepala kampung pada awalnya belem nerespon secara maksimal di karenakan belum pahamnya apa yang di maksud dengan kelompok BKB,BKR dan BKL. - Belum adanya pemahaman bagi kader pengisian KKA dan K/o, R/R dan C/1 <p>7. Cara Pemecahan Masalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akan diadakan pembinaan dan latihan dasar oleh PKB - Akan di siapkan kelengkapann administrasi tertama KKA/dan K/O. R/R dan C/1 							

CAPAIAN KINERJA PEMBINAAN DAN EVALUASI KELOMPOK BKB,BKR,BKL
TAHUN 2019

No.	Kecamatan	Kel/Kamp	Nama Kelompok	Jml. Peserta	Kegiatan yang di lakukan
1.	Tanjung Redeb	Tanjung Redeb	BKB Hidayah	10 Kader	Pembinaan dan penilaian kelompok BKB tentang penyuluhan kader BKB dan kelengkapan administrasi

2.	Gunung Tabur	Meluang	BKL Pipit	10 Kader	Pembinaan dan penilaian kelompok BKB, BKL tentang penyuluhan kader BKB dan kelengkapan administrasi
		Birang	BKB Belibis	10 Kader	
3.	Segah	Bukit Makmur	BKB Keluarga Makmur	10 Kader	Pembinaan dan penilaian kelompok BKB, BKL tentang penyuluhan kader BKB dan kelengkapan administrasi
4.	Teluk Bayur	Labanan Makmur	BKB Bangau I	10 Kader	Pembinaan dan penilaian kelompok BKB, BKL tentang penyuluhan kader BKB dan kelengkapan administrasi, membentuk kelompok dan cara pengisian kartu kembang anak
		Tumbit Melayu	Belum Terbentuknya Kelompok	10 Kader	
5.	P. Derawan	Tanjung Batu	BKB Mutiara Bunda	10 Kader	Pembinaan dan penilaian kelompok BKB, BKL tentang penyuluhan kader BKB dan kelengkapan administrasi, membentuk kelompok dan cara pengisian kartu kembang anak
		P. Derawan	Belum Terbentuk kelompok	10 Kader	
6.	Sambaliung	Pilanjau	BKB Mawar	10 Kader	Pembinaan dan penilaian kelompok BKB, BKL tentang penyuluhan kader BKB dan kelengkapan administrasi
7.	Tabalar	Harapan Jaya	Harapan Jaya	10 Kader	Pembinaan dan penilaian kelompok BKB, BKL tentang penyuluhan kader BKB dan kelengkapan administrasi
8.	Biatan	Biatan Ilir	Belum terbentuk kelompok	10 Kader	Pembinaan dan penilaian kelompok BKB, BKL tentang penyuluhan kader BKB dan kelengkapan administrasi serta Membentuk kelompok dengan cara pengisian kartu kembang anak.
9.	Kelay	Long Beliu	Belum terbentuk kelompok	10 Kader	Pembinaan dan penilaian kelompok BKB, BKL tentang penyuluhan kader BKB dan kelengkapan administrasi, serta

					Membentuk kelompok dengan cara pengisian kartu kembang anak
10.	Talisayan	Talisayan	BKB Taman kita	10 Kader	Pembinaan dan penilaian kelompok BKB, BKL tentang penyuluhan kader BKB dan kelengkapan administrasi
11.	Batu Putih	Sumber Agung	Belum terbentuk kelompok	10 Kader	Pembinaan dan penilaian kelompok BKB, BKL tentang penyuluhan kader BKB dan kelengkapan administrasi, serta Membentuk kelompok dengan cara pengisian kartu kembang anak
12.	Biduk Biduk	Biduk - Biduk	BKB Pelita Bangsa	10 Kader	Pembinaan dan penilaian kelompok BKB, BKL tentang penyuluhan kader BKB dan kelengkapan administrasi

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dan tahun 2018

1. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL), Belanja Langsung (BL) dan Realisasi Retribusi Pendapatan daerah Tahun 2019

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Realisasi Anggaran Tahun 2019 dengan rencana kerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam DPA-SKPD 2019 yang terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Langsung , Anggaran Belanja langsung dan Pendapatan Retribusi Daerah sebagaimana tabel realisasi dibawah ini:

Tabel III.22

Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2019

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase (%)
1	2	3	4	6
1	Belanja Tidak Langsung	5.748.042.500,-	5.280.304.544,-	91,86 %
		5.749.042.500,-	5.280.304.544,-	91,86 %

Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2019 dengan prosentase 91,86 % Jika di ukur dari Skala penilaian realisasi tersebut pada skala nilai 80>100 kategori penilaian **Baik**, dengan kondisi belanja pegawai berupa belanja gaji dan tunjangan serta belanja tambahan penghasilan PNS semua dapat terbayar.

Tabel III.23
Realisasi Belanja Langsung Tahun 2019

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase (%)
1	2	3	4	6
1	Belanja Langsung	9.500.031.500,-	7.567.427.590,-	79,66 %
		9.500.031.500,-	7.567.427.590,-	79,66 %

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan rata - rata serapan realisasi target kinerja sebesar 96,22 % Jika di ukur dari skala penilaian maka realisasi Fisik pada skala nilai 80 > 100 kategori Penilaian **Baik** dan realisasi keuangan 79,66 pada skala .55 - 80 kategori **Sedang** . Secara keseluruhan penilaian sudah di anggap baik karena pelaksanaan semua kegiatan yang di rencanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai sasaran yang telah di tetapkan. Adapun Penyerapan Anggaran Keuangan kegiatan tidak mencapai 100 % di sebabkan adanya 2 kegiatan yang pelaksanaannya tidak mencapai target kinerja dan penyerapan anggaran yang tidak efektif dan efisien, kegiatan tersebut adalah :

- 1) Kegiatan Fasilitasi Penguatan kelembagaan PIUSPAGA berbasis Hak Anak target kinerja sebesar 4000 orang realisasi 1,653 Orang , hal tersebut di karenakan kurangnya anggaran kegiatan
- 2) Kegiatan Bantuan Operasional KB (DAK - BOKB tahun 2019) target 4 kegiatan 390 Kampung hanya terealisasi 110 kampung dengan presentase kinerja 28,20 % Hal tersebut di karenakan masih rendaknya pemahaman masyarakat tentang program kegiatan KKBPK dan jumlah PKB/PLKB yang tidak sesuai dengan jumlah kampung yang di bina.

Tabel III.24**Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2019**

No.	Uraian	Target	Realisasi	Prosentase (%)
1	2	3	4	6
1	Retribusi Sewa Gedung Busak malur	66.000.000,-	78.750.000,-	119 %

Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas dalam penyelenggaraan pemungutan retribusi pinjam pakai Gedung Busak Mallur adapun Anggaran Tahun 2019 sesuai dengan rencana kerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam DPA-SKPD

Adapun realisasi sesuai table III.24 pendapatan retribusi daerah sebagaimana target yang telah di tentukan tahun 2019 capaian sebesar 119 % (105 kali peminjaman dalam setahun) pada skala >100 kategori penilaian **Sangat Baik**,

2. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL), Belanja Langsung (BL) dan Realisasi Retribusi Pendapatan daerah Tahun 2018

Pada capaian kinerja perangkat daerah akan menyajikan Capaian Kinerja Belanja Tidak Langsung Anggaran Tahun 2018 dengan capaian kinerja Sesuai dengan rencana kerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam DPA-SKPD tahun 2018 yang terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Anggaran Belanja langsung (BL) serta realisasi Retribusi Daerah sebagaimana table dibawah ini:

Tabel III.25**Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2018**

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase (%)
1	2	3	4	6
1	Belanja Tidak Langsung	5.914.905.000,-	4.852.665.644,-	82,04 %
		5.914.905.000,-	4.852.665.644,-	82,04 %

Realisasi Belanja Tidak Langsung tahun 2018 dengan Prosentase sebesar 82,04 %. Jika di ukur dari skala penilaian maka untuk realisasi belanja tidak langsung pada skala Nilai 80 > 100 kategori penilaian **baik**.

Tabel III.26

Realisasi Belanja Langsung Tahun 2018

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase (%)
1	2	3	4	6
1	Belanja Langsung	8.187.477.000,-	6.506.041.722,-	79,46%
		8.187.477.000,-	6.506.041.722,-	79,46%

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan rata - rata serapan realisasi target kinerja sebesar 99,08 % adapun rata - rata serapan realisasi keuangan sebesar 79,46 %. Jika di ukur dari skala penilaian maka untuk realisasi targrt kinerja pada Skala Nilai 80>100 Kategori Penilaian **Baik** sedangkan untuk realisasi keuangan pada Sakala Nilai >55-80 Kategori Penilaian **Sedang**. Secara keseluruhan penilaian sudah di anggap baik karena pelaksanaan semua kegiatan yang di rencanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai sasaran yang telah di tetapkan.

Tabel III.27

Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2018

No.	Uraian	Target	Realisasi	Prosentase (%)
1	2	3	4	6
1	Retribusi Sewa Gedung Busak malur	61.500.000,-	86.250.000,-	140 %
		61.500.000,-	86.250.000,-	140 %

Realisasi Pendapatan Hasil Retribusi Daerah dengan Prosentase sebesar 140 % dari 115 Kali peminjaman Jika di ukur dari skala penilaian maka untuk realisasi Retribsui Sewa Gedung Busak Malur pada Skala Nilai > 100 kategori Penilaian **Sangat Baik**

3. Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi.

DPPKBP3A pada anggaran tahun 2019 melaksanakan Program kegiatan sebanyak 8 program kegiatan, ada 2 program kegiatan yang menjadi program prioritas yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) DPPKBP3 antara lain :

3.1 Program Keluarga Berencana

3.2 Program Penguatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender dan Anak

Dari dua (2) program tersebut mempunyai empat (4) sasaran strategis dan empat (4) indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2019 ,sebagaimana target dan realisasi dapat di lihat table III.2

Tabel III.28

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Implementasi Pengarusutaman Gender	Presentase OPD yang sudah melaksanakan PPRG	23,4 %	42,56 %	181 %
2	Meningkatkan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Presentase Penanganan Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak	100 %	100%	100%
3	Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA)	Madya (650) Poin	Pratama (>600) Poin	92,3 %
4	Keikut Sertaan Pasangan Usia	Presentase Pemakaian	75,84 %	76,50 %	100,9 %

	Subur (PUS) menjadi KB Aktif	Kontrasepsi (CPR)			
--	------------------------------	-------------------	--	--	--

Dari table III.28 berdasarkan Realisasi Kinerja Sasaran Strategi tahun 2019 dapat di analisa penyebab keberhasilan / kegagalan serta alternative solusi sebagai berikut :

1. Meningkatkan implementasi pengarusutamaan gender dengan indikator kinerja Prosentase OPD yang melaksanakan PPRG (Perencanaan Penganggaran Responsip Gender) target 23,41 % dari 47 OPD di Kabupaten Berau yang di harapkan sudah melaksanakan PPRG sebanyak 11 OPD di tahun 2019.

Realisasi dari Anggaran tahun 2019 dan target sasaran strategi tahun 2019 Capaian dapat di tingkatkan menjadi 20 Opd dari 47 OPD yang ada di Kabupaten Berau sehingga prosentase capaian meningkat sebesar 42, 56 % hal tersebut di anggab sangat baik karena ada kenaikan target sebesar 19,15 % dari target yang di rencanakan. Hal tersebut karena pola kegiatan untuk pencapaian target kinerja dengan melakukan pelatihan PPRG kepada 20 OPD dan Road Show PPRG metode jemput bola ke 20 OPD sehingga capaian kinerja melebihi target yang di harapkan (Meningkatkan 19,15 %) dan juga adanya dukungan dari Bapelitbang dalam usulan anggaran tahun 2019.

2. Meningkatkan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Memerlukan Perlindungan Khusus dengan indikator kinerja Presentase Penanganan Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak target 100% dari kasus yang terlapor dan kasus yang di tangani.

Realisasi dari Anggaran tahun 2019 dan target sasaran strategi tahun 2019 Capaian Kasus yang terlapor 67 Kasus dan kasus tertangani 67 Kasus capaian kinerja sebesar 100 %.

Adapun jenis kasus yang terlapor dan di tangani tahun 2019 sebagai berikut:

- 2.1. KDRT 1 Kasus terlapor dan di tangani dari bulan Agustus - Desember 2019.

- 2.2 Kekerasan Seksual 19 kasus terlapor dan di tangani dari bulan Januari – Desember 2019.
- 2.3. Penelantaran 2 kasus terlapot dan di tangani dari bulan September – Desember 2019.
- 2.4. Kekerasan Masa Pacaran 2 kasus terlapor dan di tangani dari bulan Februari – Desember 2019.
- 2.5. Hak Asuh Anak 7 kasus terlapor dan di tangani dari bulan Februari – Desember 2019.
- 2.6. Kekerasan Pada Anak 4 kasus terlapor dan di tangani dari bulan Maret – Desember 2019.
- 2.7. Penganiayaan / Kekerasan Publik 3 kasus terlaporkan dan di tangani dari bulan Februari – Desember 2019.
- 2.8. Perdagangan Orang (TPPO) 1 kasus terlaporkan dan di tangani dari bulan September – Desember 2019.
- 2.9. Anak Berhadapan dengan Hukun (ABH) 12 kasus terlaporkan dan di tangani dari bulan Januari – Desember 2019.
- 2.10. Jenis kasus lain – lain 16 kasus terlaporkan dan di tangani dari bulan Januari – Desember 2019.

Dari kasus yang terlaporkan semua dapat terlayani dengan baik dan terfasilitasi sesuai dengan SOP dan pelayanan kasus di lakukan di P2TP2A dan tindak lanjut tahun 2020 P2TP2A akan di rubah menjadi UPT PPA dalam tupoksi yang sama.

3. Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dengan Indikator kinerja Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA), target Madya dengan poin 650.

Realisasi dari Anggaran tahun 2019 dan target sasaran strategi tahun 2019 Capaian Pratama 600 Poin hal tersebut tidak mencapai harapan yang di inginkan di karenakan dalam melaksanakan kegiatan masih di temukan kekurangan atau permasalahan antara lain :

- Perda yang ada belum mencakup 5 Klaster dari 24 Indikator KLA
- Gugus Tugas KLA belum terkoordinasi dengan maksimal
- RAD KLA belum terkoordinasi dengan maksima;
- Profil anak belum sesuai dengan yang di inginkan

- Kelana baru 1 dari 13 Kecamatan
- Dekala baru 2 dari 109 Kelurahan / Kampung
- PATBM ada 43 dari 109 Kelurahan / Kampung
- Lembaga masyarakat belum ada peningkatan dan belum terkoordinasi dengan baik
- Dunia usaha tidak bisa mendapatkan datanya dengan baik terkait perannya di pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak .
- APSAI belum terbentuk
- Mekanisme pengawasan internal di sarana – sarana public milik pemerintah belum terkoordinasi dengan baik.
- FA Kabupaten 1, FA Kecamatan 13, FA Kelurahan / Kampung 8, peran dan peningkatan kapasitas mereka belum maksimal
- Lembaga pengasuhan keluarga dan anak (Puspaga, LK3.BKK.BKB) belum maksimal
- Belum adanya Lembaga pengasuhan alternative yang berstandarisasi dan pengawasan yang maksimal.
- Koordinasi tentang PAUD HI belum maksimal
- Taman yang ada belum pernah di adakan audit
- Zona KTR dan pelaksanaan sangsinya belum maksimal
- SRA baru 20 sekolah
- Koordinasi dengan APH terkait ABH perlu di tingkatkan.
- Data Teknis.

Cara Pemecahan Masalah

- Membaut Perda yang mencakup 5 klaster dan 24 indikator KLA
- Memaksimalkan koordinasi dengan Gusus Tugas KLA di tahun 2020
- Memaksimalkan RAD KLA
- Perbaikan dalam pembuatan profil anak
- Pembentukan kemabali Kelana yang baru.
- Pembentukan kembali Dekela yang baru
- Memaksimalkan Fungsi PATBM
- Meningkatkan koordinasi dengan Lembaga masyarakat
- Memaksimalkan permintaan data dari Dunia Usaha terkait perannya dalam pemenuhan dan perlindungan khusus

- Membentuk APSAI
 - Meningkatkan koordinasi terkait mekanisme pengawasan internet di sarana public
 - Membentuk Forum Anak di tingkat Kelurahan / Kampung
 - Peningkatan kualitas dan kapasitas forum anak
 - Memaksimalkan Lembaga pengasuhan keluarga dan anak
 - Memaksimalkan koordinasi tentang PAUD HI
 - Melaksanakan audit terhadap taman yang ada
 - Pelaksanaan sanksi di zona KTR
 - Pembentukan sekolah ramah anak
 - Memaksimalkan koordinasi dengan APH terkait ABH.
4. Keikut Sertaan Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi KB Aktif dengan Indikator kinerja Presentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR) target 75,84 % dari KB Aktif (PUS Aktif) sebanyak 34.596 per Pasangan Usia Subur (PUS) 45.615 Target tahun 2019.

Realisasi dari Anggaran tahun 2019 dari target sasaran strategi tahun 2019 Capaian per Desember 2019 sebesar 76,5 % dari KB Aktif (PUS Aktif) 34.149 per Pasangan Usia Subur (PUS) 44.378.

Dari capaian tersebut bahwa dengan jumlah pasangan usia subur sebanyak 44.378 PUS sudah 7 % sudah menjadi peserta KB aktif atau sebanyak 34.149 PUS Aktif dengan menggunakan alat kontrasepsi antara lain IUD, MOW, MOP Kondom, Implat, Suntik dan Pil.1

4. Analisa program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Berdasarkan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dari 8 program kegiatan semua dapat di laksanakan dengan baik dan tidak ada kegiatan yang mengalami kegagalan dalam mencapai target kinerja.

Dari analisa penyebab keberhasilan / kegagalan serta alternative solusi di atas dari 2 program prioritas dan 4 indikator kinerja utama (IKU), hanya 1 indikator saja yang belum mencapai target harapan yaitu Indikator Kabupaten / Kota Layak Anak (KLA) target peringkat madya dengan poin 650 perolehan hanya Pratama dengan poin 600. Namun hal tersebut tidak di anggap program yang gagal.

3.4 Realisasi Anggaran

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Realisasi Anggaran Tahun 2019 dengan rencana kerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam DPA-SKPD 2019 yang terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Langsung , Anggaran Belanja langsung dan Pendapatan Retribusi Daerah sebagai berikut :

Tabel III.29
Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2019

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase (%)
1	2	3	4	6
1	Belanja Tidak Langsung	5.748.042.500,-	5.280.304.544,-	91,86 %
		5.749.042.500,-	5.280.304.544,-	91,86 %

Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2019 dengan prosentase 91,86 % Jika di ukur dari Skala penilaian realisasi tersebut pada skala nilai 80>100 kategori penilaian **Baik**, dengan kondisi belanja pegawai berupa belanja gaji dan tunjangan serta belanja tambahan penghasilan PNS semua dapat terbayar.

Tabel III.30
Realisasi Belanja Langsung Tahun 2019

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase (%)
1	2	3	4	6
1	Belanja Langsung	9.500.031.500,-	7.567.427.590,-	79,66 %
		9.500.031.500,-	7.567.427.590,-	79,66 %

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan rata - rata serapan realisasi target kinerja sebesar 96,22 % Jika di ukur dari skala penilaian maka realisasi Fisik pada skala nilai 80 > 100 kategori Penilaian **Baik** dan realisasi keuangan 79,66 pada skala .55 - 80 kategori **Sedang** . Secara keseluruhan penilaian sudah di anggap baik karena pelaksanaan semua kegiatan yang di

rencanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai sasaran yang telah di tetapkan.

Tabel III.31
Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2019

No.	Uraian	Target	Realisasi	Prosentase (%)
1	2	3	4	6
1	Retribusi Sewa Gedung Busak malur	66.000.000,-	78.750.000,-	119 %

Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas dalam penyelenggaraan pemungutan retribusi pinjam pakai Gedung Busak Mallur adapun Anggaran Tahun 2019 sesuai dengan rencana kerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam DPA-SKPD

Adapun realisasi sesuai table III.24 pendapatan retribusi daerah sebagaimana target yang telah di tentukan tahun 2019 capaian sebesar 119 % (105 kali peminjaman dalam setahun) pada skala >100 kategori penilaian **Sangat Baik**.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Tahun 2019, antara lain :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan Sesuai Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau dan Peraturan Bupati Berau No. 5 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Berau, telah dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya aparatur yang dimiliki yang tentunya tetap mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit organisasi dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Berau. Selain itu, pelaksanaan pelayanan aparatur maupun pelayanan masyarakat yang melekat pada tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana juga tetap mengupayakan pada pemenuhan kebutuhan stakeholder lembaga ini.
2. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewajiban diperoleh dari laporan kinerja masing-masing unit organisasi dalam lingkup Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau yang melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategik. Penetapan sasaran strategik ini mengacu pada pemenuhan tujuan, misi dan visi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Berau sebagaimana telah disepakati dalam Rencana Strategik.
3. Dalam hal pencapaian sasaran yang ditetapkan dapat terlihat bahwa tidak seluruhnya dapat mencapai kinerja yang diharapkan. Beberapa pokok permasalahan yang menjadi kendala pencapaian kinerja sasaran strategik Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Berau terutama disebabkan oleh beberapa Faktor antara lain :

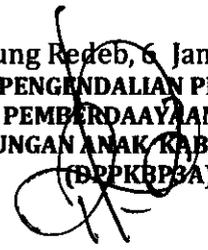
- a. Tidak meningkatnya perolehan Kabupaten Kota Layak Anak (KLA) di sebabkan beberapa hal :
 - Perda yang ada belum mencakup 5 Klaster dari 24 Indikator KLA
 - Gugus Tugas KLA belum terkoordinasi dengan maksimal
 - RAD KLA belum terkoordinasi dengan maksima;
 - Profil anak belum sesuai dengan yang di inginkan
 - Kelana baru 1 dari 13 Kecamatan
 - Dekala baru 2 dari 109 Kelurahan / Kampung
 - PATBM yang ada 43 dari 109 Kelurahan / Kampung
 - Lembaga masyarakat belum ada peningkatan dan belum terkoordinasi dengan baik.
- b. Kegiatan PUSPAGA dengan target 4.000 orang terealisasi hanya 1,653 orang hal tersebut di karenakan :
 - Banyaknya anak yang bermasalah berawal dari keluarga yang bermasalah / orang tua yang tidak mengetahui pola asuh yang baik
 - Masih adan orang tua ABK (Anak berkebutuhan khusus) yang belum mendapat sosialisasi atau parenting
 - Dalam melaksanakan kegiatan kelas ibu masih ada pasangan yang belum mendapatkan akte nikah
 - Dalam Kegiatan kelas ibu masih ada anak yang putus sekolah
 - Banyak anak - anak yang menggunakan media social yang berdampak buruk terhadap perkembangan anak.
 - Masih banyak sekolah sekolam yang belum mendapatkan sosialisai
 - Kegiatan luar Gedung / dalam Gedung , konseling belum maksimal karena konselor bertugas rangkap di P2TP2A.
- C Kegiatan Bantuan Operasional KB (DAK - BOKB) dari targer 390 kali pertemuan realisasi kinerja 110 kali pertemuan di karenakan :

- Masih rendah tingkat pemahaman masyarakat tentang Program KKBPK
- Akses menuju kampung KB yang sangat jauh dan sulit (melalui jalan yang berbatu, sungai dan lautan)
- Masih banyak kampung KB yang letak geografisnya jauh dan belum ada signal telepon seluler sehingga sulit untuk berkoordinasi melalui telepon seluler.
- Tidak tersedianya mobil Mupen sebagai sarana melakukan penyuluhan keliling maupun pemutaran film program KKBPK di masyarakat yang sulit untuk di jangkau.
- Petugas PLKB sebagai ujung tombak di lini lapangan sangat terbatas, dari 110 Kelurahan / Kampung hanya ada 16 PLKB, idealnya setiap 2 Kampung 1 PLKB. Bahkan ada 1 Kecamatan yang tidak mempunyai PLKB / PKB

Hal tersebut di atas tidak di anggap bahwa program dan kegiatan yang di lakukan adalah gagal Namun untuk tahun-tahun mendatang hal yang belum mencapai target pada tahun 2019 tersebut akan menjadi perhatian seluruh kepala Bidang khususnya pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Bidang Perlindungan Anak diupayakan untuk dapat lebih meningkatkan kinerja dan berupaya semaksimal mungkin untuk memperkecil kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kinerja yang ingin dicapai, tentunya dengan mengacu kepada sasaran strategis dari program kegiatan.

Demikian yang dapat kami sampaikan dalam penyusunan LK-JIP ini. Diharapkan, Penyusunan LK-JIP ini dapat memberikan gambaran yang jelas, transparan dan akuntabel yang mampu mendorong aparatur pemerintah untuk selalu meningkatkan kinerja dalam upaya pencapaian tujuan dari pembangunan yang lebih efektif dan efisien.

Tanjung Redeb, 6 Januari 2020
**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
 BERENCANA, PEMERDAAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BERAU
 (BPPKBPSA)**



Dr. Hj. ROHAINI
 PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
 NIP. 19600815 198602 2 007